

# **Sinergitas *Stakeholders* dalam Inovasi Daerah**

(Studi Pada Program Seminggu di Kota Probolinggo (SEMIPRO))

**SKRIPSI**

**TRIANA RAHMAWATI**

**NIM. 105030100111027**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK**

**MALANG**

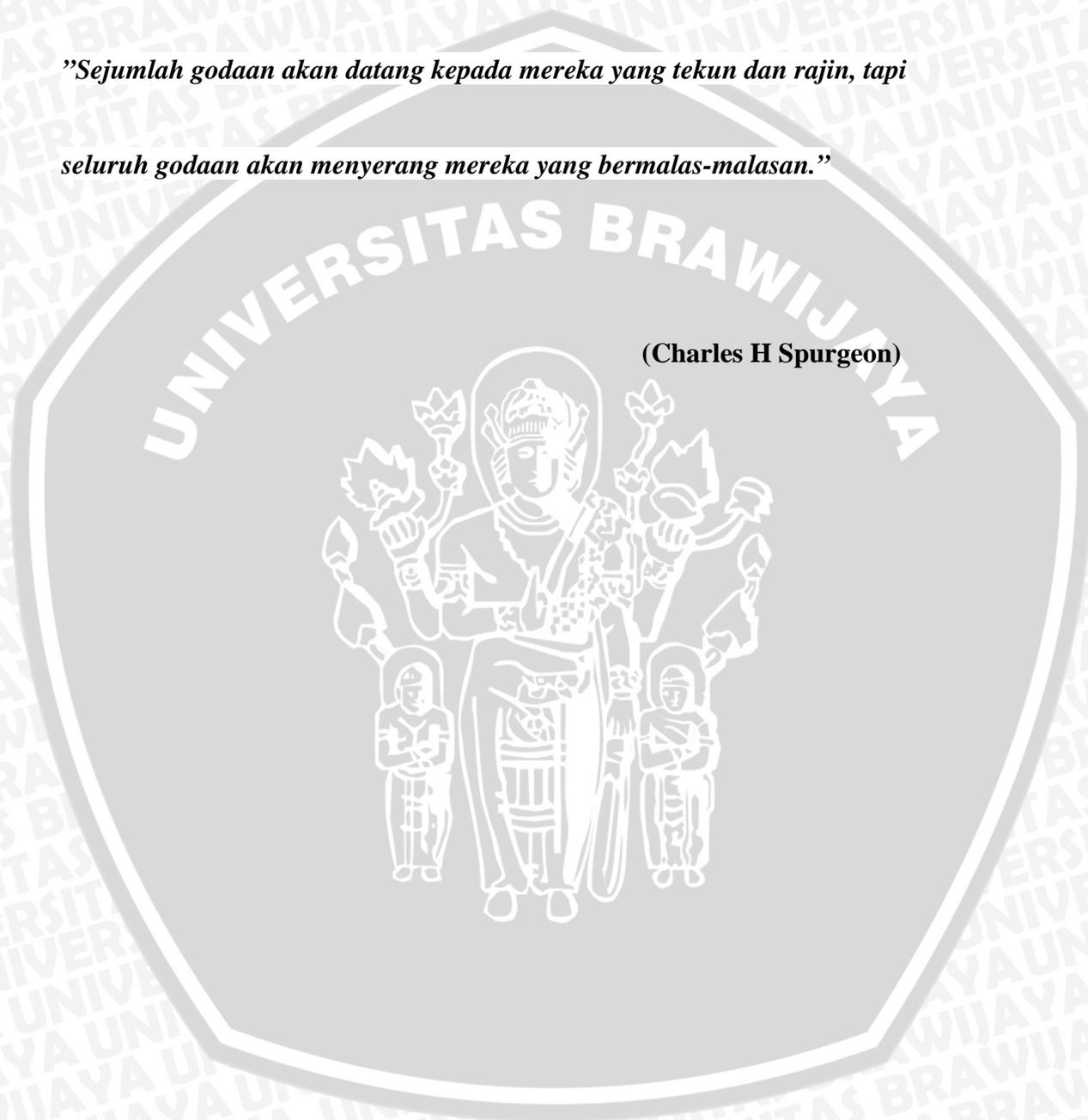
**2014**

## MOTTO

*”Sejumlah godaan akan datang kepada mereka yang tekun dan rajin, tapi*

*seluruh godaan akan menyerang mereka yang bermalas-malasan.”*

**(Charles H Spurgeon)**



# Ku persembahkan karyaku

1. **Kepada Orang tua tersayang dan tercinta yang telah mendoakan dan memberi dukungan yaitu Ayahanda Imam Subadri,SP dan Ibunda Sriati,S.Pd**
2. **Kakakku dan istrinya yaitu Moch.Sigit Andrianto, S.Sos dan Nurul Khotimah, S.Sos**
3. **Keponakan-keponakan yang lucu-lucu yaitu Alifia Sa'ida Balqis, Reyhan Fahrian Andrianto, dan Ahtar.**
4. **Kepada seseorang yang special yaitu Faizal Jayadi, SE.**
5. **Sahabat-sahabatku terimut Wiwit, Laras, Rio, Ivon, Cahya dan Mbak Mega.**
6. **Serta teman-teman seperjuangan jurusan Administrasi Publik 2010.**

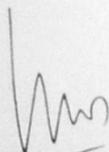
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Sinergitas *Stakeholders* dalam Inovasi Daerah (Studi Pada  
Program Seminggu di Kota Probolinggo (SEMIPRO))  
Disusun oleh : Triana Rahmawati  
NIM : 105030100111027  
Fakultas : Ilmu Administrasi  
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Malang, 6 Mei 2014

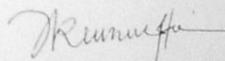
Komisi Pembimbing

Ketua



Dr. Irwan Noor, MA  
NIP. 19611024 198601 1 002

Anggota



Ike Wanusmawatie, S.Sos, M.AP  
NIP. 19770101 200502 2 001

## TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu

Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 10 Juni 2014

Jam : 10.00 WIB

Skripsi Atas Nama : Triana Rahmawati

Judul : Sinergitas *Stakeholders* dalam Inovasi Daerah (Studi Pada  
Program Seminggu di Kota Probolinggo (SEMIPRO))

Dan dinyatakan lulus

Majelis Penguji

Ketua

Anggota



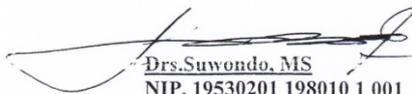
Dr. Irwan Noor, MA  
NIP. 19611024 198601 1 002

Ketua.



Ike Wanumawatie, S.Sos, M.AP  
NIP. 19770101 200502 2 001

Anggota



Drs. Suwondo, MS  
NIP. 19530201 198010 1 001



Dr. Hermawan, S.IP, M.Si  
NIP. 19720405 200312 1 001

#### PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 8 Mei 2014



Nama : Triana Rahmawati

NIM : 105030100111027

## RINGKASAN

Triana R. , 2010. **Sinergitas Stakeholders dalam Inovasi Daerah (Studi Pada Program Seminggu di Kota Probolinggo (SEMIPRO))**, Irwan Noor, Ike Wanusmawatie, 150 hal. + xiv

Inovasi sangat penting dilakukan dalam rangka untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Munculnya inovasi di daerah merupakan salah satu konsekuensi dari diterapkannya otonomi daerah. Keberhasilan pelaksanaan inovasi di daerah tidak dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah, namun membutuhkan sinergi dengan *stakeholders* lainnya. Namun permasalahan dilapangan seringkali kurangnya bahkan tidak ada peran dari *stakeholders* yang berkaitan dengan program dari pemerintah daerah tersebut. Program SEMIPRO merupakan salah satu program inovasi dari pemerintah kota Probolinggo yang dilaksanakan mulai tahun 2009. keberhasilan inovasi daerah membutuhkan tidak hanya biaya yang besar, tetapi juga membutuhkan sinergitas *stakeholders* yaitu antara pemerintah, masyarakat, dan swasta. Namun kenyataannya belum nampak keterlibatannya *stakeholders* lainnya selain pemerintah.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis sinergitas *stakeholders* dalam inovasi daerah (studi pada program Seminggu di Kota Probolinggo (SEMIPRO)). Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Analisis data yang digunakan yaitu analisis data interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program SEMIPRO telah dilaksanakan sebanyak lima kali hingga tahun 2013. *Stakeholders* yang terlibat dalam program ini yaitu masyarakat, swasta dan pemerintah. Pembiayaan yang digunakan sebagian berasal dari APBD Kota Probolinggo. Sinergi yang terjalin dalam program ini yaitu bahwasannya komunikasi masih bersifat satu arah dan tidak terjadinya koordinasi.

Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu bahwa program SEMIPRO bukan merupakan inovasi sebagaimana yang telah diklaim oleh pemerintah kota Probolinggo. Dominasi yang dilakukan oleh pemerintah sangat terlihat mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dalam program ini. Adanya dominasi oleh pemerintah mengartikan bahwa tidak adanya sinergi dengan *stakeholders* lainnya. Hal ini dikarenakan komunikasi yang bersifat satu arah dan tidak nampaknya koordinasi. Saran dalam penelitian ini yakni pemerintah harusnya mengevaluasi kembali program SEMIPRO. Disamping itu juga pemerintah mengevaluasi peran pemerintah dalam program SEMIPRO.

Kata kunci : Sinergi, *Governance*, Inovasi

## SUMMARY

Triana R., 2010. **Synergy of Stakeholders in Regional Innovation (Studies in Seminggu di Kota Probolinggo's Program (SEMIPRO))**, Irwan Noor, Ike Wanusmawatie, 150 hal. + xiv

Innovation is very important in order to realize the prosperity and welfare of the people by both central and local government. The emergence of innovation in the region is a consequence of the implementation of regional autonomy. The successful implementation of innovation in the area is not done by the local government, but requires synergy with other stakeholders. But the problems in the field often lack even no role of stakeholders relating to the program of the local government. SEMIPRO's program is one of the innovation program of Probolinggo city government implemented starting in 2009. Success of regional innovation requires not only a huge cost, but also requires synergy between the stakeholders ie government, public, and private. But the fact is not apparent involvement of stakeholders other than the government.

This study aims to describe and analyze the synergy of stakeholders in the innovation area (study week program in Probolinggo (SEMIPRO)). The method used in this study is a qualitative method. Analysis of the data used is interactive data analysis. The results showed that the program has been implemented semipro five times until 2013. Stakeholders involved in this program are public, private and government. Funding is used partly derived from Probolinggo City budget. The synergy that exists in this program is bahwasannya still be one-way communication and the absence of coordination.

The conclusion of this study is that the program is not an innovation semipro as has been claimed by the city of Probolinggo. The dominance of the government's very visible from the planning to the implementation of this program. Domination by the government means that the absence of synergy with other stakeholders. This is because communication is one-way and do not seem to coordination. Suggestion in this study that the government should re-evaluate the program semipro. Besides, the government also evaluate the role of government in SEMIPRO program.

*Keywords: Sinergy, Governance, Innovation.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Sinergitas Stakeholders dalam Inovasi Daerah (Studi pada Program Seminggu di Kota Probolinggo (SEMIPRO))”**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.S., selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Drs. Choirul Saleh., M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
3. Ibu Dr. Lely Indahmindarti, M.Si, selaku Ketua Prodi Administrasi Publik
4. Bapak Dr. Irwan Noor, M.A., selaku Ketua Komisi Pembimbing Skripsi.
5. Ibu Ike Wanusmawatie, S.Sos, M.AP, selaku Anggota Komisi Pembimbing Skripsi.
6. Bapak Drs. Suwondo, MS, selaku dosen Penguji Skripsi.
7. Bapak Dr. Hermawan, S.IP, M.Si, selaku dosen Penguji Skripsi.
8. Seluruh Dosen Pengajar Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
9. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Probolinggo.
10. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya, dan Pariwisata (DISPOBPAR) Kota Probolinggo.

- repository.ub.ac.id
11. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Kota Probolinggo.
  12. Kepala Bagian Humas dan Protokol Kota Probolinggo.
  13. Serta semua pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, Juni 2014

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>MOTTO</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iii
<b>TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>TANDA PENGESAHAN</b> .....	v
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI</b> .....	vi
<b>RINGKASAN</b> .....	vii
<b>SUMMARY</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvi
 <b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Sistematika Penulisan .....	10
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Administrasi Publik .....	12
1. Pengertian Administrasi Publik .....	12
2. <i>Governance</i> .....	18
3. <i>Good Governance</i> .....	21
B. Konsep Sinergi .....	25
1. Komunikasi .....	26
2. Koordinasi .....	27
C. Otonomi Daerah .....	28
D. Konsep Inovasi .....	34
1. Pengertian Inovasi .....	34
2. Inovasi Pemerintah Daerah .....	37
 <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	46
B. Fokus Penelitian .....	47
C. Lokasi dan Situs Penelitian .....	48

D. Jenis dan Sumber Data .....	48
E. Teknik Pengumpulan Data .....	51
F. Instrumen Penelitian .....	53
G. Analisis Data .....	54

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

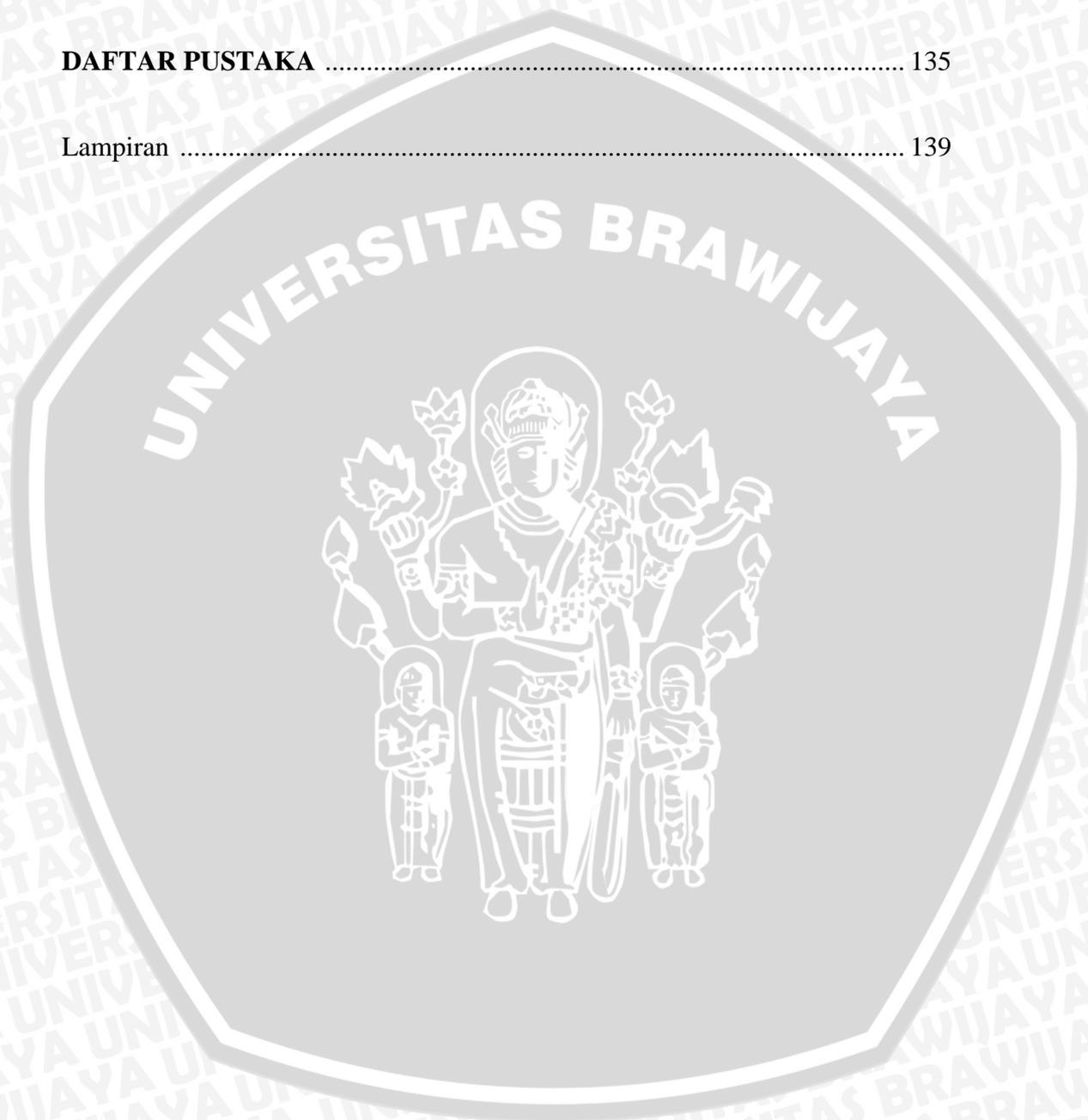
A. Penyajian Data Umum Penelitian	
1. Gambaran Umum Daerah Penelitian (Kota Probolinggo)	
a. Sejarah Singkat Kota Probolinggo .....	58
b. Kondisi Geografis Kota Probolinggo .....	59
c. Kondisi Demografis Kota Probolinggo .....	67
d. Kondisi Ekonomi Kota Probolinggo .....	70
(1) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) .....	70
(2) Struktur Perekonomian dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah .....	72
(3) Keuangan Daerah .....	73
(4) Investasi .....	74
(5) Prasarana dan Sarana Ekonomi .....	77
e. Kondisi Sosial Budaya Kota Probolinggo .....	79
B. Penyajian Data Fokus Penelitian	
1. Gambaran Program Seminggu di Kota Probolinggo (SEMIPRO) .....	80
a. Kegiatan-kegiatan dalam Program Seminggu di Kota Probolinggo (SEMIPRO) .....	80
b. Aktor yang Terlibat dalam Program Seminggu di Kota Probolinggo .....	88
c. Sumber Pembiayaan Program Seminggu di Kota Probolinggo (SEMIPRO) .....	91
2. Sinergitas <i>Stakeholders</i> dalam Program Seminggu di Kota Probolinggo (SEMIPRO) .....	94
a. Komunikasi .....	95
b. Koordinasi .....	107
C. Pembahasan Data Fokus Penelitian	
1. Gambaran Program Seminggu di Kota Probolinggo	
a. Kegiatan-kegiatan dalam Program Seminggu di Kota Probolinggo (SEMIPRO) .....	110
b. Aktor yang Terlibat dalam Program Seminggu di Kota Probolinggo .....	116
c. Sumber Pembiayaan Program Seminggu di Kota Probolinggo (SEMIPRO) .....	118
2. Sinergitas <i>Stakeholders</i> dalam Program Seminggu di Kota Probolinggo (SEMIPRO).....	122
a. Komunikasi .....	123
b. Koordinasi.....	125

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan .....	131
B. Saran .....	133

## DAFTAR PUSTAKA .....

Lampiran .....	139
----------------	-----



**DAFTAR TABEL**

<b>No. Judul</b>	<b>Hlm.</b>
1. Paradigma Administrasi Negara .....	18
2. Kecamatan dan Kelurahan di Kota Probolinggo .....	61
3. Pembagian Wilayah Administrasi Kota Probolinggo.....	65
4. Jumlah Penduduk per Kecamatan Tahun 2012 .....	68
5. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan .....	70
6. PDRB Kota Probolinggo Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2008-2011.	71
7. Struktur APBD Kota Probolinggo 2009-2013 .....	73
8. Keadaan Industri Menurut Kelompok Industri Tahun 2012 .....	75
9. Pedagang yang Memiliki SIUP menurut Klasifikasinya Tahun 2008-2012.....	76
10. Tema dan Waktu Pelaksanaan SEMIPRO tahun 2009-2013 .....	82
11. Visi, dan Misi Program Seminggu di Kota Probolinggo 2009.....	84
12. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Seminggu Di Kota Probolinggo Tahun 2010 .....	84
13. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Program Seminggu di Kota Probolinggo Tahun 2011 .....	85
14. Kegiatan-kegiatan dalam Program SEMIPRO tahun 2009-2013 .....	86
15. Lokasi Pelaksanaan SEMIPRO tahun 2009-2013 .....	87



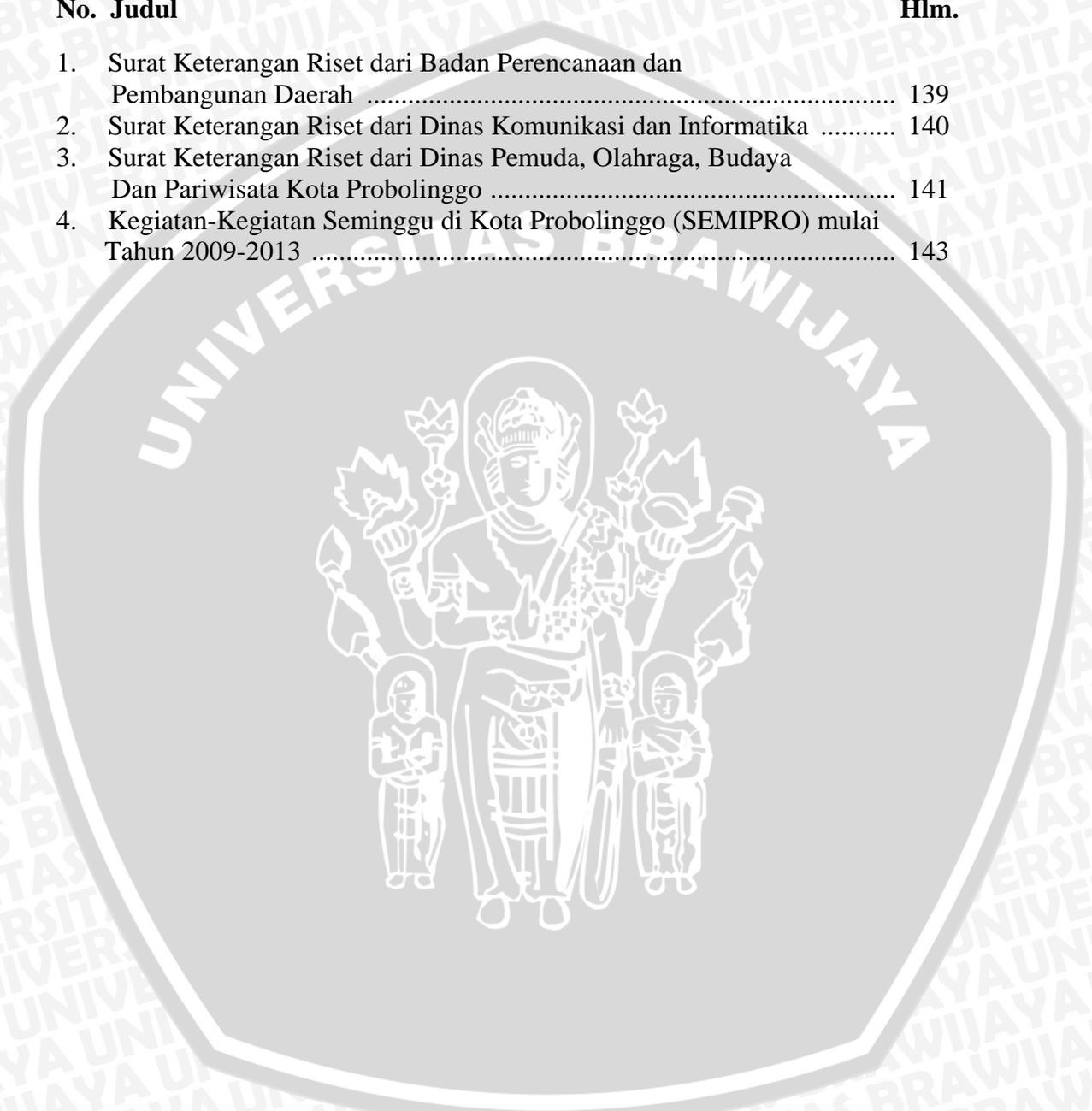
## DAFTAR GAMBAR

No. Judul	Hlm.
1. Hubungan Antar Sektor dalam <i>Governance</i> .....	20
2. Proses Inovasi.....	40
3. Sumber Inovasi dalam Pemerintahan .....	40
4. Model Analisis Penelitian Kualitatif .....	57
5. Peta Kota Probolinggo .....	60
6. Jumlah Kelurahan Tiap Kecamatan .....	62
7. Jumlah RW pada Masing-Masing Kecamatan di Kota Probolinggo .....	63
8. Jumlah RT per Kecamatan .....	64
9. Luas Wilayah Menurut Kecamatan .....	65
10. Persebaran Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2012 (%) .....	69
11. Surat Perihal Permohonan Sponsor pada SEMIPRO 2011 .....	99
12. Formulir Partisipasi .....	100
13. Permohonan Sponsor.....	101
14. Surat Perihal Bantuan Partisipasi .....	102



DAFTAR LAMPIRAN

No. Judul	Hlm.
1. Surat Keterangan Riset dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah .....	139
2. Surat Keterangan Riset dari Dinas Komunikasi dan Informatika .....	140
3. Surat Keterangan Riset dari Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya Dan Pariwisata Kota Probolinggo .....	141
4. Kegiatan-Kegiatan Seminggu di Kota Probolinggo (SEMIPRO) mulai Tahun 2009-2013 .....	143



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar belakang

Dalam rangka mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat maka “inovasi” penting untuk dilakukan sebagaimana hal tersebut dalam Noor (2013:110). Pemerintah baik pusat maupun daerah merupakan pihak yang mempunyai tugas untuk mengaplikasikan suatu ide atau prosedur baru dalam rangka menjalankan tugasnya supaya berjalan lancar sebagaimana dijelaskan menurut West and Farr (1990) bahwa,

*“Innovation is the sequence of activity by which a new element is introduced into social unit, with the intention of benefiting the unit, some part of it, or the wider society. The element need not be entirely novel or unfamiliar to members of unit, but it must involve some discernible change or challenge to the status quo”.*

Penjelasan yang diutarakan oleh West dan Farr dapat diterjemahkan yaitu urutan aktivitas dalam sebuah unit sosial yang didalamnya memasukkan elemen baru dengan tujuan memberi manfaat bagi unit bersangkutan, sebagian dari unit bersangkutan atau keuntungan bagi masyarakat lebih luas. Elemen dimaksud tidak harus baru sama sekali atau tidak diketahui sebelumnya oleh anggota-anggota unit bersangkutan, tetapi elemen tersebut harus melibatkan aspek perubahan atau mampu kondisi status quo. Dari pengertian diatas maka dapat dipahami bahwa inovasi sebagai intensi memperkenalkan dan mengaplikasi suatu ide, proses, produk, atau prosedur baru dalam organisasi untuk mendapatkan keuntungan bagi organisasi dan masyarakat luas”. Dengan adanya inovasi maka pemerintah dapat

menjalankan tugasnya dengan baik dan masyarakat dapat terlayani oleh karenanya itu merupakan keuntungan tersendiri bagi masyarakat.

Inovasi memiliki makna kebaruan (*novelty*). Sifat kebaruan ini mengandung dua aspek yaitu terciptanya nilai (*value*) yang baru dan kedua terdapat pengetahuan (*knowledge*) yang baru. Suatu produk, proses, atau metode organisasi dikatakan inovatif bila menimbulkan nilai yang baru. Arti penting pengembangan inovasi bagi organisasi sektor publik, seperti inovasi pemerintahan daerah dalam kajian ini menjadi perhatian serius dari Mulgan dan Albury (2003:2). Hal tersebut dapat disimak dalam pernyataannya seperti berikut:

*“Innovation should be a core activity of the public sector: it helps public services to improve performance and increase public value; respond to the expectations of citizens and adapt to the needs of users; increase service efficiency and minimize costs”*. Makna dari apa yang dinyatakan oleh Mulgan dan Albury di atas, bahwa inovasi merupakan suatu upaya untuk membantu meningkatkan kinerja dalam hal pelayanan publik sehingga mampu menjawab dan beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat, maka harapannya dapat meminimalkan biaya dan meningkatkan efisiensi. Oleh karenanya inovasi merupakan hal sangat penting karena dapat memudahkan pemerintah dalam melaksanakan tugasnya sebagai *“public service”*.

Mulgan dan Albury (2003) dalam Abdullah (2012) juga menyebutkan bahwasannya terdapat beberapa alasan mengapa sektor publik harus melakukan inovasi. Beberapa alasan tersebut meliputi: (1)inovasi dilakukan untuk merespon secara lebih efektif perubahan dalam kebutuhan dan ekspektasi publik yang terus meningkat; (2)untuk memasukkan unsur biaya dan untuk meningkatkan efisiensi;

(3) untuk memperbaiki penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk di bagian-bagian di masa lalunya mengalami sedikit kemajuan; (4) untuk mengkapitalisasikan penggunaan ICT secara penuh, karena hal ini telah terbukti meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pelayanan. Dari beberapa alasan diatas maka tidak ada alasan lagi bagi suatu daerah untuk menolak melakukan inovasi dan bermalas-malasan menciptakan program-program inovatif.

Inovasi memang merupakan suatu hal yang baru di Indonesia, namun ini tidak menutup kemungkinan bagi daerah untuk tidak menciptakan program-program kreatif. Abdullah (2012) dalam proposal tesisnya yang berjudul “Inovasi Pemerintahan Daerah (Studi Inovasi Penyelenggaraan Urusan Pendidikan Di Kabupaten Gowa)” menyebutkan bahwasannya pada tahun 2009 USAID melaporkan adanya beberapa program inovasi manajemen pelayanan publik dilakukan oleh beberapa pemerintahan di tingkat lokal. Program inovasi tersebut merupakan program-program yang diasistensi oleh *Local Government Support Program (LGSP)*. LGSP merupakan program bantuan teknis yang mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di Indonesia. Program ini dilaksanakan atas kerjasama BAPPENAS, DEPDAGRI, Departemen Keuangan, pemerintah daerah dan organisasi masyarakat dalam wilayah provinsi target LGSP yang mana program ini didanai oleh *United States Agency for International Development (USAID)*. Program LGSP yang dimaksud meliputi: (1) *One-Stop-Service* di Kabupaten Pinrang (Sulawesi Selatan) dan Kabupaten Tebingtinggi (Sumatera Utara); (2) *Citizen Charter* di Kabupaten Deli Serdang (Sumatera

Utara) dan Kabupaten Boyolali (Jawa Tengah); (3)*Electronic Citizen Information Service* di Kabupaten Aceh Barat (Aceh); (4)*Customer Information Management System* di Kota Madiun (Jawa Timur); dan (5)*Electronic Government Procurement* di Provinsi Jawa Barat. Kelima jenis inovasi USAID tersebut dinilai sukses dan berpredikat *good practices*, karena memenuhi beberapa hal antara lain: (1) bentuk program sudah sukses dilakukan di negara lain (*having been previously applied in other countries*); dan diadaptasi secara meluas pada pemerintahan lokal di Indonesia (*been adapted to the circumstances of local governance in Indonesia*); (2) program tersebut sudah melibatkan *multi-stakeholder, pro-customer and pro-poor orientation*; (3) inovasi *focus on low cost management solutions to overcome service bottlenecks*, dan (4) mitra konsultasi dengan *client local government agencies*

Pada tahun 2006, INDOPOV- *The World Bank* dalam proposal tesis Abdullah (2012) bahwasannya INDOPOV telah melakukan penelitian terhadap Inovasi Pelayanan Pro-Miskin: Sembilan Studi Kasus di Indonesia. Program Analisa Kemiskinan Indonesia (INDOPOV) merupakan suatu program yang dipimpin oleh Jehan Arulpragasam dan didukung oleh Bank Dunia (Jakarta) dan *Ash Institute of Democratic Governance (Harvard University)*. Penelitian ini dilakukan oleh tim yang dipimpin oleh Stefan Nachuk untuk menganalisa sebagian dari program yang dirancang mengenai akses pelayanan bagi masyarakat miskin di Indonesia. Kesembilan kasus tersebut meliputi: (1) Pembatasan Jumlah Siswa Perkelas dan Penguatan Insentif bagi Praktisi Pendidikan di Kabupaten Tanah Datar, Sumatra Barat; (2) Kupon Pelayanan Bidan

di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah; (3)Pembangunan Komunitas Belajar bagi Anak di Kabupaten Polman, Sulawesi Barat; (4)Meningkatkan Transparansi Anggaran di Kota Bandung, Jawa Barat; (5)Program Air Bersih dan Kesehatan di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur; (6)Reformasi Jaminan Kesehatan di Kabupaten Jembrana, Bali; (7)Program *Community Block Grant* di Kota Blitar, Jawa Timur; (8)Proses Perencanaan Partisipatif di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan; (9)Reformasi Pegawai Negeri di Kabupaten Boalemo, Gorontalo. Temuan penting dari penelitian yang dilakukan oleh *The World Bank* adalah inovasi di era kebijakan desentralisasi menunjukkan bahwa desentralisasi dan kepemimpinan lokal merupakan faktor kunci dalam penyediaan pelayanan publik yang inovatif. Sebagian besar dari inovasi yang dipelajari pada studi kasus, tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan perundangan nasional dan kebijakan yang mengalihkan kewenangan ke tingkat daerah.

Pemberian wewenang ke daerah atau yang biasa disebut dengan otonomi daerah berarti memberikan kesempatan bagi daerah untuk gerak leluasa namun masih dalam kerangka hukum yang berlaku. Selain itu juga menjadi salah satu pemicu munculnya inovasi di beberapa daerah. Untuk semakin merangsang inovasi di pemerintah daerah, maka pemerintah pusat mengadakan kompetisi dalam hal inovasi daerah yang diberi nama "*Innovative Government Awards (IGA)*".

"IGA merupakan penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, banyak Pemerintah Daerah yang melakukan inovasi dalam rangka memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kementerian Dalam Negeri mencermati berbagai kreativitas dan inovasi Pemerintah Daerah tersebut, sehingga diapresiasi

dan diberi penghargaan. Hal ini merupakan salah satu bentuk pembinaan yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan di dalam ketentuan Pasal 219 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemberian penghargaan pemerintah daerah inovatif ini telah dilaksanakan mulai tahun 2007. Filosofi penting dibalik penganugerahan ini adalah untuk memberikan apresiasi atau penghargaan bagi kepala daerah yang dipandang telah berhasil melakukan upaya-upaya strategik inovatif dalam kepemimpinan daerah yang bermanfaat bagi publik dan meningkatkan kemandirian daerah. Inovasi-inovasi pemerintah daerah ini merupakan upaya untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah (<http://igi.fisipol.ugm.ac.id/> diakses pada 3 Maret 2014).

Dengan demikian kompetisi yang diadakan oleh KEMENDAGRI ini akan semakin memacu dan menjadi *support eksternal* dari pemerintah daerah dalam berinovasi agar dapat memajukan dan mensejahterakan masyarakatnya sehingga akan menambah daya saing bagi daerah tersebut. Oleh karena itu, inovasi penting dilakukan pemerintah daerah agar daerah tersebut tidak tertinggal dari persaingan daerah lain. Dalam kompetisi itu yang dijadikan sebagai acuan dalam hal penilaian yakni Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008. Dengan peraturan tersebut maka pemerintah akan mendapatkan daerah-daerah yang memiliki program inovasi. Dengan adanya kompetisi ini maka daerah-daerah akan berlomba-lomba untuk menjadi “*the winner*” (pemenangnya). Terobosan yang dilakukan oleh Kementrian Dalam Negeri (KEMENDAGRI) ini merupakan suatu upaya pemerintah pusat dalam merangsang munculnya inovasi-inovasi di daerah. Keberhasilan pelaksanaan inovasi di daerah tidak dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah, namun membutuhkan koordinasi dengan *stakeholders* lainnya. Artinya perlu ada sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan paradigma *Good Governance* yang mengedepankan

keterpaduan antara pemerintah (*state*), swasta (*private*), dan masyarakat (*society*). Dengan adanya sinergi *multistakeholders* diharapkan mampu mensukseskan otonomi daerah. Namun permasalahan dilapangan seringkali kurangnya bahkan tidak ada peran dari *stakeholders* yang berkaitan dengan program dari pemerintah daerah tersebut.

Kota Probolinggo memiliki beberapa program-program inovasi, antara lain meliputi: program “cangkruan”, yang dibuat Buchori untuk berdialog secara langsung dan terbuka terkait permasalahan yang ada, dengan didampingi SKPD terkait, program komunikasi publik “Wali Kota Menjawab” yang disiarkan melalui radio lokal “Suara Kota Probolinggo”, program bernama “Lapor o Rek” yang dikemas untuk menjembantani persoalan yang dihadapi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, *Informal Meeting* merupakan forum untuk pengusaha dan pemerintah kota, Forum Jaringan Manajemen Sampah, Program “Ayo Bersih-Bersih Lingkungan” misalnya, mampu menarik minat para tukang becak untuk membersihkan saluran umum dan tempat pembuangan sampah (TPS) liar, Program lainnya yang berhasil menggaet partisipasi masyarakat adalah “*Morning on Panglima Sudirman Street*” (MPS2) yang dilaksanakan setiap dua bulan sekali di hari minggu di sepanjang Jalan Panglima Sudirman, di bidang seni pemerintah giat menggelar Seminggu di Probolinggo (SEMIPRO) yang selain bertujuan menggali potensi seni masyarakat kota, kegiatan ini juga sekaligus memberdayakan perekonomian masyarakat setempat. (sumber: <http://www.apeksi.or.id> diakses pada tanggal 9 Desember 2013).

Dari sekian banyak program inovasi tersebut, penelitian ini lebih memfokuskan pada program Seminggu di Probolinggo (SEMIPRO). Sejarah *event* SEMIPRO diawali dari sebuah ide dan gagasan untuk menciptakan daya tarik Kota Probolinggo lebih berkualitas (sumber: <http://dispobpar-kotaprobolinggo.com> diakses pada tanggal 22 September 2013). Disamping itu juga SEMIPRO awalnya ingin memosisikannya sebagai alternatif hiburan bagi masyarakat Kota Probolinggo terutama saat liburan sekolah. Program ini memiliki tujuan untuk mengembangkan potensi pariwisata dan kebudayaan asli daerah. Disisi lain juga untuk memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Probolinggo.

Program Seminggu di Kota Probolinggo (SEMIPRO) dilaksanakan mulai pada tahun 2009, hingga saat ini sudah diselenggarakan selama 5 (lima) kali. Namun masalahnya pada keuangan daerah, dimana kegiatan inovasi ini kurang memberikan kontribusi secara maksimal. Selain itu dilihat dari pelaksanaan di lapangan yang berpartisipasi cenderung di dominasi oleh Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Pedagang Kaki Lima (PKL) dan beberapa pemerintah daerah. Setiap tahun kegiatan Seminggu di Probolinggo (SEMIPRO) dikemas dengan tema yang berbeda-beda sehingga konsekuensinya semakin membutuhkan pembiayaan yang besar. Secara teoritis keberhasilan inovasi daerah membutuhkan tidak hanya biaya yang besar, tetapi juga membutuhkan sinergitas *stakeholders* yaitu antara pemerintah, masyarakat, dan swasta. Namun kenyataannya pihak swasta belum nampak keterlibatannya, padahal pihak ini dianggap pihak yang memiliki kelebihan di bidang dana dan keterampilan. Oleh karena itu peneliti

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Sinergitas *Stakeholders* dalam Inovasi Daerah (Studi pada Program Seminggu di Kota Probolinggo (SEMIPRO))”.

### **B. Rumusan Masalah**

Atas dasar latar belakang di atas, masalah yang dapat dirumuskan adalah:

Bagaimanakah sinergitas *stakeholders* dalam inovasi daerah (Studi pada program Seminggu di Kota Probolinggo (SEMIPRO))?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

Untuk mendeskripsikan dan menganalisis sinergi *stakeholders* dalam inovasi daerah (Studi pada program Seminggu di Kota Probolinggo (SEMIPRO)).

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut

#### **a. Akademis**

Dapat memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan secara umum pada konsep *governance* dan secara khusus mengenai sinergi *stakeholders* dalam inovasi daerah di Kota Probolinggo.

#### **b. Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi berbagai pihak. Bagi peneliti sendiri dan mahasiswa lainnya, diharapkan dapat dijadikan acuan

dalam pelaksanaan program inovasi daerah dalam rangka mengembangkan pariwisatanya. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah daerah Probolinggo maupun pemerintah lain.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab yang tersusun sebagai berikut:

##### **Bab I : Pendahuluan**

Pada bab ini menguraikan penjelasan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah yang menjadi dasar penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan laporan penelitian.

##### **Bab II : Tinjauan Pustaka**

Dalam bagian ini akan diuraikan penjelasan tentang materi-materi yang menjadi landasan teori yang mendukung dan berkaitan dengan tema penelitian.

##### **Bab III : Metode Penelitian**

Pada bab ini dikemukakan mengenai jenis penelitian, fokus penelitian yang digunakan, sumber data, teknik pengumpulan data, analisa penelitian, dan prosedur penelitian..

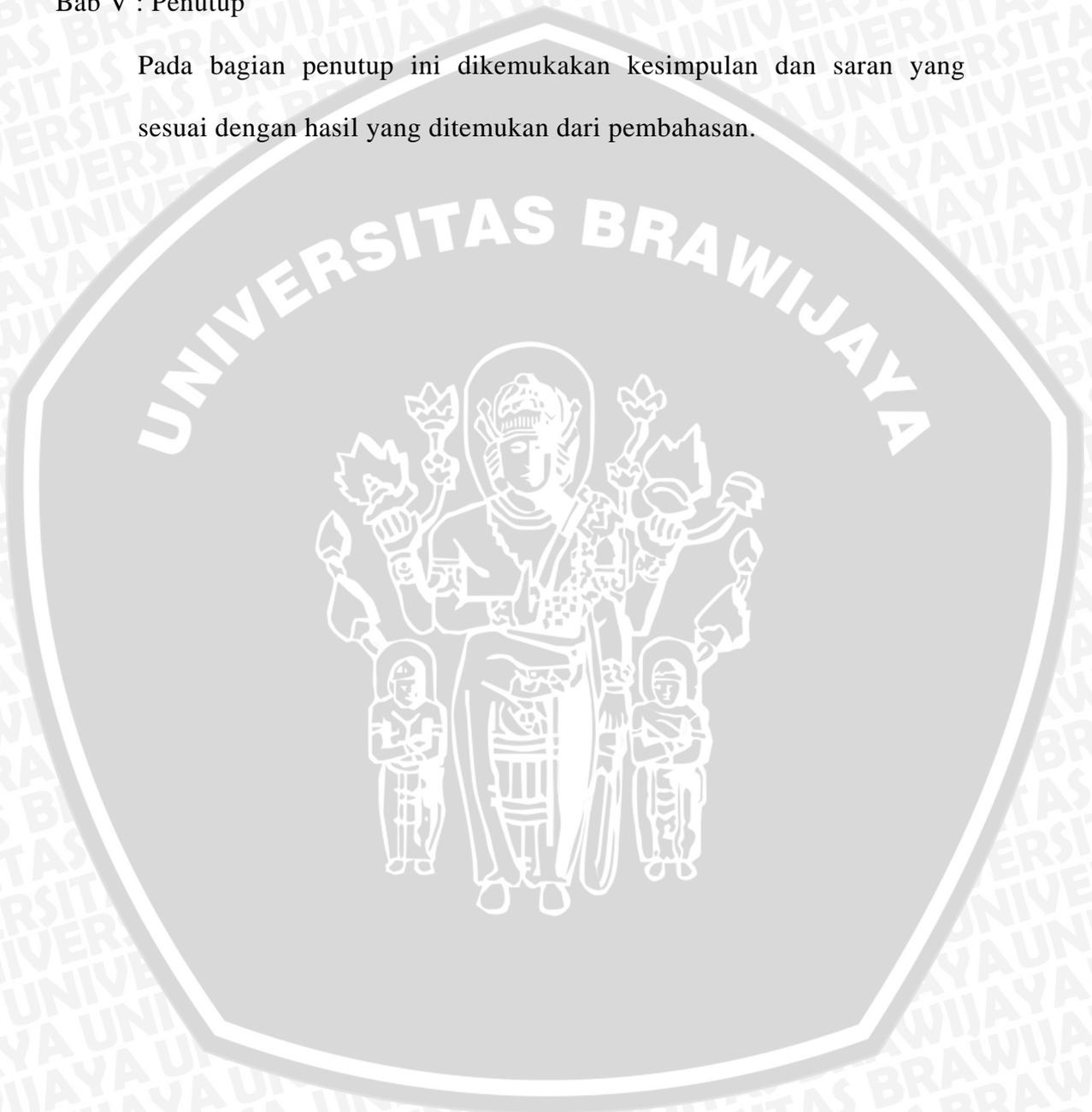
##### **Bab IV : Hasil dan Pembahasan**

Pada bab ini berisi penyajian data umum yang berisi gambaran umum Kota Probolinggo, penyajian data fokus penelitian yang terdiri dari gambaran program Seminggu di Kota Probolinggo (SEMIPRO), dan sinergitas *stakeholders* dalam inovasi daerah (studi pada program

Seminggu di Kota Probolinggo (SEMIPRO) dan yang terakhir mengenai pembahasan data fokus penelitian.

#### Bab V : Penutup

Pada bagian penutup ini dikemukakan kesimpulan dan saran yang sesuai dengan hasil yang ditemukan dari pembahasan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

Dalam tinjauan pustaka ini berisikan yakni perspektif teorikal dengan menguraikan sejumlah teori dan konsep mengenai administrasi publik, otonomi daerah, dan inovasi daerah.

#### A. Administrasi Publik

##### 1. Pengertian Administrasi Publik

Sebelum memahami mengenai administrasi publik, maka sebaiknya memahami mengenai administrasi. Administrasi berasal dari bahasa Latin, terdiri dari kata “*ad*” artinya intensif dan “*ministrare*” yang berarti “*to serve*” yang dalam bahasa Indonesia artinya melayani dan atau memenuhi (Pasolong (2007:2)). Siagian (2004:2) dalam Pasolong (2007:3), “administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan daripada keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua manusia atau lebih atas dasar rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”.

H.A Simon dan kawan-kawan dalam bukunya “*Public Administration*” yang dikutip oleh Handyaningrat (1985:2) dalam bukunya “Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen”, memberikan definisi: “Administrasi sebagai kegiatan daripada kelompok-kelompok yang mengadakan kerjasama untuk menyelesaikan tujuan bersama”. Administrasi dapat dibedakan dalam dua pengertian yaitu:

- a. Administrasi dalam arti sempit diartikan terbatas sebagai kegiatan tata usaha yang berkenaan dengan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis tentang segala sesuatu yang terjadi dalam organisasi.
- b. Administrasi dalam arti luas berhubungan dengan kegiatan kerjasama dan upaya (organisasi dan manajemen) yang bersifat sistematis, rasional, dan manusiawi yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama.

Dari pengertian diatas maka administrasi dapat dipahami sebagai kegiatan tata usaha atau merupakan proses pelaksanaan keputusan dan kerjasama yang dilakukan oleh dua atau lebih orang untuk mencapai tujuan bersama.

Setelah memahami administrasi, maka selanjutnya mengenai administrasi publik. Chandler dan Plano dalam Keban (2004:3) menjelaskan administrasi publik adalah “proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik”. Kedua pengarang diatas juga menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan seni dan ilmu yang ditujukan untuk mengatur “*public affairs*” dan melaksanakan berbagai tugas yang telah ditetapkan. Sedangkan Henry dalam Indradi (2008:12) melihat administrasi publik yakni sebagai:

“suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktek, dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Administrasi publik berusaha melembagakan praktek-praktek manajemen agar sesuai dengan

nilai-nilai efektivitas, efisiensi, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih baik”.

Felix A. Nigro dalam Pasolong (2007:21) mendefinisikan administrasi publik adalah:

- a. Suatu kerjasama kelompok dalam lingkungan pemerintahan
- b. Meliputi tiga cabang pemerintahan eksekutif, legislatif, dan serta hubungan diantara mereka.
- c. Mempunyai peranan penting dalam perumusan kebijakan pemerintah, dan karenanya merupakan sebagian dari proses politik.
- d. Sangat erat berkaitan dengan berbagai macam kelompok swasta dan perorangan dalam menyajikan pelayanan kepada masyarakat.
- e. Dalam beberapa hal berbeda pada penempatan pengertian dengan administrasi perorangan.

Administrasi publik di Indonesia dikenal dengan istilah Administrasi Negara yakni, “salah satu aspek dari kegiatan pemerintahan” (Kasim, 1993:21). Menurut Gordon dalam Kasim (1993:22), “administrasi publik adalah studi tentang seluruh proses, organisasi dan individu yang bertindak sesuai dengan peran dan jabatan resmi dalam pelaksanaan peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif, eksekutif dan peradilan”. Definisi ini menganggap administrasi publik terlibat dalam seluruh proses, organisasi, dan individu dalam pelaksanaan aturan. Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami administrasi publik merupakan proses kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal koordinasi sumberdaya dan personel publik untuk formulasi, implementasi, dan mengelola kebijakan publik serta mendorong kebijakan agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam perkembangannya administrasi publik memiliki beberapa paradigma. Paradigma menurut Kuhn (1970:23) dalam Pasolong (2007:27),

“merupakan suatu cara pandang, nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar atau cara memecahkan suatu masalah, yang dianut suatu masyarakat ilmiah pada suatu masa tertentu”. Henry membagi paradigma administrasi negara atas lima paradigma secara diakronis. Menurut Henry dalam Suprayogi (2011:10-13) paradigma dalam administrasi negara terdiri atas:

1) *Paradigm 1: The Politics-Administration Dichotomy* (1900-1926)

Paradigma ini dimulai oleh Woodrow Wilson dan Frank Goodnow untuk memisahkan antara politik dan administrasi. Wilson dan Goodnow melihat bahwa perlu adanya pemisahan antara administrasi dan politik. Pemisahan ini merupakan alasan karena administrasi di Amerika saat ini masih dipenuhi dengan sistem spoils dan sistem patronase antara dalam perekrutan para pegawai negeri sipil. Politik dideterminasikan sebagai tujuan dan kebijakan dalam pemerintahan dan administrasi bertugas untuk mencapai tujuan dan kebijakan dari politik tersebut. Sehingga tidak dapat mengaplikasikan administrasi yang netral karena kepentingan politik biasanya untuk mempertahankan kekuasaan.

Pada dikotomi ini memfokuskan kepada memposisikan pejabat administrasi yang sesuai dengan kehendak politik sehingga, para pejabat publik menjadi tidak netral dan cenderung berat kepada para elit politik untuk mempertahankan kekuasaannya. Administrasi merupakan teknik yang kompeten untuk membangun cara terbaik untuk mengadministrasi kebijakan dan segala tujuan yang dicapai oleh pejabat yang terpilih dan para pejabat ini biasanya dalam tekanan para politikus ketika memberikan satu target pada para pegawai ini. Maka paradigma ini terkenal dengan sebutan politik administrasi dikotomi antara nilai dan fakta. Lokus dalam paradigma ini ada pada birokrasi bukanlah pada legislatif ataupun yudikatif.

2) *Paradigm 2: The Principles of Administration* (1927-1937)

Pada paradigma kedua ini mulai ditemukanlah suatu konsep ilmu administrasi oleh para pakar administrasi di masa tersebut, seperti;

- a. Willoughby's dalam bukunya *Principles of Public Administration* (1927)
- b. Mary Parker Follet's dalam bukunya berjudul *Creative Experience* (1924)
- c. Henry Fayol's dalam bukunya berjudul *Industrial and General Management* (1930)
- d. James D. Mooney and Reiley's dalam bukunya *Principles of Organizations*
- e. F.W. Taylor's dalam bukunya *Principles of Scientific Management* (1911)

Bahkan dalam perkembangannya administrasi ini ditemukan juga bahwa:

- a. menolak asumsi dikotomi politik dan administrasi

- b. Timbul kesadaran baru bahwa administrasi publik bukanlah sesuatu yang memiliki nilai sangat bebas, imparial dan apolitis, melainkan sarat akan nilai administratif dibandingkan dengan politi, bahkan John Gaus (1950) menuliskan bahwa “*A theory of public administration means in our time a theory of politics also*”.

Prinsip-prinsip administrasi ini terutama yang ditawarkan oleh Willoughby's tentang prinsip-prinsip administrasi, menawarkan bahwa administrasi adalah suatu prinsip yang tidak dapat dicampur-campur dengan bentuk lain. Dalam pandangan terakhirnya Taylor's melalui terobosannya dalam bukunya *The Principles of Scientific Management* mengemukakan tentang pelaksanaan dari administrasi. Berbagai metode yang digunakan untuk memahami fungsi-fungsi manajemen ini kemudian dikemukakan oleh Gullick dan Urwick dalam fungsi manajemennya yang terkenal dengan nama *PODSCORB* (*planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting dan budgeting*) beberapa fungsi-fungsi ini kemudian yang saat ini digunakan pada beberapa fungsi manajemen modern. Pada tahun-tahun ini merupakan kritik tajam yang ditujukan pada administrasi publik karena dianggap ilmu ini terlalu *kolot* (ortodoks) sehingga lahirlah *administrative behavior* yang dikemukakan oleh Hebert Simon, dalam pembahasannya Simon menuliskan pentingnya rasionalitas itu dikembangkan pada pemahaman administratif jangan terkurung oleh suatu konsep saja. Pada perkembangan buku ini mengantarkan Hebert Simon sebagai pemegang nobel. Inilah salah satu kontribusi besar dari ilmu administrasi publik terhadap pandangannya yang luas. Tulisan Simon ini memang hampir mirip apa yang coba ditawarkan oleh Barnard, namun karena Barnard bukanlah masyarakat administrasi publik di Amerika Serikat maka, dianggap pemikiran Barnard ini telah ditolak (*has been delayed*).

### 3) *Paradigm 3: Public Administration as Political Science* (1950-1970)

Paradigma ini dihiasi oleh berbagai pandangan politik, bahkan para pakar mencoba memperbaharui definisi lokus dari administrasi publik yang disebut dengan *governmental bureaucracy*. Penulisan-penulisan ilmiah dalam administrasi publik banyak termasuk dalam kajian-kajian ilmu politik, sehingga ilmu administrasi sendiri sebagai ilmu yang sudah berjalan pada paradigma kedua lalu menjadi kritik tajam karena tidak bisa keperluan-keperluan publik. Pada masa inilah timbul dengan kajian-kajian administrasi publik yang lebih empirik namun menjurus pada konsep-konsep politik yang sangat kuat, sehingga muncullah “*PA Type*” dan “*PS Type*” kemudian muncul juga “*PSA Type*”. Pada tipe-tipe ini *PA* (*Public Administration*) dianggap sebagai *second class citizens* di ranahnya sendiri.

### 4) *Paradigm 4: Public Administration as Management* (1956-1970)

Paradigma keempat ini ilmu administrasi publik mendapatkan bantuan kembali dari adik mudanya yaitu ilmu manajemen, ini karena diketepikannya ilmu administrasi publik pada periode yang lalu. Beberapa jurnal di Amerika Serikat mulai memunculkan suatu konsep-konsep baru, seperti yang ditawarkan oleh

*Public Administration Review* yang diterbitkan oleh *American Society for Public Administration*, maupun beberapa tulisan pada *administrative quarterly* dan beberapa jurnal terkemuka lainnya. Ditemukanlah suatu konsep lama yang ditawarkan pada berbagai cendekia administrasi publik seperti konsep pengembangan organisasi/pembinaan organisasi (*organization development*), pengangkatan konsep manajemen ini sebagai salah satu paradoks dari kajian-kajian ilmu politik yang sangat empirikal, sehingga tidak dapat dicarikan benang merah konsepnya. Namun ketika paradigma ini konsep-konsep ilmu politik dan manajemen yang memiliki keunikan dan identitas yang baik semakin kehilangan arti karena mulai dikembangkanlah teori-teori organisasi dan perilaku, perencanaan dan pengambilan keputusan yang sebetulnya lebih banyak diambil oleh elitis.

Berbagai ilmu manajemen mulai ditawarkan dalam ilmu administrasi publik seperti teknik manajemen kepemimpinan, motivasi, komunikasi, MIS, penganggaran, auditing, pemasaran, dan sebagainya, yang dalam ilmu politik dan administrasi ini merupakan sesuatu hal yang sangat baru. Pemeran dalam paradigma ini dilahirkan dalam beberapa buku oleh James G. March dan Herbert Simon's dalam bukunya *Organization* (1958), March's dalam bukunya *Handbook of Organization* (1965) dan James D. Thompson's dalam bukunya *Organization in Action* (1967) memberikan pandangan bahwa secara teorikal ilmu manajemen adalah teori organisasi.

5) *Paradigm 5: Public Administration as Public Administration* (1970-sekarang)

Paradigma terakhir yang ditulis oleh Nicholas Henry (1975) dalam jurnal *Public Administration Review* ini menekankan bahwa ilmu administrasi publik sebagai ilmu administrasi publik di mana berbagai konsep masuk ke dalam ilmu ini. Diawali dengan dibukanya beberapa departemen yang memiliki program pasca dalam ilmu administrasi publik di Amerika Serikat.

Sedangkan Denhardt dan Denhardt membagi paradigma administrasi negara tersebut atas 3 paradigma yaitu, *Old Public Administration* (OPA), *New Public Management* (NPM) dan *New Public Service* (NPS).

2.1: Paradigma Administrasi Negara

Aspek	<i>OPA</i>	<i>NPM</i>	<i>NPS</i>
Dasar teoritis dan fondasi epistemologi	Teori politik	Teori ekonomi	Teori demokrasi
Konsep kepentingan publik	Kepentingan publik secara politis dijelaskan dan diekspresikan dalam aturan hukum	Kepentingan publik mewakili agregasi kepentingan individu	Kepentingan publik adalah hasil dialog berbagai nilai
Responsivitas birokrasi public	<i>Clients dan constituent</i>	<i>Customer</i>	<i>Citizen's</i>
Peran pemerintah	<i>Rowing</i>	<i>Steering</i>	<i>Serving</i>
Akuntabilitas	Hierarki administratif dengan jenjang yang tegas	Bekerja sesuai dengan kehendak pasar (keinginan pelanggan)	Multiaspek: akuntabilitas hukum, nilai-nilai, komunitas, norma politik, standar profesional
Struktur organisasi	Birokratik yang ditandai dengan otoritas <i>top-down</i>	Desentralisasi organisasi dengan kontrol utama berada pada para agen	Struktur kolaboratif dengan kepemilikan yang berbagi secara internal dan eksternal
Asumsi terhadap motivasi pegawai dan administrator	Gaji dan keuntungan, proteksi	Semangat <i>entrepreneur</i>	Pelayanan publik dengan keinginan melayani masyarakat

Sumber: Denhardt dan Denhardt (2003: 28-29) dalam Noer (tt:5).

## 2. Governance

Konsep *governance* mulai berkembang pada awal 1990-an ditandai dengan adanya cara pandang (*point of view*) yang baru terhadap peran pemerintah (*government*) dalam menjalankan sistem pemerintahan. Pandangan ini muncul karena peran pemerintah dinilai terlalu besar dan terlalu berkuasa, sehingga masyarakat tidak memiliki keleluasaan dan ruang untuk berkembang (Basuki dan Shofwan, 2006:8). Perbedaan utama dari pemerintahan (*government*) dengan tata pemerintahan (*governance*) yaitu jika pemerintah (*government*) lebih berkaitan

dengan lembaga yang mengemban fungsi memerintah dan mengemban fungsi mengelola administrasi pemerintahan, sedangkan tata pemerintahan (*governance*) lebih menggambarkan pola hubungan yang sebaik-baiknya antar elemen yang ada. Perbedaan tersebut juga diperkuat oleh Sedarmayanti (2004:2) yang menjelaskan bahwa:

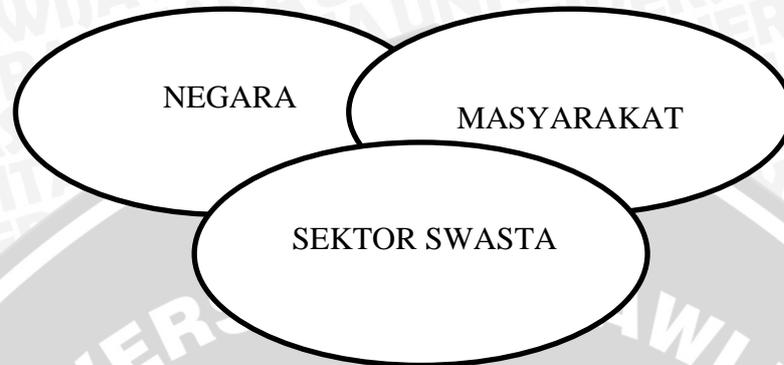
“Pemerintah (*government*) dalam bahasa Inggris diartikan sebagai: pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian kota dan sebagainya”. Sedangkan *governance* lebih “merupakan serangkaian proses interaksi-interaksi sosial politik antara pemerintahan dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut”.

*Governance* yang diterjemahkan menjadi tata pemerintahan adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik, dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat (UNDP dalam Krina, 2003:5). Menurut Hetifah (2003:2), *governance* diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintah dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Sedarmayanti, pada dasarnya unsur-unsur dalam pemerintahan (*governance stakeholders*) dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori yaitu:

- a. Negara/pemerintahan: konsepsi pemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan kenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu melibatkan pula sektor swasta dan kelembagaan masyarakat madani.
- b. Sektor swasta: pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi dalam sistem pasar, seperti: industri, pengolahan perdagangan, perbankan, dan koperasi, termasuk kegiatan sektor informal
- c. Masyarakat madani: kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada diantara atau di tengah-tengah antara pemerintah dan

perseorangan, yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik, dan ekonomi.



Gambar 2.1: Hubungan Antar Sektor dalam *Governance*  
Sumber: Sedarmayanti (2009:280)

Ketiga komponen tersebut berinteraksi secara social, politik, dan ekonomi.

Selain itu juga ketiga komponen dijelaskan masing-masing oleh Sedarmayanti sebagai berikut:

“Negara, sebagai suatu unsur *governance* didalamnya termasuk lembaga-lembaga politik dan lembaga-lembaga sektor publik. Sektor swasta meliputi perusahaan swasta yang bergerak diberbagai sektor informal lain di pasar. Ada anggapan bahwa sektor swasta adalah bagian dari masyarakat. Sektor swasta dapat dibedakan dengan masyarakat karena sektor swasta mempunyai pengaruh terhadap kewajiban sosial, politik, dan ekonomi yang dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pasar dan perusahaan itu sendiri. Sedangkan masyarakat (*society*) terdiri dari individual maupun kelompok (baik yang terorganisir maupun tidak) yang berinteraksi secara sosial, politik, dan ekonomi dengan aturan formal maupun tidak formal. *Society* meliputi lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi dan lain-lain (Sedarmayanti, 2009:280)”.

Stoker (1998) mengemukakan 5 (lima) proposisi mengenai *governance* sebagai berikut (Kurniawan, 2007):

- Governance* merujuk kepada institusi dan aktor yang tidak hanya pemerintah
- Governance* mengidentifikasi kaburnya batas-batas dan tanggung jawab dalam mengatasi isu sosial dan ekonomi

- c. *Governance* mengidentifikasi adanya ketergantungan dalam hubungan antara institusi yang terlibat dalam aksi kolektif
- d. *Governance* adalah mengenai *self-governing* yang otonom dari aktor-aktor
- e. *Governance* menyadari untuk memperbaiki sesuatu tidak perlu bergantung kepada kekuasaan pemerintah melalui perintah dan kewenangannya.

Dari penjelasan-penjelasan diatas mengenai *governance*, maka dapat dipahami bahwa *governance* merupakan tata pemerintahan yang tidak hanya pemerintah yang berperan tetapi juga ada peran dari aktor lain seperti masyarakat (*society*) dan swasta (*private sector*). Hal tersebut mengartikan bahwa dalam *governance* terdapat interaksi dalam ketiga aktor tersebut yang tidak saling mendominasi satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu pemerintah bukanlah aktor satu-satunya dalam suatu tata pemerintahan.

### 3. *Good Governance*

*Good Governance* di beberapa negara sudah meluas mulai tahun 1980, dan di Indonesia mulai dikenal secara lebih dalam tahun 1990 sebagai wacana penting yang muncul dalam berbagai pembahasan, diskusi, penelitian, dan seminar, baik di lingkungan pemerintah, dunia, usaha swasta, dan masyarakat termasuk di lingkungan para akademisi (Sedarmayanti, 2009:270). Tiga hal yang melatarbelakangi munculnya *good governance*, yaitu:

1. Muncul fenomena yang disebut Samuel P.Huntington sebagai “gelombang demokrasi global”. Gelombang ini mulanya muncul di Korea Selatan dan beberapa negara Amerika Latin.
2. Terjadinya kehancuran secara sistematis berbagai dasar institusional bagi proses pengelolaan distribusi sumber ekonomi pada sebagian besar masyarakat dunia ketiga.
3. Terakumulasinya kegagalan struktural *adjustment* program yang diprakarsai IMF dan Bank Dunia. Program ini memiliki dan menganut

asumsi dasar bahwa negara merupakan satu-satunya lembaga penghambat proses terjadinya.  
(Suryanto dalam Sedarmayanti, 2009:271-272).

Basuki dan Shofwan (2006:15) mengatakan, “*Good Governance* merupakan upaya yang merubah watak pemerintah (*government*) yang semula cenderung bekerja sendiri tanpa memperhatikan aspirasi masyarakat menjadi pemerintahan yang aspiratif”. Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menerapkan konsep ini bahwasannya masyarakat tidak lagi dipandang sebagai objek tetapi sebagai subjek. Dalam Hetifah (2003:3) dikatakan, “salah satu unsur *stakeholder* lain yang penting dan perlu disorot peran sertanya dalam mewujudkan *good governance* adalah sektor swasta”. Menurut Hetifah dalam *good governance*, sektor swasta adalah kelompok yang sama pentingnya dengan pemerintah maupun *civil society*. Dalam konsep *good governance* pemerintah bukan aktor satu-satunya yang paling menentukan dikarenakan masih ada aktor masyarakat dan swasta yang kesemuanya tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Dari beberapa penjelasan beberapa ahli diatas, dapat dipahami bahwa *good governance* merupakan suatu penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang didalamnya terdiri dari tiga aktor dan harus menjaga kesinergisan di antara interaksi tersebut. Dalam interaksi aktor-aktor tersebut tidak saling mendominasi dan berdiri sendiri. Namun terkadang untuk aktor masyarakat dan swasta memiliki porsi peran yang kurang maksimal sehingga mereka perlu didorong agar memiliki peran yang setara dengan pemerintah. Terdapat 3 (tiga) syarat yang diperlukan untuk mendorong keterlibatan dunia usaha swasta dan masyarakat sebagaimana diungkap oleh tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Pemerintahan yang

Baik, Kementerian Perencanaan Pembangunan/Bappenas (2005) dalam Sedarmayanti (2009:278), yaitu: “(1) adanya kesempatan, (2) adanya kemampuan, dan (3) adanya keamanan. Tiga syarat tersebut hanya dapat dipenuhi bilamana posisi dunia usaha swasta dan masyarakat setara”.

Dalam buku Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (SANKRI) menyatakan,

“Tata pemerintahan yang baik secara tersurat maupun tersirat tertuang dalam tata nilai penyelenggaraan pemerintah negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang meliputi prinsip-prinsip: supremasi, hukum, keadilan, kesetaraan, transparansi, partisipasi, desentralisasi, kebersamaan, professional, cepat tanggap, efektif dan efisien, berdaya saing, dan akuntabel” (LANRI (2003) dalam Sedarmayanti (2009:276)).

Arti *Good* dalam pemerintahan yang baik (*Good Governance*) mengandung pemahaman:

- a. Nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional), kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial.
- b. Aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif, efisien dalam pelaksanaan tugas untuk mencapai tujuan. Pemerintahan yang baik tergantung pada dua hal:
  - 1) Orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan bernegara; orientasi ideal negara mengacu pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara dengan komponen konstituen/pemilihnya seperti: legitimasi, apakah pemerintah dipilih dan mendapat kepercayaan rakyat; akuntabilitas (kewajiban memberi pertanggungjawaban/menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki hak/kewenangan untuk meminta keterangan/pertanggungjawaban.
  - 2) Pemerintahan berfungsi ideal: secara efektif, efisien melakukan upaya pencapaian tujuan bernegara. (Sedarmayanti (2009:274)).

UNDP yang dikutip oleh LAN dalam Sedarmayanti (2003:7-8) mengajukan karakteristik *good governance*, sebagai berikut :

a. *Participation*

Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun secara intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar keabsahan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

b. *Rule of law*

Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak azasi manusia.

c. *Transparency*

Transparansi dibangun atas dasar keabsahan arus informasi. Proses-proses, lembaga dan informasi yang secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan.

d. *Responsive*

Lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba untuk melayani setiap stakeholders.

e. *Consensus Orientation*

*Good governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur.

f. *Equity*

Semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka.

g. *Effectiveness and efficiency*

Proses-proses dan lembaga-lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin.

h. *Accountability*

Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (*civil society*) bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga *stakeholders*. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.

i. *Strategic vision*

Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif *good governance* dan pengembangan yang luas dan jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini.

Dengan demikian karakteristik yang dipaparkan UNDP ini menjadi landasan bahwasannya suatu *governance* dikatakan baik jika memenuhi karakteristik tersebut dan sebaliknya pun begitu. Tata kelola pemerintahan yang baik atau dalam bahasa Inggris dikenal *Good Governance* saat ini menjadi suatu upaya yang dilakukan tidak hanya bagi pemerintahan pusat, namun juga

pemerintah daerah. Karakteristik tersebut mengarahkan pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah untuk kemaslahatan masyarakatnya. Sementara itu, *United Nations* dalam Keban (2000:52) merumuskan indikator *good governance* yang meliputi :

- a. Kemampuan, yaitu kemampuan yang cukup untuk melaksanakan kebijakan dan fungsi-fungsi pemerintah, termasuk sistem administrasi publik efektif dan responsif;
- b. Akuntabilitas dalam kegiatan pemerintah dan transparan dalam pengambilan keputusan;
- c. Partisipasi dalam proses demokrasi, dengan memanfaatkan sumber informasi dari publik dan dari swasta;
- d. Perhatian terhadap pemerataan dan kemiskinan; dan
- e. Komitmen terhadap kebijakan ekonomi yang berorientasi kepada pasar.

## **B. Konsep Sinergi**

Dengan adanya interaksi antar *stakeholders* tersebut berarti adanya kesempatan yang sama dalam pemerintahan khususnya dalam pelaksanaan program-program pemerintah. Selain adanya interaksi juga diperlukan adanya sinergi antar ketiga pemangku kepentingan tersebut. Sinergi berarti kegiatan atau operasi gabungan (Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam <http://kbbi.web.id/sinergi> diakses 11 Juni 2014). Sedangkan Covey (1993) dalam Najiyati dan Rahmat (2011), mengartikan sinergi sebagai kombinasi atau paduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar. Jadi sinergi dapat dipahami sebagai operasi gabungan atau perpaduan unsur untuk menghasilkan output yang lebih baik. Menurut Doctoroff (1977) dalam Lubis, persyaratan utama bagi suatu sistem yang sinergi yang ideal adalah kepercayaan, komunikasi yang efektif, umpan balik yang cepat, dan kreativitas. Dalam makna lainnya, sinergi adalah suatu sumber kekuatan organisasi yang

ampuh, bahkan sering digunakan untuk memperlihatkan perbedaan antara sukses dan kegagalan. Sinergitas dapat terbangun melalui dua cara yaitu:

1. Komunikasi.

Sofyandi dan Garniwa (2007), pengertian komunikasi dapat dibedakan atas dua bagian, yaitu:

1. Pengertian komunikasi yang berorientasi pada sumber menyatakan bahwa, komunikasi adalah kegiatan dengan mana seseorang (sumber) secara sungguh-sungguh memindahkan stimuli guna mendapatkan tanggapan.
2. Pengertian komunikasi yang berorientasi pada penerima memandang bahwa, komunikasi sebagai semua kegiatan di mana seseorang (penerima) menanggapi stimulus atau rangsangan.

Definisi komunikasi yang dikemukakan Sofyandi dan Garniwa bahwasannya komunikasi merupakan kegiatan pemindahan stimuli dari sumber kepada penerima guna mendapatkan rangsangan dari penerima sehingga akan terjadi pertukaran informasi antara sumber dengan penerima. Jadi komunikasi merupakan pemindahan stimuli dari sumber kepada penerima dan kemudian penerima menanggapi stimuli tersebut sehingga akan terjadi timbal balik dan pertukaran informasi.

Myers & Myers (dalam Hasan 2005:18), “Komunikasi sebagai titik pusat kekuatan menyatukan sehingga terjadi koordinasi antara orang-orang dan karenanya mereka akan bergerak pada suatu tindakan yang terorganisir”.

Komunikasi yang terjadi memiliki fungsi sebagaimana Hasan (2005:22) mengemukakan,

“Komunikasi memiliki peran dominan dalam kehidupan manusia, sehingga fungsi komunikasi adalah: mencapai pengertian satu sama lain, membina kepercayaan, mengkoordinir tindakan, merencanakan strategi,

melakukan pembagian pekerjaan, melakukan aktivitas kelompok dan berbagi rasa”.

## 2. Koordinasi

Disamping adanya komunikasi dalam menciptakan sinergitas juga memerlukan koordinasi. Komunikasi tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya koordinasi seperti yang dinyatakan oleh Myers & Myers dalam komunikasi dibutuhkan koordinasi (dalam Hasan 2005:18). Menurut Pearce dan Robinson (dalam silalahi 2011:217), “koordinasi adalah integrasi dari kegiatan-kegiatan individual dan unit-unit ke dalam satu usaha bersama yaitu bekerja kearah tujuan bersama”. Tripathi dan Reddy dalam Moekijat (1994:39) menyebutkan ada 9 (sembilan) syarat untuk mewujudkan koordinasi yang efektif, yaitu

- 1) Hubungan langsung  
Bahwa koordinasi dapat lebih mudah dicapai melalui hubungan pribadi langsung.
- 2) Kesempatan awal  
Koordinasi dapat dicapai lebih mudah dalam tingkat-tingkat awal perencanaan dan pembuatan kebijaksanaan.
- 3) Kontinuitas  
Koordinasi merupakan suatu proses yang kontinu dan harus berlangsung pada semua waktu mulai dari tahap perencanaan.
- 4) Dinamisme  
Koordinasi harus secara terus-menerus diubah mengingat perubahan lingkungan baik intern maupun ekstern.
- 5) Tujuan yang jelas  
Tujuan yang jelas itu penting untuk memperoleh koordinasi yang efektif.
- 6) Organisasi yang sederhana  
Struktur organisasi yang sederhana memudahkan koordinasi yang efektif.
- 7) Perumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas  
Wewenang yang jelas tidak hanya mengurangi pertentangan di antara pegawai-pegawai yang berlainan, tetapi juga membantu mereka dalam pekerjaan dengan kesatuan tujuan.
- 8) Komunikasi yang efektif  
Komunikasi yang efektif merupakan salah satu persyaratan untuk koordinasi yang baik.

- 9) Kepemimpinan supervisi yang efektif  
Kepemimpinan yang efektif menjamin koordinasi kegiatan orang-orang, baik pada tingkat perencanaan maupun pada tingkat pelaksanaan.

Koordinasi merupakan salah satu faktor penunjuang munculnya sinergitas, selain itu juga akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan suatu program. Hal tersebut dapat dilihat dalam Rosalina (2011) yang menyatakan bahwasanya koordinasi menjadi salah satu penghambat dalam pelaksanaan pembangunan lingkungan hidup. Kurangnya koordinasi yang terjalin dalam pembangunan lingkungan hidup di Kota Probolinggo tersebut mempengaruhi pelaksanaan program inovatif pembangunan lingkungan hidup.

### **C. Otonomi Daerah**

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwasannya, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan landasan dan payung hukum munculnya undang-undang tentang pemerintahan daerah melalui otonomi daerah.

Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, otonomi daerah adalah “Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan

mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Dari pengertian tersebut di atas dapat diartikan bahwa otonomi daerah merupakan hak dan kewajiban menentukan aturan sendiri berdasarkan perundang-undangan, dalam mengatur pemerintahan dan kepentingan masyarakat serta memenuhi kebutuhan daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki. Sedangkan dengan pasal yang sama namun ayat berbeda yakni ayat (6), yang dimaksud dengan “Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Menurut Profesor Oppenheim dalam Ibrahim (1991:50) bahwa, “Daerah otonom adalah bagian organis daripada negara, maka daerah otonom mempunyai kehidupan sendiri yang bersifat mandiri dengan kata lain tetap terikat dengan negara kesatuan. Daerah otonom ini merupakan masyarakat hukum yaitu berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri”.

Isi pokok otonomi daerah sesungguhnya memberikan ruang gerak yang leluasa dan kemandirian kepada daerah untuk menentukan nasib daerahnya sendiri, dengan fokus tujuan menyejahterakan masyarakat berdasarkan aspirasi masyarakat dan juga didasarkan pada perundang-undangan yang berlaku. Sejarah perundangan-undangan otonomi daerah di Indonesia yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1945, Undang-Undang No. 22 Tahun 1948, Undang-Undang No. 1 Tahun 1957, Penetapan Presiden No.6 Tahun 1959, Undang-Undang No. 18 Tahun 1965,

Undang-Undang No. 5 Tahun 1974, Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Dasar hukum otonomi daerah adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 18, TAP MPR-RI No. XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah terdapat beberapa urusan pemerintahan yang dimiliki, maka artinya tidak sepenuhnya urusan pemerintah pusat yang menjadi kewenangan daerah. Terdapat beberapa kewenangan pusat meliputi: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama (dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 pasal 10 ayat (3)).

Prinsip-prinsip otonomi daerah yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yaitu :

1. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi keanekaragaman daerah
2. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas,

wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

3. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota, sedangkan otonomi daerah propinsi merupakan otonomi yang terbatas.
4. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara, sehingga tetap terjalin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antardaerah.
5. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom dan karenanya dalam daerah kabupaten dan daerah kota tidak ada lagi wilayah administrasi. Demikian pula di kawasan-kawasan khusus yang dibina oleh pemerintah atau pihak lain, seperti badan otoritas, kawasan pelabuhan, kawasan perumahan, kawasan industri, kawasan perkebunan, kawasan pertambangan, kawasan kehutanan, kawasan perkotaan baru, kawasan pariwisata dan sebagainya, berlaku ketentuan peraturan daerah otonom.

6. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik sebagai fungsi legislasi, fungsi pengawasan maupun fungsi anggaran dan penyelenggaraan pemerintah daerah.
7. Pelaksanaan tugas pembantuan tidak hanya dari pemerintah kepada daerah, tetapi juga pemerintah daerah kepada desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.

Priyatmoko dalam Mongid (2000:15) memberikan beberapa karakteristik otonomi daerah sebagai berikut:

- a. Rakyat atau masyarakat setempat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dan melakukan pengawasan atas jalannya pemerintahan.
- b. Pemerintah atau pemegang kekuasaan politik akan lebih responsif dan akomodatif terhadap tuntutan rakyat, lebih bertanggung jawab dan transparan dalam menjalankan kekuasaannya.
- c. Pemerintah rela berbagi kekuasaan dengan rakyat atau berbagai komponen dalam masyarakat.
- d. Terbuka kesempatan untuk saling belajar dan saling mengoreksi ke arah penyelenggaraan *good* dan *clean governance*.
- e. Rakyat dan aparat pemerintah harus lebih aktif dan kreatif mencari jalan untuk memajukan kehidupan bersama.
- f. Penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan serta pengelolaan sumber daya daerah hendaknya menjadi lebih efisien dan efektif.

Otonomi daerah memberikan kewenangan urusan pemerintahan kepada daerah, sebagaimana yang diungkapkan oleh Sedarmayanti (2003) menjelaskan mengenai bahwa,

“kewenangan otonomi daerah yang luas, yaitu keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan mencakup kewenangan seluruh bidang pemerintahan (kecuali beberapa bidang yang masih dipegang pusat yaitu bidang politik, hankam, peradilan, moneter dan keuangan serta agama).

Kewenangan tersebut dimiliki daerah kabupaten/kota secara utuh dan bulat mulai dari aspek perencanaan pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasinya”.

Sedarmayanti menjelaskan bahwasannya dengan adanya kewenangan otonomi daerah berarti memberikan keleluasan bagi daerah untuk mengurus daerahnya. Kewenangan yang luas memberikan keleluasan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah mencakup pada seluruh urusan bidang. Namun terdapat beberapa urusan yang tetap menjadi kewenangan pusat yang meliputi lima urusan. Penyerahan urusan dalam pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada tiga asas. Asas tersebut, terdiri dari:

- 1) Asas desentralisasi adalah adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan republik Indonesia.
- 2) Asas dekonsentrasi pelimpahan wewenang pemerinatahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau instansi vertical di wilayah tertentu.
- 3) Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. (Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 7, 8 dan 9).

#### D. Konsep Inovasi

##### 1. Pengertian Inovasi

Istilah *innovative* mulai luas dipergunakan banyak orang sejak abad ke-17, atau sekitar 100 tahun kemudian (Noor, (2013:80)). Inovasi sendiri merupakan konsep yang relative baru dalam literatur administrasi publik (*public administration*). Konsep inovasi kemudian masih belum cukup populer dan ramah dalam administrasi publik dan reformasi administrasi. Alasan belum popularnya inovasi dijelaskan oleh Caiden dalam jurnal Ilmu Administrasi karya Asropi (2008:2), sebagai berikut

“Kurang populernya konsep inovasi pada masa lalu dapat dipahami karena karakter reformasi yang lebih didasarkan pada prinsip-prinsip birokrasi Weber. Dalam konsep Weber, birokrasi memerlukan aturan yang jelas, hierarki, spesialisasi dan lingkungan yang relatif stabil. Dalam konteks ini, inovasi dipandang tidak banyak diperlukan bagi aparatur birokrasi pemerintah. Kewajiban aparatur birokrasi pemerintah adalah menjalankan aturan yang telah ditetapkan (*rule driven*). Jika kemudian inovasi dilaksanakan hanya dalam intensitas yang kecil dan dilakukan terbatas pada level pimpinan puncak. Inovasi, dalam hal ini sebagaimana reformasi administrasi didekati melalui mekanisme *top down*”.

Adapun literatur klasik yang memuat konsep inovasi dalam konteks reformasi antara lain adalah artikel “*Innovation in Bureaucratic Institutions*” tulisan Alfred Diamant yang dimuat dalam jurnal *Public Administration Review* (PAR) pada tahun 1967. Selain itu, adalah buku karya Caiden yang berjudul “*Administrative Reform*”, diterbitkan pada tahun 1969. Dalam bukunya tersebut, Caiden dalam Asropi (2008) mengatakan inovasi sebagai

“bagian dari reformasi administrasi. Beberapa tulisan tersebut menandai mulai diperhatikannya inovasi oleh para pakar administrasi publik. Hanya saja, konsep inovasi kemudian masih belum cukup populer dalam ranah

administrasi publik dan reformasi administrasi. Inovasi populer dalam bidang tersebut baru pada decade terakhir”.

Inovasi menurut Kim dalam Noor (2013:84), “*innovation is a novel idea, action, menas, or ends that can bring about change. Novelty can be subjective or objective and change can be reasonably big or disruptive and fundamental*”.

Sedangkan inovasi dalam kamus Wikipedia disebutkan bahwa inovasi sebagai “proses” dan atau “hasil” pengembangan dan atau pemanfaatan/mobilisasi pengetahuan, keterampilan (termasuk keterampilan teknologis) dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki produk (barang atau jasa), proses, dan atau sistem yang baru, yang memberikan nilai yang berarti atau secara signifikan. Pengertian inovasi sendiri sangat beragam, dan dari banyak perspektif. Menurut Rogers (2003:12), menjelaskan bahwa, “*an idea, practice, or object perceived as new by the individual* (inovasi adalah sebuah ide, praktek, atau objek yang dianggap baru oleh individu (satu unit) tertentu dan diadopsi oleh yang lainnya)”. Jadi inovasi menurut Rogers merupakan suatu ide yang dianggap baru oleh suatu unit. Selain itu inovasi juga tidak terlepas dari beberapa hal antara lain:

a. Pengetahuan baru

Sebuah inovasi hadir sebagai pengetahuan baru bagi masyarakat dalam sebuah system social tertentu. Pengetahuan ini merupakan factor penting penentu perubahan social yang terjadi dalam masyarakat.

b. Cara baru

Inovasi juga dapat berupa sebuah cara baru bagi individu atau sekelompok orang untuk memenuhi kebutuhan atau menjawab masalah tertentu. Cara baru ini merupakan pengganti cara lama yang sebelumnya berlaku.

c. Objek baru

Sebuah inovasi adalah objek baru bagi penggunaannya, baik berbentuk fisik (berwujud/*tangible*), maupun yang tidak berwujud (*intangibile*).

d. Teknologi baru

Inovasi sangat indetik dengan kemajuan teknologi. Banyak contoh inovasi yang hadir dari hasil kemajuan teknologi. Indicator kemajuan dari sebuah produk teknologi yang inovatif biasanya dapat langsung dikenali dari fitur-fitur yang melekat pada produk tersebut.

e. Penemuan baru

Hampir semua inovasi merupakan hasil penemuan baru. Sangat jarang ada kasus inovasi hadir sebagai sebuah kebetulan. Inovasi merupakan produk dari sebuah proses yang sepenuhnya bekerja dengan kesadaran dan kesengajaan. (Yogi (2007) dalam Noor (2013:87).

Inovasi mempunyai beberapa atribut sebagaimana oleh Rogers dan Shoemaker (1971) dalam Abdullah (2012):

a. *Relative Advantage* atau Keuntungan Relatif

Sebuah inovasi harus mempunyai keunggulan dan nilai lebih dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Selalu ada sebuah nilai kebaruan yang melekat dalam inovasi yang menjadi ciri yang membedakannya dengan yang lain.

b. *Compatibility* atau Kesesuaian

Inovasi juga sebaiknya mempunyai sifat kompatibel atau kesesuaian dengan inovasi yang digantinya. Hal ini dimaksudkan agar inovasi yang lama tidak serta merta dibuang begitu saja, selain karena alasan faktor biaya yang tidak sedikit, namun juga inovasi yang lama menjadi bagian dari proses transisi ke inovasi terbaru. Selain itu juga dapat memudahkan proses adaptasi dan proses pembelajaran terhadap inovasi itu secara lebih cepat.

c. *Complexity* atau Kerumitan

Dengan sifatnya yang baru, maka inovasi mempunyai tingkat kerumitan yang boleh jadi lebih tinggi dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Namun demikian, karena sebuah inovasi menawarkan cara yang lebih baru dan lebih baik, maka tingkat kerumitan ini pada umumnya tidak menjadi masalah penting.

d. *Triability* atau Kemungkinan dicoba

Inovasi hanya bisa diterima apabila telah teruji dan terbukti mempunyai keuntungan atau nilai lebih dibandingkan dengan inovasi yang lama. Sehingga sebuah produk inovasi harus melewati fase “uji publik”, dimana setiap orang atau pihak mempunyai kesempatan untuk menguji kualitas dari sebuah inovasi.

Dalam Peraturan Bersama Menteri Negara Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 03 dan No. 36 Tahun 2012 Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah bahwasannya, “inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasa, dan pengoperasian yang selanjutnya disebut kelitbangan yang bertujuan

mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi”. Pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwasannya inovasi merupakan proses atau hasil pengembangan suatu ide dan gagasan yang dianggap baru dan kemudian diadopsi oleh lainnya.

Theodore Leviit (2002) dalam Noor (2013:94) mengingatkan inovasi adalah perpaduan dari lima komponen yaitu:

- a. *Strategy and Customers*. Pemerintahan daerah harus tahu kapan, dimana, dan bagaimana inovasi itu dilakukan
- b. *Measures and Performance* yaitu harus diketahui bagaimana mengukur keberhasilan inovasi yang dilakukan
- c. *Process (and Infrastructure)*, apakah inovasi yang dilakukan bersifat sementara atau menjadi bagian yang tak terpisahkan dari organisasi.
- d. *People*, bagaimana budaya organisasi yang ada di dalam memahami inovasi tersebut.
- e. *Technology*, bagaimana pemanfaatan alat dalam berinovasi tersebut?

## 2. Inovasi Pemerintah Daerah

Inovasi yang muncul dalam pemerintah daerah merupakan suatu upaya untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Alasan pemerintahan daerah sebagai sektor publik berinovasi dikarenakan tuntutan akuntabilitas, transparansi dan berbagai prinsip *good governance* yang mendorong organisasi publik berkinerja lebih tinggi. (Yogi,2008).

Munculnya suatu inovasi dalam pemerintahan melalui beberapa skenario, sebagaimana diungkapkan oleh Watson (1999:4) dalam Abdullah (2012), antara lain:

“Pertama, munculnya tindakan inovatif karena adanya respon atau tanggapan terhadap krisis yang terjadi dalam organisasi. Kedua, menghadirkan manajer-manajer publik yang luar biasa dan memiliki

dukungan politik yang kuat di dalam organisasi. Ketiga, inovasi lahir hanya dari organisasi yang menyadari dan menangkap adanya peluang untuk melakukannya”.

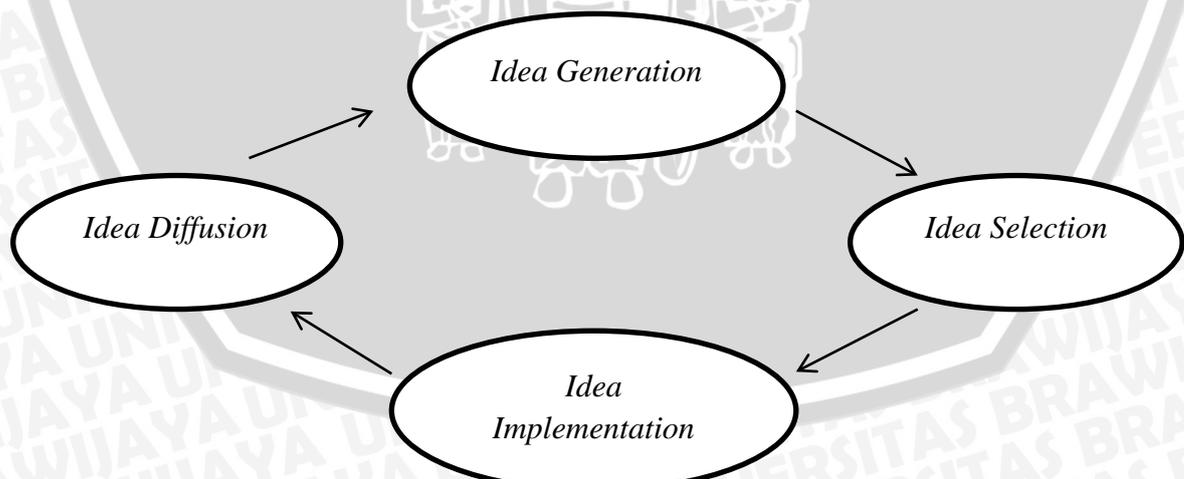
Inovasi yang dilakukan tidak hanya dilakukan oleh pusat, tetapi daerah memiliki wewenang dalam membuat dan menerapkan ide-ide baru di daerahnya. Dalam karyanya, Watson (1999:130) menerangkan bahwa pemerintahan daerah (*local government*) memiliki beberapa alasan yang khas untuk mengembangkan kemampuan inovasi. Hal ini diungkapkan oleh Watson sebagai berikut:

*“.....Local governments have a unique opportunity to be innovative for several reasons. One is that local governments are very close to the problems in their communities. ...., local officials have the chance to see and hear the problems as they develop. A second reason local governments can be innovative is that there are so many of them doing basically the same things. Each community serves as a laboratory for innovation. ...., local governments to solve problems and develop solutions in different ways. A third reason is that most elected officials on the local level run for office because they care about their communities and believe that they can improve them. The last reason is that the level of competence and expertise found among local public administrators has greatly increased over the past several decades. Local public administrators are better trained than they have ever been and are anxious to work for organizations that allow them to use their talents.”* (1999:130-131).

Inovasi diselenggarakan oleh pemerintah daerah karena mereka sangat dekat dengan masyarakatnya, sehingga dianggap mengetahui secara pasti masalah-masalah pada wilayahnya. Selain itu juga dengan diterapkannya otonomi daerah yang mana memberikan kewenangan bagi daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri rumah tangganya. Inovasi menjadi keharusan dalam upaya mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dan daerahnya. Selain itu, berkompetisi dengan daerah lain menjadi alasan pentingnya inovasi dalam pemerintah daerah. Program inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah harus

sesuai dengan karakteristik masalah dan spesifik kebutuhan masyarakat di wilayahnya. Pemerintah daerah harus mampu meningkatkan kemandiriannya melalui berbagai inovasi, karena tanpa inovasi, masyarakat akan tetap tertinggal dibandingkan kemajuan masyarakat daerah lain, serta memiliki daya saing yang rendah dalam persaingan regional dan global. Munculnya inovasi-inovasi baru dipicu oleh daya saing yang dikembangkan oleh pemerintah daerah. Proses yang demikian akan memicu kemajuan bagi organisasi ataupun pemerintah daerah akibat dari kerasnya persaingan yang ada. Eggers dan Singh (2009) dalam Noor (2013:113) mengungkapkan bahwa dalam proses inovasi sebagai sebuah siklus ada empat komponen yang berperan yaitu:

1. *Idea generations and discovery*
2. *Idea selection*
3. *Idea implementation*
4. *Idea diffusion*

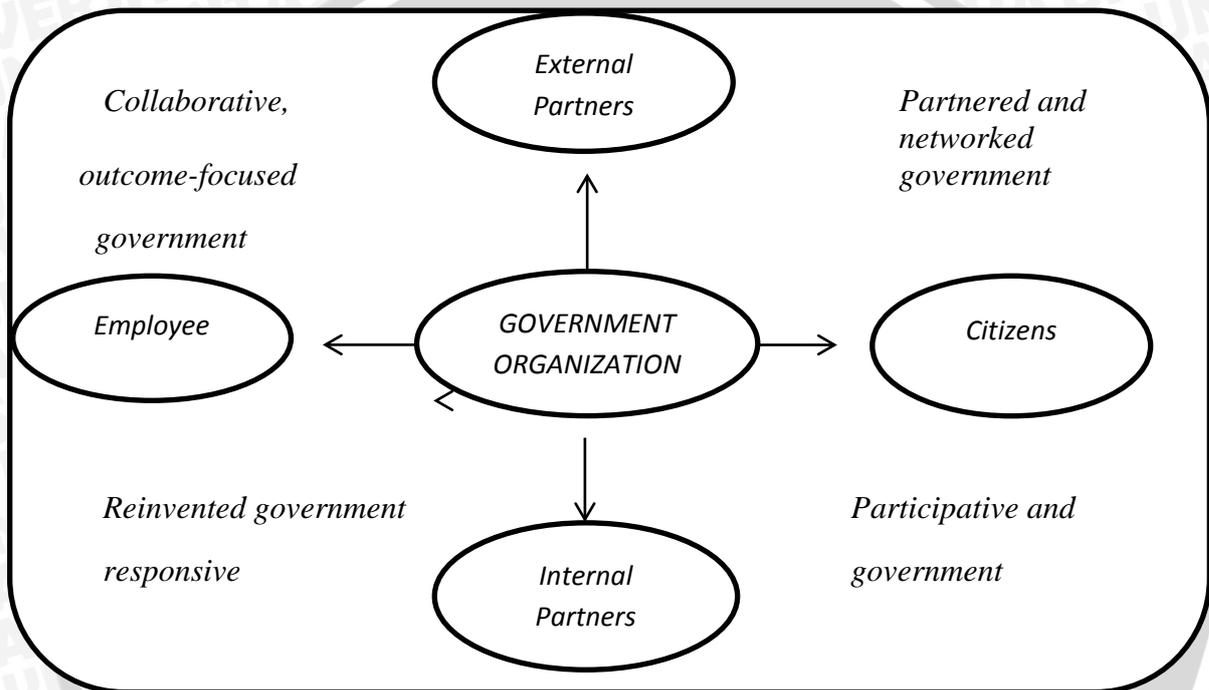


Gambar 2.2 : Proses inovasi

Sumber: Noor (20013:113)

Dalam inovasi pemerintahan ada beberapa sumber yang dapat dikembangkan untuk inovasi, yaitu:

- a. *External Partner*
- b. *Citizens*
- c. *Internal Partners*
- d. *Employee*



Gambar 2.3: Sumber Inovasi dalam Pemerintahan  
 Sumber: Noor (2013:115)

Menurut (Thomas R. Hutaaruk, 2010) inovasi berdasarkan sumbernya terbagi menjadi 3, yaitu:

1. Inovasi mandiri.

Terobosan-terobosan inovatif pemerintah daerah yang dilakukan atas dasar kebutuhan, yaitu kebutuhan untuk menyelesaikan masalah yang ada dimasyarakat. Inovasi yang dihasilkan disesuaikan dengan kondisi lingkungan yang ada dan kemampuan yang dimiliki.

2. Inovasi Instruktif.

Inovasi yang dilakukan pemerintah daerah yang bersumber pada Instruksi Presiden (Inpres), Keputusan Presiden (Keppres), Keputusan Menteri (Kepmen), dan sebagainya, yang pada prinsipnya berasal dari kebijakan pemerintah pusat. Program-program tersebut biasanya dilaksanakan berdasarkan pada Juknis atau Juklak baku yang dibuat pemerintah pusat untuk dilaksanakan di daerah-daerah.

### 3. Inovasi adoptif.

Inovasi yang bersumber pada program-program yang sebelumnya telah ada, dan dinilai cukup berhasil oleh pemerintah daerah. Untuk selanjutnya ditiru seutuhnya atau diambil sebagian dari program tersebut dengan nama program yang sama atau nama baru. Yang membedakan hanya sumber dan alokasi pembiayaan, serta penanggung jawab kegiatan.

Menurut Terziovski (2007) dalam Asropi (2008:5), kemampuan inovasi menyediakan potensi bagi munculnya inovasi yang efektif. Dengan demikian bagi birokrasi pemerintah kemampuan inovasi dari masing-masing lembaga pemerintah yang sesungguhnya sangat berperan dalam penciptaan kreatifitas dan inovasi yang berujung pada peningkatan kinerja birokrasi pemerintah. Lawson dan Samson (2001) dalam Asropi (2008:5) tentang kemampuan inovasi, kemampuan inovasi birokrasi pemerintah dimaknai sebagai kemampuan birokrasi pemerintah untuk mentransformasikan secara berkelanjutan pengetahuan dan gagasan ke dalam berbagai bentuk pelayanan, proses, dan sistem yang baru, bagi keuntungan lembaga dan *stakeholder*. Terziovski (2007) dalam Asropi (2008:6), kemampuan inovasi suatu lembaga ditentukan oleh sejumlah faktor yang disebutnya sebagai dimensi kemampuan inovasi. Birokrasi pemerintah di Indonesia, inovasi belum menjadi nilai utama dari budaya birokrasi. Namun, birokrasi pemerintah di Indonesia pada dasarnya memiliki potensi untuk melakukan berbagai inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hal pertama yang dilakukan adalah mengetahui kemampuan inovasi birokrasi pemerintah melalui pengenalan sejumlah dimensi kemampuan inovasi yang meliputi:

### 1) Visi dan strategi

Inovasi bukan hanya sebagai nilai utama dalam penyelenggaraan pemerintahan tetapi sekaligus ditempatkan sebagai tujuan. Inovasi menempati posisi sangat dihargai sebagai visi. Dengan kedudukan inovasi yang demikian ini, maka strategi didesain untuk menghasilkan inovasi, diantaranya melalui penanaman nilai-nilai kewirausahaan dalam tubuh birokrasi pemerintah daerah. Ketika kepercayaan publik dijadikan sebagai tujuan pemerintah daerah, pemerintah daerah menjadi inovatif dalam upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat tersebut.

### 2) Perekatan dasar kompetensi

Terdapat kesadaran pemerintah akan pentingnya kompetensi aparatur dalam pencapaian tujuan organisasi. Berbagai langkah strategis untuk peningkatan kompetensi aparatur harus dilakukan untuk meningkatkan kreatifitas aparatur sehingga lebih inovatif dalam pemberian pelayanan dan untuk meningkatkan penguasaan *e-government*.

### 3) Penguatan informasi dan kecerdasan organisasi

Kelancaran dan kecepatan arus informasi sangat penting untuk keberhasilan suatu kegiatan yang proses pendukungnya berada pada banyak satuan/unit kerja. Agar informasi dapat mengalir cepat dan lancar, lembaga pada umumnya melakukan transformasi proses dengan mendasarkan pada teknologi.

### 4) Orientasi pasar dan pelanggan

Pelanggan dari pelayanan yang dihasilkan oleh instansi pemerintah adalah masyarakat umum, dan tugas utama pemerintah adalah memuaskan masyarakat melalui pelayanan tersebut. Dalam hubungan pemerintah-masyarakat ini, pemenuhan “kepuasan masyarakat” adalah suatu nilai yang harus tertanam pada setiap jiwa aparatur pemerintah. Untuk kepentingan ini, pemerintah daerah wajib memiliki informasi yang memadai tentang kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah.

### 5) Manajemen gagasan dan kreativitas

Inovasi tidak akan terjadi jika tidak ada kebebasan untuk mengembangkan gagasan dan kreatifitas. Inovasi tidak hanya difasilitasi melalui pembukaan ruang bagi munculnya berbagai gagasan yang kreatif, bahkan diletakkan sebagai fokus utama dari manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia aparatur diarahkan untuk terciptanya *entrepreneurial spirit* yang mengutamakan inovasi *teamwork, trustworthiness, prosperity, dan speed*.

### 6) Sistem dan struktur organisasi

Pengembangan sistem ditujukan untuk mendukung pengembangan pelayanan baru (*new service development*). Dengan kewenangan yang dimiliki setiap instansi terkait mereka selanjutnya melakukan inovasi dalam proses manajemen melalui pembangunan sistem jejaring berbasis *e-government*. Inovasi atas struktur organisasi menekankan pada penataan kelembagaan. Lembaga-lembaga yang diyakini sebagai inti kapasitas manajemen pemerintah daerah, dibentuk sebagai badan dan bertanggungjawab langsung kepada gubernur dengan fungsi yang diarahkan untuk mensukseskan pemerintahan yang inovatif. Perubahan kelembagaan ini ternyata bukan saja berefek pada kinerja inovasi pemerintah daerah secara keseluruhan.

#### 7) Manajemen teknologi

Teknologi menjadi bagian yang tak terpisahkan dari inovasi pemerintah daerah. Pemerintah daerah membangun jaringan kerja berbasis teknologi yang mampu menghubungkan antara berbagai lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan perijinan sampai di tingkat desa.

Keberhasilan beberapa pemerintahan daerah dijadikan acuan suatu pemerintahan. Adapun pilar pemicu keunggulan bersaing atau kompetitifnya suatu daerah adalah keberhasilannya dalam melakukan inovasi. Bahkan menjadi wacana dalam mengukur keberhasilan suatu daerah. Dalam inovasi terdapat dimensi yang dikembangkan dalam sektor publik antara lain (Yogi, 2008):

1. Inovasi yang melibatkan karakteristik dan rancangan (desain) produk-produk jasa dan proses-proses produksi, termasuk pembangunan, penggunaan dan adaptasi teknologi yang relevan, yang dikembangkan dalam sektor publik.
2. Inovasi *delivery*, termasuk cara-cara baru atau cara-cara yang diubah dalam menyelesaikan masalah, memberikan layanan atau berinteraksi dengan klien untuk tujuan pemberian layanan khusus.
3. Inovasi administratif dan organisasional, termasuk cara-cara baru atau cara yang diubah dalam mengorganisasi kegiatan dalam organisasi supplier.
4. Inovasi konseptual, dalam pengertian memperkenalkan misi baru, pandangan, tujuan, strategi, dan rasional baru.
5. Inovasi interaksi sistem, cara-cara baru atau yang diubah dalam berinteraksi dengan negara lain.

Inovasi akan tumbuh dan berkembang jika dibangun dalam suatu sistem.

Maka sistem inovasi merupakan jaringan yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain guna untuk memanfaatkan dan mengembangkan sesuatu demi tercapainya sasaran tertentu. Sistem inovasi dalam wikipedia, sebagai berikut:

Nelson dan Rosenberg (1993): Sistem inovasi merupakan sehimpunan aktor yang secara bersama memainkan peran penting dalam memengaruhi kinerja inovatif (*innovative performance*). Di Indonesia memiliki dua sistem inovasi yaitu Sistem Inovasi Nasional (SINas) pada level nasional, dan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

pada level daerah. Secara prinsip, inti atau “ruh” dari konsep SIN adalah jejaring (*network*). Secara umum jejaring merupakan rangkaian kemitraan, keterkaitan/hubungan, dan pemetaan dari interaksi aktor lembaga serta variabel lainnya sehingga membentuk pola (*pattern*) jejaring tertentu. Pengertian jejaring dalam SIN dapat dipersepsikan secara sempit maupun luas. Sementara pada tataran teritori yang lebih sempit (daerah/lokal), sistem inovasi sering disebut sistem inovasi daerah (SID). Selain itu, dalam konteks khusus seperti sektor atau industri tertentu, maka pendekatan sistem inovasi sering menggunakan istilah sistem inovasi sektoral/industrial (atau sistem inovasi tekno-industri) (Dewan Riset Nasional, 2010).

Peraturan Bersama Kemenristek dan Kemendagri Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, sistem inovasi daerah yang selanjutnya disingkat SIDA adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah. Pada dasarnya program SIDA merupakan usaha untuk penumbuhkembangan pusat Unggulan. Pengembangan pusat unggulan tidak dapat dilakukan secara sepihak yang dilakukan pihak pemerintah, akademisi dan dunia usaha. Perlu adanya koordinasi dari berbagai pihak dalam rangka mensukseskan pengembangan yang dilakukan. Dasar hukum peraturan SIDA yaitu UU No. 18 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 39 Tahun 2008; PP No. 20 Tahun 2005; Perpres No. 32 Tahun 2010; Perpres No. 32 Tahun 2011; Permendagri No. 41 Tahun 2010;

Permenegristek No. 03/M/PER/VI/2010; Permendagri No. 20 Tahun 2011.

Peraturan Bersama Antara Menteri Negara Riset Dan Teknologi Dengan Menteri

Dalam Negeri No. 3 tahun 2012 Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah.



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan tahapan yang penting dari penelitian dan merupakan alat penelitian yang digunakan. Metode penelitian adalah cara yang digunakan untuk mencapai tujuan.

##### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu fenomena atau gejala (Prasetyo dan Jannah, 2005:42). Sedangkan Moch. Nazir memberikan penjelasan bahwasannya:

“Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu set pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskriptif, gambaran, atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki” (Moch Nazir, 1998:63).

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Menurut, Bogdan dan Taylor (1975) dalam Moleong (2012:4), mendefinisikan “Metodologi penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistic (utuh)”. Dengan demikian dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan, menguraikan dan menganalisis serta kemudian mengambil kesimpulan mengenai sinergi

*stakeholders* dalam inovasi daerah (studi pada program Seminggu di Kota Probolinggo).

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian merupakan cara yang ditempuh oleh peneliti dalam memfokuskan penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian kualitatif menghendaki batasan dalam penelitian atas dasar fokus, artinya maka fokus merupakan hal yang sangat penting untuk menentukan batasan penelitian yang akan dilakukan. Oleh sebab itu dalam penelitian ini yang menjadi fokus sebagai berikut:

- 1) Gambaran umum program Seminggu di Kota Probolinggo (SEMIPRO)
  - a. Kegiatan-kegiatan dalam program Seminggu di Kota Probolinggo (SEMIPRO)
  - b. Aktor yang terlibat program Seminggu di Kota Probolinggo (SEMIPRO)
  - c. Sumber pembiayaan program Seminggu di Kota Probolinggo (SEMIPRO)
- 2) Sinergitas *stakeholders* dalam inovasi daerah yaitu pada program Seminggu di Kota Probolinggo yaitu antara pemerintah, swasta, dan masyarakat yang dilihat dari 2 (dua) hal: koordinasi dan komunikasi.

### **C. Lokasi dan Situs Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian itu dilakukan, penelitian ini mengambil lokasi di wilayah Kota Probolinggo dikarenakan salah satu alasannya yaitu adanya program inovasi yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata kota Probolinggo, sedangkan situs penelitian merupakan tempat sebenarnya yang akan diteliti yaitu Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata (DISPOBPAR), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO), Bagian Humas dan Protokol, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan (BPMPP). Adapun alasan lokasi dan situs penelitian di Kota Probolinggo karena kota ini memiliki beberapa inovasi program khususnya dalam hal ini untuk sektor pariwisata melalui program Seminggu di Kota Probolinggo (SEMIPRO).

### **D. Jenis dan Sumber Data**

Menurut Lofland dan Lofland (1984) dalam Moleong (2012:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Adapun sumber data peneliti adalah:

#### **1. Sumber data primer**

Sumber data yang diperoleh langsung dilapangan dari narasumber yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti merupakan pengertian dari

sumber data primer. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah: wawancara kepada pihak yang terkait dalam pelaksanaan inovasi program daerah dalam pengembangan sektor pariwisata. Adapun sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara kepada beberapa informan adalah sebagai berikut:

- a. Ibu D (BD) selaku Kabid Dalit BAPPEDA Kota Probolinggo.
- b. Bapak K (BK) selaku Sekretaris DISPOBPAR Kota Probolinggo.
- c. Bapak AW (BAW) selaku Kabid Pariwisata DISPOBPAR Kota Probolinggo.
- d. Bapak I (BI) selaku Kasi Pengembangan Pariwisata DISPOBPAR Kota Probolinggo.
- e. Ibu EH (BEH) selaku Kasi Pemberdayaan Budaya DISPOBPAR Kota Probolinggo.
- f. Bapak A (BA) selaku Kabid Informasi DISKOMINFO Kota Probolinggo.
- g. Bapak P (BP) selaku Seniman Kota Probolinggo.
- h. Bapak AM (BAM) selaku perwakilan dari BANK BNI Kota Probolinggo.
- i. Bapak AN (BAN) selaku perwakilan dari BANK BRI Kota Probolinggo.
- j. Beberapa pengusaha dan pelaku seni.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data pelengkap atau penunjang sumber data primer, dikumpulkan dari data yang sesuai. Data ini dapat berupa dokumen, arsip serta majalah yang berhubungan dengan keperluan peneliti. Data sekunder sebagai penunjang penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Laporan Akhir (Dampak SEMIPRO Ditinjau dari Aspek Ekonomi, Sosial Budaya dan Pengembangan Kepariwisata di Kota Probolinggo (2010)). Laporan ini dikeluarkan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Probolinggo.
- b. Laporan Akhir (Kajian Evaluasi Seminggu di Kota Probolinggo (SEMIPRO) tahun 2011). Laporan ini dikeluarkan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Probolinggo.
- c. Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Koordinator Publikasi dan Dokumentasi SEMIPRO 2011. Laporan ini dikeluarkan oleh Bagian Humas dan Protokol.
- d. Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Koordinator Publikasi dan Dokumentasi SEMIPRO 2012. Laporan ini dikeluarkan oleh Bagian Humas dan Protokol
- e. Keputusan Walikota Probolinggo No.: 188.45/113/KEP/425.012/2011 tentang Panitia Penyelenggara Seminggu di Kota Probolinggo (SEMIPRO) tahun 2011.

- f. Buklet Karnaval Budaya Nusantara SEMIPRO 2013.. Buklet ini dikeluarkan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata (DISPOBPAR) Kota Probolinggo.

### E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam sebuah penelitian adalah hal yang penting dalam rangka memperoleh data yang lengkap, obyektif, dan akurat. Oleh karena itu harus diperhatikan mengenai teknik pengumpulan data yang tepat. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan cara sebagai berikut:

#### 1. Wawancara

Menurut Moleong (2012:186), “Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu”. Wawancara dilakukan secara terbuka sebagaimana yang diungkap oleh Moleong (2012:189), bahwa “Dalam penelitian kualitatif sebaiknya digunakan wawancara terbuka yang para subjeknya tahu bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui pola apa maksud dan tujuan wawancara itu”. Pembagian jenis wawancara yang dikemukakan oleh Guba dan Lincoln dalam Moleong (2012 : 188) adalah:

- a. Wawancara tertutup dan wawancara terbuka (*convert and overt interview*)

Wawancara tertutup biasanya yang diwawancarai tidak mengetahui dan tidak menyadari bahwa mereka diwawancarai. Oleh karena itu sebaiknya digunakan wawancara terbuka dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan pengumpulan data wawancara terbuka dan tertutup kepada beberapa informan penelitian.

b. Wawancara riwayat secara lisan

Jenis ini adalah wawancara terhadap orang-orang yang pernah membuat sejarah atau membuat karya ilmiah besar, sosial, pembangunan, perdamaian, dan sebagainya. Maksud wawancara ini untuk mengungkapkan riwayat hidup, pekerjaannya, dan lain-lain. Wawancara semacam ini dilakukan sedemikian rupa sehingga terwawancara berbicara terus-menerus, sedangkan pewawancara duduk mendengarkan dengan baik diselingi dengan sekali-kali mengajukan pertanyaan.

c. Wawancara terstruktur dan wawancara tak terstruktur

Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Wawancara tak terstruktur digunakan untuk menemukan informasi yang bukan atau informasi tunggal.

2. Dokumentasi

Menurut Guba dan Lincoln dalam Moleong (2012:216) menyatakan bahwa, “dokumentasi adalah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari setiap pertanyaan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian atau peristiwa atau menyajikan akunting yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik”. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik dokumentasi karena dapat digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal yang terkait dalam penelitian ini.

### 3. Observasi

Teknik observasi digunakan untuk menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa, tempat atau lokasi dan benda serta rekaman gambar (Heribertus, 2002: 64).

## F. Instrumen Penelitian

“Instrument penelitian berkaitan dengan kegiatan– kegiatan pengumpulan dan pengelolaan data, sebab instrument peneliti merupakan alat bantu pengumpulan dan pengelolaan data tentang variabel – variabel yang diteliti. Sebagai alat pengumpulan data, instrument berhubungan erat dengan teknik pengumpulan data di pengaruhi oleh jenis metode penelitian. Karena itu, secara tidak langsung instrument penelitian akan menyesuaikan dengan metode penelitiannya. Akibatnya, dikenal beberapa jenis instrument peneliti sesuai dengan jenis metode tadi. Secara garis besar, instrument terbagi atas instrument tes dan instrument nontes. Instrument yang berbentuk tes dapat berupa objektif dan tes uraian, sedangkan instrument yang tergolong nontes diantaranya dapat berupa angket, wawancara, observasi, atau studi dokumentasi (Subana dan Sudrajat, 2005:127)”.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan instrument non tes. Adapun instrumen–instrumen yang peneliti gunakan disini adalah :

1. Peneliti sendiri, artinya peneliti sebagai instrumen pengamat yang melakukan pengamatan, mencatat fenomena, objek yang terjadi, dengan dibekali peta, pengetahuan serta penguasaan terhadap permasalahan yang diteliti.
2. Pedoman wawancara (*interview guide*) yakni sebagai pedoman dalam melakukan wawancara dengan narasumber (sumber data primer) untuk memperoleh data yang sesuai dengan fokus penelitian

3. Catatan lapangan yakni merupakan instrumen sebagai media untuk mencatat informasi yang didapat selama penelitian.
4. Alat perekam digunakan untuk merekam ungkapan yang dikemukakan oleh informan. Hasil rekaman kemudian ditranskripsikan melalui pencatatan sehingga memudahkan untuk mengelompokkan data.

### G. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Menurut Bogdan & Biklen (1982) dalam Moleong (2012:248), bahwa

“Analisa data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain”.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model analisis data interaktif Miles dan Huberman, terdapat tahapan analisis data yang dilakukan dalam penelitian kualitatif yaitu pengumpulan data, penyajian data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Reduksi data

Diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Sebagaimana kita ketahui, reduksi data, berlangsung terus menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-

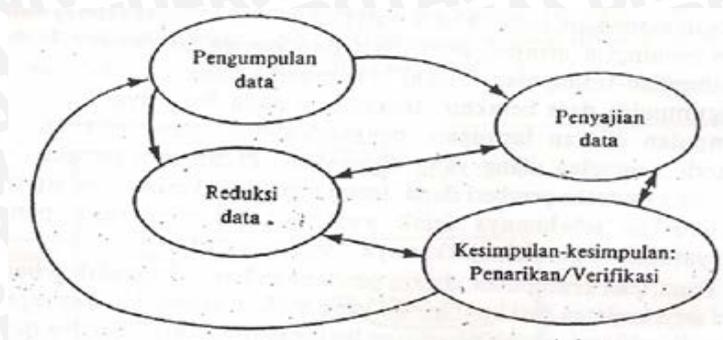
gugus, membuat partisi, menulis memo). Reduksi data/proses-transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diversifikasi. Secara sederhana, dapat dijelaskan : Dengan “reduksi data” kita tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara: melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian yang singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dsb.

## 2. Penyajian data

Alur penting yang kedua dari kegiatan analisis adalah penyajian data. Kami membatasi suatu “penyajian” sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Dan pengambilan tindakan. Penyajian yang paling sering digunakan pada data kualitatif adalah bentuk teks naratif. Penyajian yang dimaksud yaitu melalui berbagai jenis matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, dengan demikian penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar atautkah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikiaskan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

### 3. Menarik kesimpulan/verifikasi

Dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proporsi. Telah dikemukakan tiga hal utama yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai sesuatu yang jalin menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut “analisis”. Dalam pandangan ini tiga jenis kegiatan analisis dan kegiatan pengumpulan data itu sendiri merupakan proses siklus dan interaktif. Peneliti harus siap bergerak di antara empat “sumbu” kumparan itu selama pengumpulan data, selanjutnya bergerak bolak-balik di antara kegiatan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Pengkodean data, misalnya (reduksi data), menjurus kea rah gagasan-gagasan baru guna dimasukkan ke dalam suatu matriks (penyajian data). Pencatatan data mempersyaratkan reduksi data selanjutnya. Begitu matriks terisi, kesimpulan awal dapat ditarik, tetapi hal itu menggiring pada pengambilan keputusan (misalnya) untuk menambah kolom lagi pada matriks itu untuk dapat menguji kesimpulan tersebut. Dalam pengertian ini, analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang dan terus-menerus. masalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling susul menyusul.



Gambar 3.1: Model Analisis Penelitian Kualitatif

Sumber : Miles dan Huberman (1992:20)

Gambar tersebut memperlihatkan bahwa analisis data dimulai dari pengumpulan data. Hasil pengumpulan data tersebut kemudian direduksi data dengan cara memilah-milah ke dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu atau tema tertentu. Kemudian dilakukan penyajian data dalam bentuk tertentu seperti bentuk sketsa sinopsi, matriks atau bentuk-bentuk lain. Hal ini sangat diperlukan untuk memudahkan pemaparan dan penegasan kesimpulan. Setelah itu yang terakhir dilakukan penarikan kesimpulan.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Penyajian Data Umum Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Daerah Penelitian (Kota Probolinggo)

###### a. Sejarah Singkat Kota Probolinggo

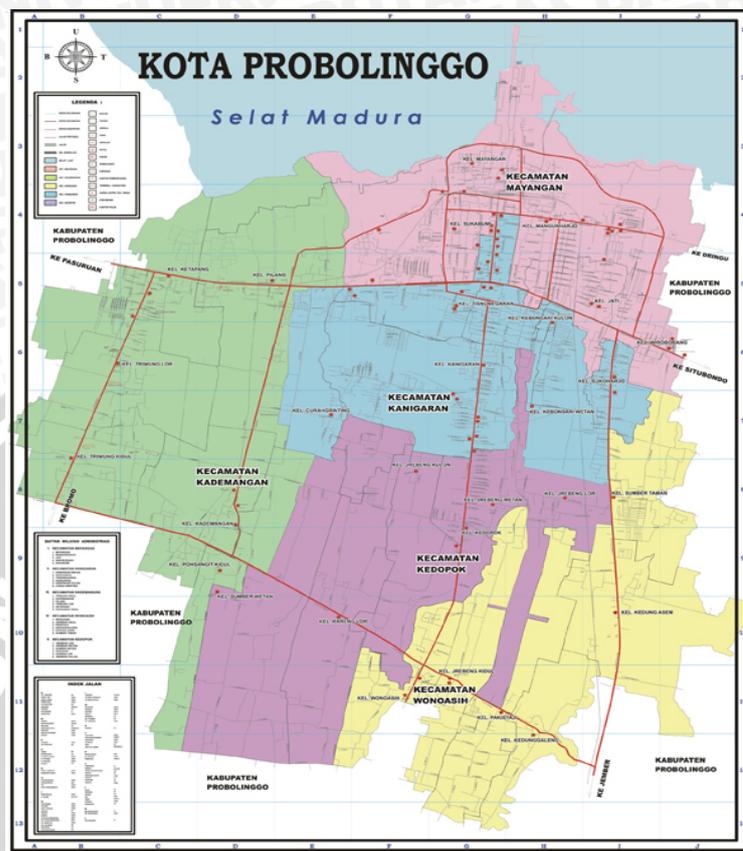
Dalam profil Kota Probolinggo 2013 menyebutkan bahwasannya secara historis nama Probolinggo teretuskan oleh seorang Tumenggung bernama Joyonegoro pada tahun 1770, yang sebelumnya ditengarai dengan nama “*banger*” (istilah Jawa yang artinya adalah bau amis), dari sungai di daerah ini yang telah teraliri bau amis darah karena dipenggalnya kepala Minakjinggo oleh Damar Wulan yang pada waktu itu berdiri sebagai penguasa daerah perbatasan Majapahit dan Blambangan pada masa perang Paregreg. Secara kolonial Kota Probolinggo resmi menjadi kota otonomi (*gemeente-raad*) sudah cukup lama, sejak zaman Hindia Belanda yakni pada 1918 (berdasarkan Ind.Staatsbl. 1918 No.322 tanggal 1 Juli 1918). Seperti diketahui, pada 1918 telah terdapat *gemeente-raad* (daerah otonomi kota) di pulau Jawa sebanyak 19 kota (termasuk Probolinggo). Pembentukan daerah otonomi kota ini merupakan realisasi dari *Desentrasatie-wetgeving 1903 (art. 68a, 68b, dan 68c dari Regeerings Reglement)*. Untuk dapat ditetapkan menjadi kota *Gemeente*, dibutuhkan sejumlah persyaratan sesuai dasar kemampuan dan kepentingan kota tersebut. Predikat penetapan Probolinggo sebagai kota desentralisasi atau *gementee*, terutama alasan dan pertimbangan lokasinya yang strategis. Kota ini sejak lama telah diramaikan sejumlah pabrik

gula, areal perkebunan tembakau untuk konsumsi ekspor maupun konsumsi internal. Di samping itu, Kota Probolinggo memiliki sebuah pelabuhan berkapasitas semi-internasional, yang mampu menampung dan mengekspor hasil-hasil dari sejumlah tersebut.

#### b. Kondisi Geografis Kota Probolinggo

Kota Probolinggo adalah kota di Provinsi Jawa Timur yang berada di pantai utara pulau Jawa terletak antara  $7^{\circ} 43' 41''$  –  $7^{\circ} 49' 04''$  Lintang Selatan (LS) dan  $113^{\circ} 10'$  –  $113^{\circ} 15'$  Bujur Timur (BT) dengan ketinggian daerah +/- 4 m dari permukaan laut. Kota Probolinggo memiliki letak yang strategis karena merupakan titik persimpangan jalan menuju Kota Surabaya, Kabupaten Jember, dan Kabupaten Banyuwangi. Disamping itu, Kota Probolinggo dilalui oleh jalan negara yang menghubungkan pulau Jawa dengan pulau Bali. Adapun batas wilayah administrasi Kota Probolinggo meliputi dan dapat dilihat dalam peta Kota Probolinggo seperti dibawah ini:

- Sebelah Utara : Selat Madura
- Sebelah Timur : Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo
- Sebelah Selatan : Kecamatan Leces, Wonomerto, dan Sumberasih Kabupaten Probolinggo
- Sebelah Barat : Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo



Gambar 4.1: Peta Kota Probolinggo

Sumber: <http://probolinggokota.go.id/> (diakses 2 Maret 2014)

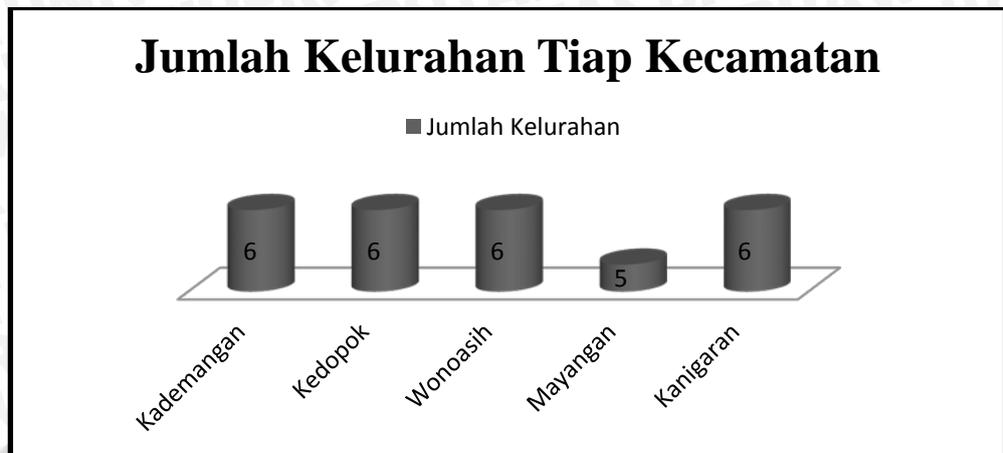
Dalam buku putih sanitasi Kota Probolinggo tahun 2010 menyebutkan bahwasannya Kota Probolinggo terdiri dari 1 (satu) kecamatan kota yang mencakup 11 desa/kelurahan. Namun sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 tahun 1982, Kota Probolinggo dimekarkan menjadi 3 (tiga) kecamatan yang membawahi 29 (dua puluh sembilan) kelurahan. Kondisi saat ini berdasarkan Peraturan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2006 tentang penataan dan Pengembangan Kelembagaan Kecamatan, wilayah administratif pemerintahan Kota Probolinggo terdiri dari 5 Kecamatan, yaitu Kademangan, Mayangan, Kanigaran, Kedopok dan Wonoasih. Kelima kecamatan

tersebut masing-masing membawahi beberapa kelurahan sebagaimana pembagiannya terdapat dalam RPJMD Kota Probolinggo 2010-2014 yang dapat dilihat dari tabel yang disajikan di bawah ini:

Tabel 4.1 : Kecamatan dan Kelurahan di Kota Probolinggo

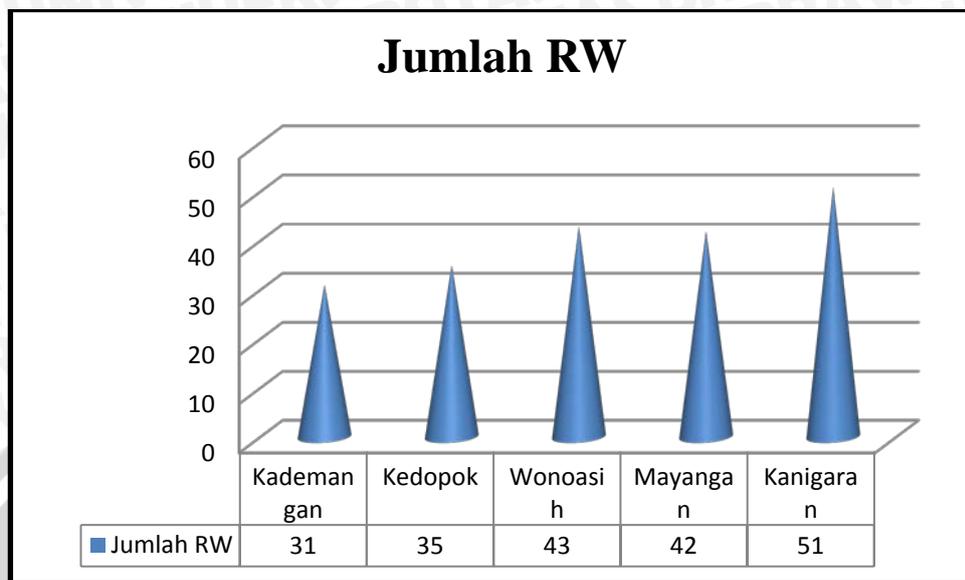
NO.	KECAMATAN	KELURAHAN
1.	Kecamatan Kademangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kelurahan Triwung Kidul</li> <li>b. Kelurahan Kademangan</li> <li>c. Kelurahan Pohsangit Kidul</li> <li>d. Kelurahan Pilang</li> <li>e. Kelurahan Triwung Lor</li> <li>f. Kelurahan Ketapang</li> </ul>
2.	Kecamatan Mayangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kelurahan Mayangan</li> <li>b. Kelurahan Jati</li> <li>c. Kelurahan Wiroborang</li> <li>d. Kelurahan Sukabumi</li> <li>e. Mangunharjo</li> </ul>
3.	Kecamatan Kanigaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kelurahan Kebonsari Wetan</li> <li>b. Kelurahan Sukoharjo</li> <li>c. Kelurahan Tisnonegaran</li> <li>d. Kelurahan Kanigaran</li> <li>e. Kelurahan Kebonsari Kulon</li> <li>f. Kelurahan Curahgrinting</li> </ul>
4.	Kecamatan Kedopok	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kelurahan Jrebeng Lor</li> <li>b. Kelurahan Jrebeng Wetan</li> <li>c. Kelurahan Kedopok</li> <li>d. Kelurahan Sumberwetan</li> <li>e. Kelurahan Kareng Lor</li> <li>f. Kelurahan Jrebeng Kulon</li> </ul>
5.	Kecamatan Wonoasih	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kelurahan Wonoasih</li> <li>b. Kelurahan Jrebeng Kidul</li> <li>c. Kelurahan Pakistaji</li> <li>d. Kelurahan Kedunggaleng</li> <li>e. Kelurahan Kedungasem</li> <li>f. Kelurahan Sumbertaman</li> </ul>

Sumber: RPJMD Kota Probolinggo 2010-2014 melalui <http://bappeda.probolinggokota.go.id/> pada tanggal 26 Juni 2013



Gambar 4.2: Jumlah Kelurahan Tiap Kecamatan  
Sumber: (diolah peneliti)

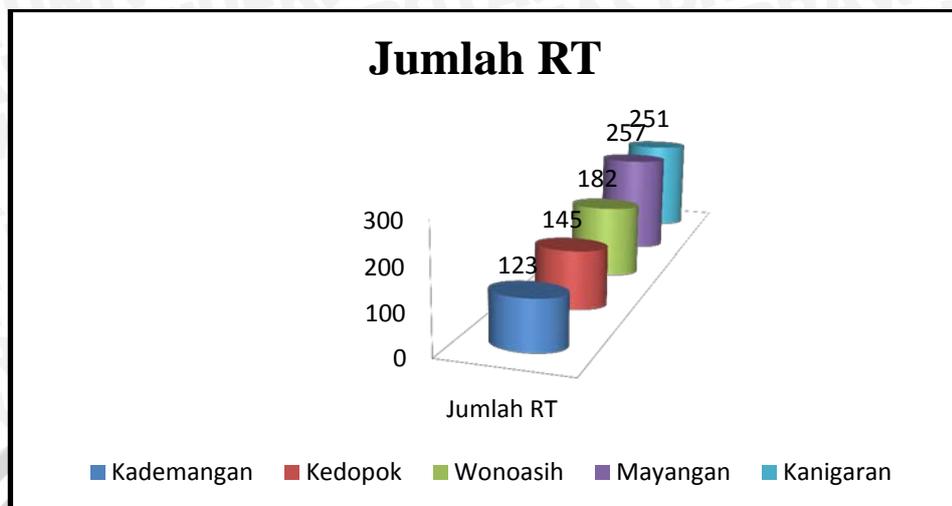
Berdasarkan pada penyajian data dalam bentuk tabel diatas mengenai kelurahan-kelurahan yang terdapat pada masing-masing kecamatan menunjukkan bahwasannya masing-masing kecamatan memiliki jumlah kelurahan yang berbeda. Dengan demikian peneliti menyajikan data jumlah kelurahan dalam bentuk diagram seperti pada gambar 4.2. Dalam diagram tersebut dapat dipahami bahwasannya lima kecamatan yang ada di Kota Probolinggo tersebut membawahi 29 kelurahan. Rata-rata setiap kecamatan membawahi jumlah kelurahan yang sama, namun terdapat satu kecamatan yang membawahi kelurahan lebih sedikit yaitu kecamatan Mayangan.



Gambar 4.3: Jumlah RW pada Masing-Masing Kecamatan di Kota Probolinggo

Sumber: (diolah peneliti)

Data geografis selanjutnya yaitu mengenai jumlah Rukun Warga (RW) yang ada pada masing-masing kecamatan di Kota Probolinggo. Berdasarkan dari BPS Kota Probolinggo menyebutkan bahwa Rukun Warga (RW) di Kota Probolinggo berjumlah 202 RW yang tersebar pada lima kecamatan tersebut. Masing-masing kecamatan memiliki jumlah yang berbeda-beda. Kecamatan yang memiliki jumlah RW terbanyak yang memiliki peringkat pertama yaitu pada kecamatan Kanigaran yang memiliki 51 RW. Selain itu kecamatan yang memiliki jumlah RW tersedikit peringkat kelima yaitu kecamatan Kademangan yang memiliki 31 RW. Peringkat kedua ditempati oleh kecamatan Wonoasih, peringkat ketiga didapatkan oleh kecamatan Mayangan, dan peringkat keempat oleh kecamatan Kedopok. Jika dikaitkan dengan pembagian jumlah kelurahan, maka jumlah kelurahan tersedikit ternyata memiliki jumlah RW yang cukup banyak yaitu pada posisi ketiga.



Gambar 4.4 : Jumlah RT per Kecamatan  
Sumber: BPS Kota Probolinggo (diolah peneliti)

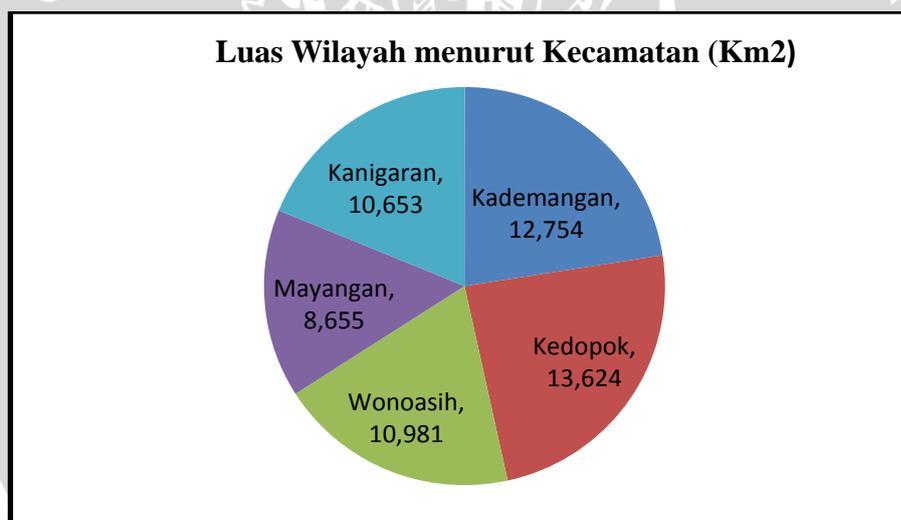
Pembagian wilayah administrasi selanjutnya yaitu mengenai jumlah Rukun Tetangga (RT) pada masing-masing kecamatan sebagaimana disajikan dalam bentuk diagram gambar 4.4. Dalam diagram gambar tersebut peneliti dapat memahami bahwasannya jumlah Rukun Tetangga berbeda-beda untuk tiap kecamatan. Jumlah kecamatan yang ada di Kota Probolinggo yaitu sekitar 952 RT. Kecamatan Mayangan memiliki jumlah RT terbanyak yang menempati peringkat pertama yaitu 257 RT. Peringkat dengan jumlah RT tersedikit dipegang oleh kecamatan Kademangan. Peringkat kedua diperoleh kecamatan Kanigaran, selanjutnya kecamatan Wonoasih dan peringkat keempat dipegang oleh kecamatan Kedopok

Kota Probolinggo memiliki luas wilayah sekitar 56,667 km<sup>2</sup>. Wilayah itu dibagi dalam beberapa kawasan kecamatan yang memiliki luas wilayah berbeda-beda. Masing-masing kecamatan memiliki jumlah kelurahan, RW, dan RT yang berbeda-beda pula, sebagaimana disajikan dalam tabel dan gambar berikut ini:

Tabel 4.2: Pembagian Wilayah Administrasi Kota Probolinggo

Nama Kecamatan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Kelurahan	Jumlah RW	Jumlah RT
Kademangan	12,754	6	31	123
Kedopak	13,624	6	35	145
Wonoasih	10,981	6	43	182
Mayangan	8,655	5	42	257
Kanigaran	10,653	6	51	251
Jumlah Total	56,667	29	202	952

Sumber: BPS Kota Probolinggo



Gambar 4.5 : Luas Wilayah Menurut Kecamatan

Sumber: BPS Kota Probolinggo (diolah peneliti)

Data yang disajikan oleh baik dalam bentuk data tabel maupun diagram gambar menunjukkan pembagian luas wilayah Kota Probolinggo ke dalam lima kecamatan yang dimiliki. Dari data diagram gambar 4.5 wilayah kecamatan yang paling luas yaitu terletak pada kecamatan Kedopak yang memiliki luas 13,624

Km<sup>2</sup>, sedangkan untuk wilayah kecamatan yang memiliki luas wilayah paling kecil kecamatan Mayangan 8,655 Km<sup>2</sup>. Dengan demikian dari data yang diperoleh mengenai pembagian kecamatan, RW, dan RT serta pembagian luas wilayah kecamatan dapat dipahami bahwasannya wilayah kecamatan yang paling luas tidaklah memiliki jumlah RW dan RT yang paling banyak. Luas wilayah kecamatan yang paling kecil di Kota Probolinggo ternyata memiliki jumlah RT terbanyak, jumlah RW cukup banyak dan jumlah kelurahan paling sedikit yaitu kecamatan Mayangan. Hal tersebut cukup menggambarkan bahwasannya wilayah yang padat penduduk berada di kecamatan Mayangan.

Luas wilayah yang dimiliki Kota Probolinggo 5.666,70 Ha, terdiri dari 1.967,70 Ha (34,72%) tanah sawah, dan 3.669 Ha (65,28%) lahan bukan sawah. Lahan bukan sawah terbagi atas 3.595 Ha (97,19%) lahan kering dan 104 Ha (2,81%) lahan lainnya (tambak). Lahan kering terdiri dari 2.178,65 Ha (60,60%) pekarangan, 761,73 Ha (21,18%) tegal/kebun dan 654,98 Ha (18,22%) lahan kering lainnya. Berubahnya fungsi lahan sawah dan lahan kering (tegal/kebun dan lahan kering lainnya) berpengaruh secara signifikan pada bertambahnya luas lahan kering pekarangan sebesar kurang lebih 546,45 Ha dari 2.172,20 Ha menjadi 2.718,65 Ha atau secara persentase bertambah sebesar 25,16%. Lahan pekarangan bisa berupa bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, seperti bangunan kantor/usaha. Berubahnya peran atau fungsi lahan sawah menjadi lahan bukan sawah akan mengurangi peranan dari sektor pertanian tanaman bahan makanan di Kota Probolinggo. Aliran sungai yang ada di kota Probolinggo untuk mengairi lahan sawah dan kegunaan lainnya terdapat enam

aliran, yaitu: Kali Kedunggaleng (3,10 km), Kali Umbul (5,14 km), Kali Bangger (2,87 km), Kali Legundi (5,44 km), Kali Kasbah (2,04 km), dan Kali Pancur (4,24 km). (Sumber data geografis dari BPS Kota Probolinggo tahun 2007).

Dari segi iklim Kota Probolinggo mempunyai perubahan iklim 2 jenis tiap tahunnya yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Musim penghujan berada pada bulan Desember sampai dengan Maret karena arus angin yang banyak mengandung uap air berhembus dari Asia dan Samudra Pasifik, sedangkan musim kemarau berada bulan Juni hingga bulan September setiap tahunnya karena arus angin bertiup dari Australia dan tidak mengandung uap air. Rata-rata jumlah curah hujan perhari pada tahun 2012 tercatat 875 mm dengan hari hujan sebanyak 53 hari, lebih rendah dengan dibandingkan tahun 2011 sebesar 1.292 mm dengan 48 hari hujan. Musim kering yang terjadi pada bulan Juli sampai dengan Oktober di Kota Probolinggo berpengaruh terjadinya angin kering yang bertiup cukup kencang dari arah tenggara ke barat laut, angin ini populer dengan sebutan Angin Gending.

### c. Kondisi Demografis Kota Probolinggo

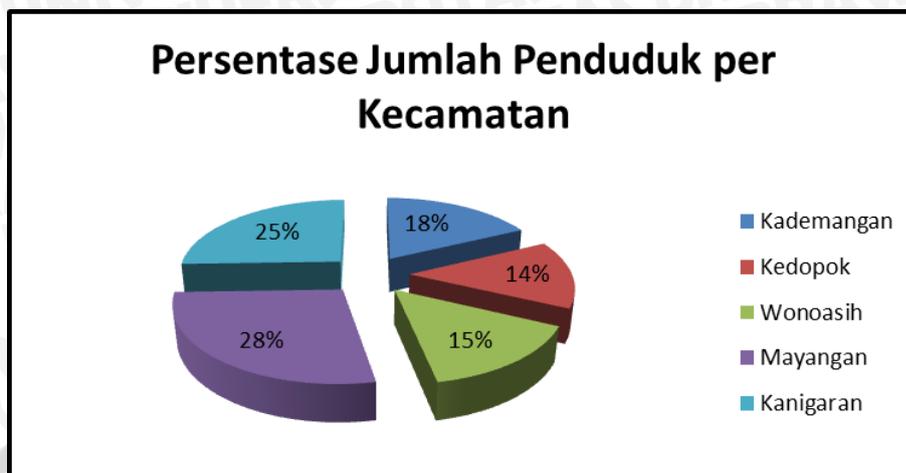
Pertambahan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan “per waktu unit” untuk pengukuran. Jumlah penduduk di Kota Probolinggo selama ini menunjukkan peningkatan, diketahui jumlah penduduk pada tahun 2010 sebanyak 217.349 jiwa, sedangkan pada tahun 2011 sebanyak 218.061 jiwa sehingga Laju Pertumbuhan Jumlah Penduduk (LPP) Kota Probolinggo mencapai 0,33%. Pertumbuhan penduduk kini selain dikarenakan

adanya fertilitas yang cukup tinggi (pertumbuhan penduduk alami), juga disebabkan adanya pertumbuhan penduduk migrasi, dimana terdapat migrasi masuk yang lebih besar daripada migrasi keluar (migrasi neto positif) atau dengan kata lain penduduk yang datang lebih banyak dibandingkan dengan penduduk yang keluar Kota Probolinggo. Jumlah penduduk pada tahun 2012 sebanyak 219.145 jiwa mendiami wilayah seluas 5.666,7 km<sup>2</sup> sehingga rata-rata kepadatan penduduk pada tahun 2012 adalah 3.867 jiwa per km<sup>2</sup> dan Laju Pertumbuhan penduduk (LPP) Kota Probolinggo pada tahun 2012 mencapai 0,50%. Adapun rincian jumlah penduduk dan kepadatan penduduk Kota Probolinggo disajikan dalam bentuk tabel dan gambar diagram sebagai berikut:

Tabel 4.3: Jumlah Penduduk per Kecamatan Tahun 2012

Nama Kecamatan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (Orang/Km <sup>2</sup> )
Kademangan	12,754	38.998	3.058
Kedopok	13,624	31.273	2.295
Wonoasih	10,981	32.526	2.962
Mayangan	8,655	60.468	6.986
Kanigaran	10,653	55.880	5.245
Jumlah Total	56,667	219.145	20.546

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Registrasi Penduduk 2011-2012



Gambar 4.6: Persebaran Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2012 (%)  
Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Registrasi Penduduk 2011-2012 (diolah sendiri)

Dari penyajian kedua data diatas dapat diketahui bahwa wilayah penduduk terpadat di Kota Probolinggo yaitu terletak di Kecamatan Mayangan sebesar 28% dari total jumlah penduduk kota. Jumlah penduduk kecamatan Mayangan yaitu 60.468 jiwa dan luas wilayah 8,655 Km<sup>2</sup>, dengan luas wilayah yang sempit maka kecamatan ini merupakan wilayah terpadat penduduk di Kota Probolinggo. Hal itu sebelumnya telah dijelaskan dalam analisis tabel 4.2 dan gambar 4.5. Kemudian disusul oleh Kecamatan Kanigaran sebesar 25%, Kecamatan Kademangan sebesar 18%, Kecamatan Wonoasih sebesar 15%, dan Kecamatan Kedopok sebesar 14%.

Selain itu juga dari data berikut ini dapat diketahui jumlah penduduk menurut jenis kelamin pada tiap kecamatan di Kota Probolinggo pada tahun 2011 dan 2012. Data berikut ini dapat juga sebagai peningkatan penduduk laki-laki dan perempuan khususnya pada tahun 2011 dan 2012. Hasil data dibawah ini dapat diketahui bahwasannya penduduk dengan berjenis perempuan lebih banyak dibandingkan dengan penduduk berjenis laki-laki.

Tabel 4.4: Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan

Kecamatan	2011			2012		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
Kademangan	18.968	19.3	38.268	19.343	19.649	38.992
Kedopok	15.374	15.498	30.872	15.594	15.679	31.273
Wonoasih	16.171	16.238	32.409	16.215	16.311	32.526
Mayangan	30.129	30.789	60.918	29.903	30.565	60.468
Kanigaran	27.679	27.915	55.594	27.755	28.125	55.88
Kota Probolinggo	108.321	109.74	218.061	108.81	110.329	219.139

Sumber: BPS Kota Probolinggo

Tabel diatas menunjukkan pemahaman mengenai perbandingan jumlah penduduk kota Probolinggo antara laki-laki dan perempuan. Jumlah perempuan tiap tahunnya mendominasi jumlah penduduk di kota Probolinggo dan mengalami peningkatan dari tahun 2011 ke tahun 2012. Jumlah laki-laki dalam tabel tersebut tidak menggambarkan peningkatan yang signifikan. Wilayah kecamatan yang mengalami pengurangan jumlah penduduk yaitu terletak di kecamatan Kedopok dan Mayangan.

#### d. Kondisi Ekonomi Kota Probolinggo

##### (1) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi suatu negara/ wilayah/ daerah. PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan seluruh unit usaha dalam wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada setiap tahun dan dapat

digunakan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar penghitungannya dan dapat digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Tabel 4.5: PDRB Kota Probolinggo Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2008-2011

SEKTOR	TAHUN						
	2011		2010		2009		2008
	RUPIAH (JUTA)	%	RUPIAH (JUTA)	%	RUPIAH (JUTA)	%	RUPIAH (JUTA)
Pertanian	156.170	7,25	162.166	8,02	174.795	9,17	172.863
Pertambangan	24	0,00	23	0,00	24	0,00	24
Industri Pengolahan	290.991	13,50	274.869	13,60	268.785	14,11	267.245
Listrik dan Air Bersih	28.677	1,33	27.153	1,34	25.345	1,33	24.764
Bangunan	19.482	0,90	18.360	0,91	16.767	0,88	15.744
Perdagangan, Hotel, Restoran	983.868	45,66	902.306	44,65	822.768	43,18	757.525
Angkutan/ Komunikasi	290.636	13,49	273.502	13,53	260.676	13,68	248.559
Bank/Keu/ Perum	160.691	7,46	149.589	7,40	136.775	7,18	129.595
Jasa	224.364	10,41	212.859	10,53	199.292	10,46	192.135
Total	2.154.902	100	2.020.827	100	1.905.227	100	1.808.453
Laju Pertumbuhan		7		6		5	

Sumber: <http://regionalinvestment.bkpm.go.id/> (diakses 20 Februari 2014)

Berdasarkan pada paparan tabel 4.5 mengenai PDRB Kota Probolinggo dengan ADHK dapat diketahui bahwasannya tiap tahunnya mulai tahun 2008 hingga tahun 2011 terus mengalami kenaikan jika dilihat dalam jumlah totalnya. Sedangkan untuk per sektornya beragam, ada yang mengalami kenaikan atau penurunan. Kenaikan yang terjadi pada sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Sedangkan yang lainnya rata-rata pada posisi yang mengalami penurunan yang dapat dilihat dari tahun 2010 ke tahun 2011. Pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo secara umum mengalami kenaikan dan untuk laju pertumbuhan juga mengalami kenaikan sebesar 1 poin tiap tahunnya.

## (2) Struktur Perekonomian dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Struktur perekonomian Kota Probolinggo didominasi oleh sektor - sektor antara lain: sektor perdagangan, hotel, dan restoran (42,60%); sektor pengangkutan dan komunikasi (14,36%); dan sektor industri pengolahan (13,75%). Sektor lainnya yang kontribusinya relatif cukup besar adalah sektor jasa. Adapun sumbangan lima sektor lainnya masih kurang dari 10%, dengan penyumbang terkecil adalah sektor pertambangan dan pergalian hampir 0%. Seluruh sektor ekonomi PDB pada tahun 2010 mencatat pertumbuhan positif kecuali sektor pertanian dan sektor pertambangan dan pergalian. Bila diurutkan pertumbuhan PDB menurut sektor ekonomi dari yang tertinggi ke yang terendah, maka pertumbuhan tertinggi dihasilkan oleh sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebesar 9,67%, diikuti sektor bangunan sebesar 9,5%, sektor lembaga keuangan sebesar 9,73%, sektor jasa-jasa sebesar 7,31% dan sektor industri

pengolahan sebesar 2,26%. Sementara sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalian mengalami penurunan masing-masing sebesar 7,23% dan 2,9%.

### (3) Keuangan Daerah

Tabel 4.6: Struktur APBD Kota Probolinggo Tahun 2009-2013

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2012	2011	2010	2009
1	Pendapatan :					
	a. Pendapatan asli daerah;	65.668.836.153,92	61.488.686.225,29	46.939.564.817	32.087.000.000	32.345.541.867
	b. Dana perimbangan;	450.125.875.379,00	374.021.412.478	331.988.466.288	316.108.000.000	316.108.445.353,00
	c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	88.220.830.687,00	127.848.219.571	128.736.902.545,30	56.941.000.000	56.941.043.812,89
	Jumlah	604.016.000.000	563.358.000.000	507.665.000.000	405.136.000.000	405.395.000.000
2	Belanja :					
	a. Belanja langsung	319.848.740.775,43	327.648.389.564,91	272.854.735.865	266.305.000.000	266.305.311.185,42
	b. Belanja tidak langsung	327.118.789.259,34	294.474.967.270,72	278.411.563.442,91	176.892.000.000	176.891.655.177,71
	Jumlah	646.968.000.000	622.123.000.000	551.266.000.000	443.197.000.000	443.197.000.000

Sumber : <http://jdih.jatimprov.go.id/> (diakses 2 Maret 2014)

Sumber-sumber keuangan daerah Kota Probolinggo terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) (terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah

yang sah), dana perimbangan (bagi hasil pajak/bukan pajak, DAU, dan DAK dan pendapatan lain-lain yang sah) dan pendapatan lain-lain yang sah (hibah, dana bagi hasil pajak dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya. Data keuangan yang disajikan pada tabel 4.7 memberikan pemahaman mengenai sumber-sumber keuangan daerah, selain itu juga dapat dipahami peningkatan dan penurunan keuangan daerah kota Probolinggo. Jumlah pendapatan daerah Probolinggo tiap tahun mengalami peningkatan dan hal itu jelas akan mempengaruhi pengeluaran (belanja) yang juga mengalami peningkatan mulai tahun 2009-2013. Pendapatan yang didapat oleh pemerintah daerah terbesar berasal dari dana perimbangan, sedangkan pendapatan asli daerahnya sendiri dalam jumlah yang cukup kecil jika dilihat dari jumlah seluruh pendapatannya. Keuangan daerah Probolinggo tiap tahunnya mengalami defisit yaitu suatu kondisi dimana pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan pengeluaran (belanja).

#### (4) Investasi

Sebagai daerah yang bercirikan kota, investasi menjadi suatu hal yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi di Kota Probolinggo. Potensi yang prospektif bagi investasi antara lain sektor perdagangan, industri pengolahan dan jasa. Data Dinas Koperasi, Energi Mineral, Industri dan Perdagangan (Diskopindag) pada tahun 2012 profil industri pengolahan di Kota Probolinggo seperti pada gambar berikut dibawah ini:

Tabel 4.7: Keadaan Industri Menurut Kelompok Industri tahun 2012

Kelompok Industri	Unit Usaha	Tenaga Kerja	Nilai Produksi	Nilai Investasi
Industri Logam, Mesin, Tekstil, dan Aneka (ILMTA)	65	1.484	230.152.749	11.891.867
Industri Agro dan Kimia (IAK)	474	2.118	234.928.515	12.143.467
Industri Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika (IATT)	3	25	60.000.000	5.726.617
Jumlah	542	3.627	525.080.264	29.761.951

Sumber: Dinas Koperasi, Energi, Industri, dan Perdagangan Kota Probolinggo dalam Kota Probolinggo Dalam Angka 2013

Tabel diatas menunjukkan bahwasannya industri di kota Probolinggo terbanyak dari Industri Agro dan Kimia dengan nilai investasi Rp 12.143.467,00. sebanyak 474 unit. Sedangkan industri logam, mesin, tekstil dan aneka (ILMTA) sebanyak 65 unit dan industri alat transportasi, elektronika dan telematika (IATT) sebanyak 3 unit. Industri agro dan kimia (IAK) mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 2.118 orang, industri logam, mesin, tekstil dan aneka (ILMTA) menyerap sebanyak 1.484 orang, sedangkan industri alat transportasi, elektronika dan telematika (IATT) menyerap sebanyak 25 orang.

Potensi perdagangan kota Probolinggo menurut data dari DISKOPERINDAG cukup besar, hal ini dapat dilihat dari jumlah pedagang yang memperpanjang ijin usahanya pada tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar

12,56 persen dari 5.653 pedagang pada tahun 2010 menjadi 6.353 pedagang pada tahun 2012.

Pedagang diklasifikasikan dalam tiga klasifikasi yakni seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 4.8: Pedagang yang Memiliki SIUP Menurut Klasifikasinya tahun 2008 – 2012

No.	Klasifikasi Pedagang	2008	2009	2010	2011	2012
1	Pedagang Mikro-Kecil	3.187	4.180	3.756	4.737	5.395
2.	Pedagang Menengah	615	670	724	802	843
3.	Pedagang Besar	77	89	105	114	125
	Jumlah Total	3.879	4.939	4.585	5.653	6.363

Sumber: Dinas Koperasi, Energi, Industri, dan Perdagangan Kota Probolinggo dalam Kota Probolinggo Dalam Angka 2013

Tabel 4.9 tersebut menunjukkan jumlah pedagang berdasarkan klasifikasinya mulai tahun 2008-2012. Jumlah pedagang tersebut terus mengalami peningkatan. Pedagang berdasarkan klasifikasinya yakni Pedagang Mikro Kecil tahun 2012 sebanyak 5.395 pedagang (84,79%), Pedagang Menengah tahun 2012 sebanyak 843 pedagang (13,25%), dan Pedagang Besar tahun 2012 sebanyak 125 pedagang (1,96%).

#### (5) Prasarana dan Sarana Ekonomi

Prasarana dan sarana merupakan alat dalam kegiatan yang menunjang kegiatan perekonomian kota Probolinggo. Prasarana dan sarana ekonomi yang ada di kota Probolinggo yaitu sebagai berikut:

- 1) Prasarana transportasi berupa jalan di Kota Probolinggo adalah jalan kota sepanjang 173,475 km dan jalan nasional sepanjang 21.420 km. yang meliputi: sepanjang 85.220 km dalam kondisi beraspal dan 106.749 km dalam kondisi beraspal hotmix. Prasarana transportasi berupa pelabuhan niaga sebanyak 1 buah dengan dan pelabuhan ikan sebanyak 1 buah.
- 2) Jaringan Listrik. Kebutuhan listrik Kota Probolinggo dipenuhi dari PT PLN (Persero) dengan daya terpasang sebesar 68.945.495 VA dan terjual sebesar 161.459.552 sampai dengan tahun 2008, yang dipergunakan untuk melayani 1.051 pelanggan sosial, 40.660 pelanggan rumah tangga, 57 pelanggan industri, 232 pelanggan gedung kantor dan 130 penerangan jalan.
- 3) Sarana Pos dan Telekomunikasi. Sarana pos di Kota Probolinggo dilayani oleh PT Pos Indonesia dengan fasilitas 1 buah Kantor Pos. Sarana telekomunikasi *fixed line* di Kota Probolinggo dilayani oleh PT Telkom , sedangkan sarana telekomunikasi bergerak (mobile) dilayani oleh, PT. Telkom, PT. Telkomsel, PT. Indosat, PT. Exelcomindo Pratama, dan Mobile X.

- 4) Sarana Perdagangan di Kota Probolinggo berupa pasar daerah sebanyak 18 buah, pasar Swalayan 20 buah dan *Hyper Market* 1 buah. Dan jumlah pedagang kecil sebanyak 3.187 orang, pengusaha menengah sebanyak 615 orang, dan pengusaha besar sebanyak 77 orang.
- 5) Koperasi yang turut menggerakkan ekonomi di Kota Probolinggo terdiri dari KUD, koperasi serba usaha, koperasi simpan pinjam dan lain - lain dengan jumlah total Koperasi aktif sebanyak 172 unit, koperasi tidak aktif sebanyak 77 unit, koperasi sekunder sebanyak 1 unit, koperasi primer sebanyak 248 unit, dan KUD sebanyak 4 unit.
- 6) Lembaga Keuangan di Kota Probolinggo yang berupa perbankan terdiri atas Bank BNI, Bank Jatim (BPD), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Danamon, Bank Central Asia (BCA), Bank Bukopin, Bank Tabungan Pembangunan Nasional (BTPN), Primkoveri dan Bank SAJ. Selain itu terdapat lembaga pembiayaan antara lain : Adira Finance, Busan Auto Finance, FIF, Sumit OTO Finance
- 7) Sarana Air Bersih. Pemenuhan kebutuhan air bersih khususnya untuk penduduk dilayani oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kota Probolinggo dengan jumlah sambungan rumah yang telah dapat terpasang sebanyak 14.438 buah. Sampai dengan tahun 2008 cakupan pelayanan PDAM Kota Probolinggo mencapai 45 % dari total kebutuhan yang ada.

e. Kondisi Sosial Budaya Kota Probolinggo

Berdasarkan dari Laporan Akhir Pendampingan Capaian Tujuan Pembangunan Millenium (Evaluasi Pelaksanaan Program MDG's Kota Probolinggo tahun 2012) yang dikeluarkan oleh Pusat Kajian Pemberdayaan Masyarakat dan Pemanfaatan Lingkungan Hidup Bayuangga (PKPM-PLB) menunjukkan bahwasannya karakteristik sosial penduduk Kota Probolinggo dapat dilihat dari segi etnik dan masyarakatnya. Masyarakat Probolinggo dilihat dari sosial budayanya sebagian berasal dari budaya agraris (petani dan nelayan) dan berkembang menjadi masyarakat urbanis. Sedangkan apabila ditinjau dari suku, sebagian besar masyarakat Kota Probolinggo merupakan suku Jawa dan Madura. Salah satu wujud kekhasan budaya masyarakat ialah lahirnya seni budaya khas daerah seperti seni tari, seni suara, seni musik dan seni rupa. Hal ini selain memperkuat budaya masyarakat juga menjadi asset yang bisa dikembangkan untuk wisata maupun industri. Dengan adanya keanekaragaman suku budaya di Kota Probolinggo, maka Kota Probolinggo memiliki adat kebudayaan dan kesenian yang bervariasi dalam rangka menunjang kesenian dan pariwisata di Kota Probolinggo yang dapat menarik minat para wisatawan domestik maupun luar negeri. Beberapa macam kebudayaan dan kesenian tersebut antara lain yaitu: jaran bodhag, kerapan kambing, ludruk, ojung, kerapan sapi brujul, petik laut, tradisi sya'banan, lomba perahu hias, kobuda, dan tari peraben linggo.

## B. Penyajian Data Fokus Penelitian

1. Gambaran Program Seminggu di Kota Probolinggo (SEMIPRO)
  - a. Kegiatan-kegiatan dalam Program Seminggu di Kota Probolinggo (SEMIPRO)

Pemerintah kota Probolinggo memiliki suatu cara baru kegiatan dalam rangka mengembangkan pariwisatanya dengan tujuan untuk memperkenalkan dan mempromosikan potensi budaya kota yang terkenal dengan mangga dan anggurnya. Cara baru tersebut sebenarnya merupakan sebagai pengganti program lama dalam rangka memenuhi kebutuhan pariwisata Kota Probolinggo yaitu yang dikenal dengan KOBUDA (Kontes Busana Daun), sebagai hal tersebut diungkapkan oleh BAW selaku Kabid Pariwisata DISPOBPAR Kota Probolinggo bahwa, “Tahun 2008 Probolinggo memiliki KOBUDA yang dilaksanakan oleh para siswa dan ternyata berjalan sukses. Namun menuai banyak kritikan. Akhirnya tahun 2009 muncullah program SEMIPRO” (wawancara pada tanggal 30 Oktober 2013 pukul 13.00). Munculnya SEMIPRO sebagai suatu inovasi melalui beberapa proses sebagaimana dalam Noor (2013:113). Proses inovasi SEMIPRO yaitu berawal dari pengganti program lama yang dimunculkan oleh pemerintah, namun ternyata menuai banyak kritikan. Pemerintah dan seniman kota Probolinggo memunculkan gagasan-gagasan baru untuk mengembangkan pariwisatanya. Program ini mencoba mengadopsi dari program yang dilaksanakan di Jember, namun bedanya hanya dilaksanakan selama satu minggu. Kemudian muncullah SEMIPRO. Hal itu dapat diperkuat oleh BP selaku seniman Kota Probolinggo, “munculnya SEMIPRO ini merupakan penggantinya

KOBUDA. SEMIPRO sedikit mengadopsi dari Jember. Bedanya kalau di Jember itu sebulan kalau di Probolinggo itu selama satu minggu” (wawancara pada tanggal 15 Februari pukul 12.30 WIB). Hal senada juga diungkapkan dan dilengkapi oleh BK selaku Sekretaris DISPOBPAR,

“Kalau di Jember ada BBJ, Malang ada MTD, sedangkan di Probolinggo ada SEMIPRO. Konsep awalnya berasal dari KOBUDA tetapi banyak kritikan akhirnya pemerintah membuat suatu program baru setelah melihat dan menelaah dari program-program inovasi yang dilakukan oleh Kabupaten Jember. Kemudian jadilah SEMIPRO” (wawancara tanggal 20 Februari 2014 pukul 09.19).

Dengan demikian proses inovasi sebagai suatu awal munculnya inovasi di Kota Probolinggo melalui beberapa pemilihan ide yang sebelumnya telah melakukan survey ke beberapa daerah yang memiliki program inovasi dalam rangka mengembangkan pariwisatanya. SEMIPRO merupakan alternatif hiburan baru bagi masyarakat kota Probolinggo sebagaimana dalam Laporan Evaluasi SEMIPRO 2012 yang dikeluarkan oleh DISPOBPAR menyebutkan bahwasannya,

“Sebelum adanya program ini, banyak warga yang sering bepergian keluar kota untuk tujuan hiburan/refreshing keluarga. Sedangkan sejak adanya pengembangan, kepariwisataan SEMIPRO ini maka warga Probolinggo tidak lagi meluangkan waktu untuk hiburan di luar kota akan tetapi di Kota Probolinggo saja, dikarenakan fasilitas hiburan dan kebutuhan warga masyarakat Kota Probolinggo sudah banyak tersedia melalui event Seminggu di Kota Probolinggo (SEMIPRO), yang membawa pada peningkatan PAD dan juga peningkatan kesejahteraan warga baik dari UKM, PKL, dan jasa transportasi yang ada di Kota Probolinggo”.

Program Seminggu di Kota Probolinggo atau yang biasa disebut SEMIPRO merupakan suatu gagasan baru dari pemerintah kota untuk memperkenalkan khazanah Kota Probolinggo serta menampilkan produk unggulan yang dimiliki sebagaimana juga dijelaskan dalam website DISPOBPAR Kota Probolinggo, yaitu SEMIPRO diawali dari sebuah ide dan gagasan untuk

menciptakan daya tarik Kota Probolinggo lebih berkualitas (<http://dispobpar-kotaprobolinggo.com> diakses pada tanggal 22 September 2013). SEMIPRO hingga tahun 2013 telah berjalan sebanyak 5 (lima) kali yang dimulai pada tahun 2009.

Program SEMIPRO dilaksanakan saat liburan sekolah yaitu sekitar bulan Juni atau Juli. Tema program tiap tahunnya pun berbeda-beda sebagaimana yang dapat dilihat dalam rincian tabel dibawah ini.

Tabel 4.9: Tema dan Waktu Pelaksanaan Seminggu di Kota Probolinggo (SEMIPRO) tahun 2009-2013

Kriteria	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Pelaksanaan	12-18 Juli	26 Juni-3 Juli	25 Juni-2 Juli	23-30 Juni	29 Juni-6 Juli
Tema	Tidak Ada Tema		“Semarak Kota Probolinggo dalam Khasanah Seni, Budaya, dan Pariwisata sebagai Penggerak Ekonomi Menuju Kota Investasi”	“Dengan Semangat Nasionalisme Kita Tingkatkan Potensi Daerah sebagai Penggerak Wisata, Ekonomi, dan Investasi Menuju Probolinggo Luar Biasa”	“Mengembangkan Destinasi Wisata Budaya, Olahraga dan Seni untuk Memacu Pertumbuhan Investasi dan Usaha Ekonomi Masyarakat menuju Kota Probolinggo Makin Luar Biasa”

Sumber: (diolah peneliti)

Tabel 4.9 tersebut menyajikan data mengenai tanggal pelaksanaan Seminggu di Kota Probolinggo (SEMIPRO) dan tema yang diangkat dalam program ini. Program inovatif ini merupakan salah satu program dari pemerintah daerah yang memiliki tujuan yaitu untuk menahan warganya agar ketika liburan terutama saat liburan sekolah tidak menghabiskan waktu di luar kota. Hal itu dapat dilihat dari pelaksanaan program ini yang dilakukan saat-saat liburan

sekolah. Berbagai tema yang disuguhkan dalam program ini pada intinya untuk menggerakkan dan meningkatkan berbagai potensi yang dimiliki daerah yaitu pada bidang seni, budaya, olahraga, dan pariwisata dengan tujuan agar dapat memacu pertumbuhan ekonomi kota Probolinggo. Pada tahun 2009 program ini untuk pertama kalinya dilaksanakan di Kota Probolinggo yang menampilkan produk unggulan khas kota Probolinggo khususnya kesenian, kebudayaan, pameran pariwisata dan lomba-lomba dengan mempersembahkan kreatifitas dan inovasi putra-putra daerah untuk mengembangkan potensi kota Probolinggo. SEMIPRO tahun 2009 tidak memiliki tema yang khusus (non-tema), sebagaimana hal tersebut juga diperkuat oleh hasil wawancara dari BD sebagai Kabid Dalit BAPPEDA Kota Probolinggo: “2009 SEMIPRO masih non-tema karena lebih mengarah kepada KOBUDA (Kontes Busana Daun) dan mengekspose daun daur ulang” (wawancara pada tanggal 15 Februari 2014 pukul 09.55). Pelaksanaan SEMIPRO 2010 tidak mendapatkan data mengenai tema yang digunakan dalam program ini. Selain memiliki tema, SEMIPRO juga memiliki visi dan misi yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program ini, sebagaimana dipaparkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.0: Visi, dan Misi Program Seminggu Di Kota Probolinggo 2009

VISI KEGIATAN	Melalui SEMIPRO kita tingkatkan pesona budaya, seni dan kepariwisataan di Kota Probolinggo
MISI	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mengajak masyarakat lebih cinta seni, Budaya dan Wisata di Kota Probolinggo</li> <li>b. Menggali potensi Budaya dan Kepariwisataaan</li> <li>c. Mendukung program pariwisata daerah, dalam upaya meningkatkan jumlah kunjungan wisata mancanegara maupun domestik ke daerah</li> <li>d. Meningkatkan kualitas kebudayaan dan daya tarik kepariwisataan daerah, tetap menjaga nilai-nilai agama, citra kepribadian daerah.</li> </ol>

Sumber: <http://probolinggokota.go.id/> (diolah)

Tabel 5.1: Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Program Seminggu Di Kota Probolinggo 2010

Visi	“Meningkatkan citra pariwisata dan menjadikan Kota Probolinggo sebagai daerah tujuan wisata di Propinsi Jawa Timur yang memiliki daya saing tinggi dan tetap memperhatikan kelestarian nilai-nilai budaya, adat-istiadat dan lingkungan hidup”
Misi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperkenalkan, melestarikan dan meningkatkan mutu obyek dan daya tarik wisata;</li> <li>2. Memperluas dan pemeratakan kesempatan bekerja serta lapangan usaha dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif;</li> <li>3. Mendorong pemberdayaan ekonomi rakyat dan peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah;</li> <li>4. Melestarikan nilai-nilai agama, kepribadian dan adat-istiadat, fungsi dan mutu lingkungan hidup;</li> <li>5. Meningkatkan pendayagunaan produksi dalam negeri yang terkait dalam bidang pariwisata;</li> <li>6. Meningkatkan PAD dari sektor pariwisata;</li> <li>7. Memupuk rasa cinta tanah air dan kebanggaan menjadi warga di Bumi Probolinggo.</li> </ol>
Tujuan	Menjadikan Kota Probolinggo sebagai daerah tujuan wisata yang menarik, nyaman, dan aman serta mampu bersaing di pasar wisata nasional dan internasional.
Sasaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kunjungan wisata nusantara (wisnus);</li> <li>2. Kunjungan wisata mancanegara (wisman);</li> <li>3. Lapangan kerja, dan;</li> <li>4. Peningkatan PAD.</li> </ol>
Program	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan inventarisasi terhadap obyek wisata dan budaya kota Probolinggo, sebagai data base;</li> <li>2. Melakukan pembangunan sarana wisata khusus di dua obyek lokasi wisata SEMIPRO yaitu Jalan Panglima Sudirman dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pantai Mangrove sesuai dengan prioritas dan kemampuan daerah;</li> <li>3. Membuat rencana induk pengembangan pariwisata daerah;</li> <li>4. Membuat tapak kawasan dan Rencana Detail Engineering (RDE) obyek wisata Pantai Mangrove yang permanen;</li> <li>5. Melakukan koordinasi dengan semua sector terkait dalam upaya persiapan dan pemantapan SEMIPRO dan obyek wisata untuk dijual dalam bentuk paket wisata.</li> </ol>

Sumber: Laporan Akhir (Dampak SEMIPRO Ditinjau dari Aspek Ekonomi, Sosial Budaya dan Pengembangan Kepariwisataaan di Kota Probolinggo (2010))

Tabel 5.2: Visi, Misi, dan Tujuan Seminggu Di Kota Probolinggo 2011

Visi	“Melalui SEMIPRO Kita Tingkatkan Pesona Budaya, Seni dan Kepariwisataaan di Kota Probolinggo”
Misi	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mengajak masyarakat lebih cinta seni, budaya, dan wisata di Kota Probolinggo;</li> <li>b. Menggali potensi budaya dan kepariwisataan;</li> <li>c. Mendukung program pariwisata daerah, dalam upaya meningkatkan jumlah kunjungan wisata mancanegara maupun domestic ke daerah;</li> <li>d. Meningkatkan kualitas kebudayaan dan daya tarik kepariwisataan daerah, tetap menjaga nilai-nilai agama, citra kepribadian daerah.</li> </ol>
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan perekonomian rakyat;</li> <li>2. Menjadikan Kota Probolinggo sebagai Kota yang kondusif (terkendali);</li> <li>3. Sebagai ajang silaturahmi antar masyarakat kota/kabupaten;</li> <li>4. Sebagai inspirasi untuk menciptakan pariwisata dan karya-karya yang lebih baik.</li> </ol>

Sumber: Laporan Akhir (Kajian Evaluasi Seminggu di Kota Probolinggo (SEMIPRO) tahun 2011)

Tabel 5.0, 5.1, dan 5.2 menyajikan data mengenai visi, misi, dan tujuan dari pelaksanaan program SEMIPRO. Visi yang terkandung dalam program ini yaitu untuk meningkatkan citra pariwisata kota Probolinggo dan menjadikan kota ini menjadi salah satu daerah tujuan wisata di Provinsi Jawa Timur khususnya saat dilaksanakannya program ini. Pariwisata yang dimiliki oleh kota ini dari segi jumlah memang tidak terlalu banyak dan wisata alamnya kurang mendukung untuk dikembangkan lebih lanjut sehingga program ini bisa menjadi salah satu kegiatan yang dapat dinikmati oleh masyarakatnya. Melalui visi yang telah dirumuskan maka pemerintah pun menjabarkannya dalam bentuk beberapa misi yang pada intinya bahwa dengan program SEMIPRO akan dapat mendukung kepariwisataan kota. Di samping itu juga dengan adanya program ini pemerintah menggali budaya dan seni khas kota Probolinggo agar dapat dipertunjukkan kepada masyarakat luas, sehingga masyarakat pun menjadi cinta akan budayanya sendiri. Misi-misi mulia

yang disuarakan oleh pemerintah dengan tujuan agar kota ini lebih dikenal orang tidak hanya sebagai daerah transit tetapi menjadi salah satu daerah tujuan wisata di Jawa Timur.

Dalam rangka memperkenalkan berbagai potensi yang dimiliki, pemerintah daerah menyuguhkan berbagai kegiatan, sebagaimana disajikan dalam bentuk tabel berikut ini

Tabel 5.3: Kegiatan-kegiatan dalam Program Seminggu di Kota Probolinggo (SEMIPRO) tahun 2009-2013

No.	Nama Kegiatan	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	<i>Grand Opening</i>	3 kegiatan	3 kegiatan	1 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan
2	Pagelaran Budaya	3 kegiatan	2 kegiatan	4 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan
3	Seni/Pertunjukan	3 kegiatan	11 kegiatan	11 kegiatan	11 kegiatan	9 kegiatan
4	Lomba/Kontes/Festival	15 kegiatan	8 kegiatan	21 kegiatan	14 kegiatan	12 kegiatan
5	Pameran	2 kegiatan	4 kegiatan	8 kegiatan	9 kegiatan	2 kegiatan
6	Seminar	1 kegiatan	-	1 kegiatan	1 kegiatan	-
7	Kuliner	-	2 kegiatan	7 kegiatan	6 kegiatan	3 kegiatan
8	Olahraga	-	3 kegiatan	10 kegiatan	14 kegiatan	9 kegiatan
9	Pawai	-	1 kegiatan	2 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan
10	Lain-Lain	1 kegiatan	3 kegiatan	12 kegiatan	13 kegiatan	11 kegiatan
11	<i>Closing</i>	ada (1 kegiatan)	ada (2 kegiatan)	ada	ada	ada
Jumlah Kegiatan		30 Kegiatan	35 Kegiatan	84 Kegiatan	75 Kegiatan	53 Kegiatan

Sumber: (diolah peneliti)

Dalam tabel 5.3 tersebut menyajikan data mengenai kegiatan-kegiatan selama SEMIPRO mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, sedangkan rincian kegiatan tiap tahunnya tidak memungkinkan disuguhkan dalam penyajian data namun dapat dilihat dalam lampiran-lampiran. Kegiatan-kegiatan dalam program ini meliputi bidang seni, budaya, olahraga, kuliner,

lomba/kontes/festival, dan lain-lain. Berbagai kegiatan tersebut disuguhkan kepada penonton yang datang dalam program ini. Lokasi-lokasi untuk kegiatan SEMIPRO pun beberapa diantaranya tiap tahunnya juga mengalami perbedaan, sebagaimana pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.4: Lokasi Pelaksanaan SEMIPRO tahun 2009-2013

	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Lokasi-lokasi Pelaksanaan Program Seminggu di Kota Probolinggo (SEMIPRO)		Gor kedopok, Alun-alun, Museum Depan stasiun KA, PURI, Pameran Protex, Yon Zipur 10, Kec. Curah grinting, DKP, TRA, PPP,	Alun-alun, Lap. Wonoasih, Kampung Seni TRA, Kehurahan Curah Gunting, Kolam Renang, Puri Manggala Bhakti Kantor Wali Kota, PPP Mayangan, Lap. Tenis Indoor, Tambak Mangun Harjo, Museum, Stadion, Gor Tri Dharma, Gor A. Yani		Gor Kedopok, Museum, depan Kantor walikota, Lapangan Tenis Bromo, KTI, Kodim, Abdul Rahman Saleh Singosari-Malang, Alun-alun, Lapangan Wonoasih, Museum Probolinggo, Jl Brantas, Kec. Kademangan, Kampung Seni, PPP, Tambak, Zipur, Indi FM, GORA. Yani, BLK, Disperta, Puskesmas Sukabumi

Sumber: (diolah peneliti)

Lokasi yang berbeda tiap tahunnya ini tergantung pada jenis kegiatan yang disajikan oleh pemerintah dan sewa lahan. Sayangnya untuk tahun 2009 kurang mendapat data dan info mengenai lokasi-lokasi yang menjadi pelaksanaan SEMIPRO. Berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa informan tidak dapat memberikan jawaban yang diinginkan peneliti dan laporan-laporan mengenai SEMIPRO untuk tahun 2009 tidak ada dengan alasan laptopnya hilang. Lokasi pelaksanaan program ini tersebar ke beberapa wilayah di Kota Probolinggo sehingga kemeriahan pun terjadi di segala penjuru kota. Selama satu minggu

penuh masyarakat dimanjakan oleh beberapa atraksi dan penampilan yang telah disiapkan sebelumnya. Program SEMIPRO sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwasannya dapat dikatakan sebagai suatu inovasi dari pemerintah daerah. Dengan semangat inovasi itulah pemerintah giat menggelar kegiatan-kegiatan yang menarik untuk dinikmati oleh masyarakat baik masyarakat kota Probolinggo maupun luar masyarakat kota Probolinggo. Dengan demikian jumlah kegiatan-kegiatan tiap tahun cenderung mengalami peningkatan, sebagaimana dalam data tabel diatas tersebut.

b. Aktor yang Terlibat dalam Program Seminggu di Kota Probolinggo (SEMIPRO)

Penyelenggaraan rutinitas program tahunan ini dikemas dalam berbagai macam kegiatan tiap tahunnya yang dapat dilihat dari gambaran program SEMIPRO sebagaimana telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya sehingga perlu untuk melibatkan beberapa aktor dalam rangka mensukseskan pelaksanaan program tersebut. SEMIPRO yang merupakan pesta kesenian rakyat dalam pelaksanaannya hingga tahun 2013 telah melibatkan beberapa aktor, sebagaimana hal tersebut didapat dari hasil wawancara beberapa informan penelitian seperti yang dijabarkan berikut ini:

Hasil wawancara kepada BI selaku Kasi Pengembangan Pariwisata dari DISPOBPAR mengungkapkan:

“Dalam SEMIPRO melibatkan tiga aktor seperti: pemerintah, swasta, dan masyarakat. Mereka memiliki porsi masing-masing, yaitu: pemerintah sebagai wadah kegiatan dan sumber pendanaan; masyarakat: ikut dalam kegiatan melalui salah satunya kreasi-kreasi yang ditampilkan; dan swasta: memberikan kontribusi dalam acara ini berupa peralatan dan

perlengkapan”. (wawancara pada tanggal 11 Februari 2014 pukul 08.36 WIB).

Hasil wawancara dari BD sebagai Kabid bidang Dalit dari BAPPEDA Kota Probolinggo, menuturkan sebagai berikut:

“SEMIPRO telah melibatkan aktor-aktor dari pemerintah dan non-pemerintah, seperti masyarakat, swasta dan daerah lain. Pemerintah ini diwakili oleh beberapa orang dari masing-masing SKPD. Selain itu juga tokoh-tokoh yang peduli pada pembangunan Kota Probolinggo selalu dilibatkan dalam kegiatan ini, sedangkan untuk mengekspose program ini dibantu oleh swasta melalui spanduk di jalan-jalan raya. Daerah-daerah lain diundang sebagai tamu undangan untuk meramaikan *stand*, pembukaan dan penutupan SEMIPRO. Tamu undangan membawa khas daerah masing-masing”. (wawancara pada tanggal 15 Februari 2014 pukul 09.55 WIB)

Hasil wawancara dari BP sebagai salah satu tokoh seniman Kota Probolinggo menyatakan:

“Kota Probolinggo dalam pariwisata tidak memiliki apa-apa dan hanya merupakan daerah transit. Oleh karena itu diciptakannya SEMIPRO sebagai salah satu inovasi dalam pariwisata dalam rangka memperkenalkan potensi kota. SEMIPRO hingga saat ini belum matang dan pada fase proses. Kegiatan ini dalam pelaksanaannya telah melibatkan tidak hanya pemerintah tetapi juga swasta dan masyarakat. Pelibatan masyarakat misalnya melalui tokoh-tokoh masyarakat khususnya tokoh-tokoh seniman banyak dilibatkan melalui organisasi KOPARA Kota Probolinggo (Komunitas Pariwisata). Sedangkan untuk swasta juga ikut terlibat, contohnya: KTI dalam tata pentas” (wawancara pada tanggal 15 Februari 2014 pukul 12.30 WIB).

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan di atas mengenai pelibatan aktor-aktor tersebut dapat disimpulkan, SEMIPRO telah melibatkan beberapa aktor di dalamnya mulai dari pemerintah, swasta dan masyarakat. Pemerintah melalui beberapa SKPD yang ada di Kota Probolinggo dalam acara SEMIPRO memang diwajibkan untuk ikutserta. Berdasarkan hasil penelusuran di

website pemerintah kota Probolinggo Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di kota Probolinggo berjumlah 43 (termasuk walikota dan wakil walikota). Semua SKPD tersebut diwajibkan untuk ikutserta dalam pelaksanaan SEMIPRO. Sedangkan untuk masyarakat sendiri melalui beberapa perwakilannya. Beberapa aktor swasta juga ikutserta dilibatkan dalam program ini dengan tujuan untuk memeriahkan SEMIPRO. Kesempatan yang diberikan kepada swasta untuk ikutserta dalam program ini misalnya perihal kepanitiaan yaitu untuk ketua panitia memang dari pihak luar yang ditunjuk oleh bapak Walikota Kota Probolinggo. Hal ini diperkuat dari hasil wawancara dengan BD selaku Kabid Dalit dari BAPPEDA Kota Probolinggo yaitu, “Untuk kepanitiaan ditentukan oleh Pak Walikota dalam hal ketuanya. Untuk semua anggota panitia dari SKPD-SKPD yang diwakili oleh beberapa orang” (wawancara pada tanggal 15 Februari 2014 pukul 09.55 WIB). Penunjukan ketua dalam kepanitiaan program ini dari pihak luar selain pemerintah dan tergantung pada kewenangan dari walikota itu sendiri sebagai penguasa Kota Probolinggo. Sedangkan untuk anggota panitia ini terdiri dari beberapa perwakilan dari setiap SKPD yang ada di Kota Probolinggo. Hal tersebut dapat dilihat dalam susunan kepanitiaan program SEMIPRO.

Keterlibatan daerah lain dalam program ini dapat diketahui dari Laporan Seminggu di Kota Probolinggo tahun 2012 yang dikeluarkan oleh bagian Humas dan Protokol misalnya dalam kegiatan pawai budaya, antara lain: Kabupaten Sleman, Kota Mojokerto, Kabupaten Banyuwangi, Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Probolinggo, Kota Blitar, Kota Batu, dan Kabupaten Jember. Dalam pawai budaya tersebut terdiri 51 peserta yang

terdiri dari 10 peserta dari daerah lain, 2 peserta dari masyarakat yaitu etnis Tionghoa dan etnis Arab serta KONI, 3 peserta dari swasta yaitu Bank Jatim, AKAS IV, dan Cakep *Management*, sedangkan sisanya peserta tersebut dari SKPD pemerintah. Keikutsertaan daerah lain dalam program ini terus bertambah tiap tahunnya. Hal itu dapat dilihat dalam buklet SEMIPRO 2013 Karnaval Budaya Nusantara yaitu dari total 39 peserta pawai yang terdiri dari 13 peserta undangan kabupaten/kota, 20 peserta dari SKPD Kota Probolinggo, dan 6 peserta dari umum (BUMN, perusahaan dan umum). Selain itu juga dalam pameran UKM terlihat beberapa daerah lain yang juga ikutserta memamerkan produk-produk asli daerahnya seperti Kota Surabaya, Kota Batu, Kota Sidoarjo, dan Kabupaten Lumajang.

c. Sumber Pembiayaan Program Seminggu di Kota Probolinggo (SEMIPRO)

Kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam program SEMIPRO ini dibiayai oleh pemerintah daerah Kota Probolinggo melalui APBD yang dimiliki dan sumber dana lainnya. Hal tersebut dapat dilihat dalam SEMIPRO 2011 didanai dari APBD Kota Probolinggo dan sumber dana lainnya yang didapat dari Surat Keputusan Walikota Probolinggo tentang Panitia Penyelenggara Seminggu di Kota Probolinggo (SEMIPRO) Tahun 2011 pada butir keenam, menyatakan bahwasannya:

“Biaya pelaksanaan tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan KELIMA. Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2011 pada masing-masing instansi pendukung penyelenggaraan SEMIPRO Tahun 2011 dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat”.

Penggunaan APBD dalam program SEMIPRO dibenarkan oleh pendapat dari beberapa informan, yaitu pertama dari BI selaku Kasi Pengembangan Pariwisata bahwa, “SEMIPRO itu dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)” (wawancara pada tanggal 11 Februari 2014 pukul 08.36 WIB). Kemudian informan yang kedua dari BD selaku Kabid Dalit dari BAPPEDA menyatakan pendapat bahwa, “SEMIPRO dibiayai oleh APBD yang berasal dari masing-masing SKPD yang mendukung program ini. Namun untuk jumlah seluruhnya untuk program ini kurang mengetahui karena sepertinya kurang terorganisir dengan baik” (wawancara pada tanggal 15 Februari 2014 pukul 09.55). Informan ketiga dari BA selaku Kabid Informasi dari DISKOMINFO juga mengungkapkan bahwasannya, “SEMIPRO ini dibiayai oleh APBD” (wawancara pada tanggal 21 Februari 2014 pukul 10.48 WIB). Dengan demikian dapat menyimpulkan bahwasannya SEMIPRO ini didanai oleh APBD Kota Probolinggo, dimana anggaran tersebut diturunkan ke masing-masing SKPD dan saat acara akan terlaksana instansi pendukung (SKPD) terkait mengeluarkan dana tersebut.

Anggaran yang dikeluarkan saat program ini berjalan kurang dapat diketahui karena yang mengeluarkan dana masing-masing SKPD dan kurang didokumentasikan dengan baik. Selain itu juga beberapa informan enggan menjawabnya dengan alasan bukan wewenangnya dan merupakan informasi yang bersifat rahasia dalam artian tidak bisa dipublikasikan, sebagaimana hal itu diungkapkan dari hasil wawancara beberapa informan penelitian, antara lain: dari BI selaku Kasi Pengembangan Pariwisata yang mengungkapkan bahwasannya,

“Dalam hal dana tidak bisa dipublikasikan secara sembarangan dan merupakan hal yang bersifat rahasia” (wawancara pada tanggal 11 Februari pukul 08.36). Sedangkan dari informan BA Kabid Informasi dari DISKOMINFO mengungkapkan bahwasannya, “Jumlah anggaran yang dikeluarkan saya tidak tahu dan bukan menjadi wewenang saya untuk menjawabnya” (wawancara pada tanggal 21 Februari 2014 pukul 10.48 WIB). Dari hasil wawancara informan kedua informan diatas menunjukkan bahwasannya dana ini tidak mudah diketahui oleh umum. Padahal penggunaan dana atau besarnya dana yang digunakan ini seharusnya diketahui oleh masyarakat karena pembiayaan itu berasal dari dana rakyat secara tidak langsung.

Wewenang pelaksanaan SEMIPRO ini berada di tangan DISPOBPAR namun tidak memperoleh data terkait dengan jumlah uang yang dikeluarkan pada program ini. Hal ini sangat berbeda dengan hasil wawancara dari BK selaku Sekretaris dari DISPOBPAR yang dapat memperkirakan jumlah uang yang dikeluarkan, sebagai berikut, “Pembiayaan SEMIPRO tidak membutuhkan biaya yang banyak yaitu sekitar 1 milyar lebih dikit tetapi tidak sampai dua milyar lah” (wawancara pada tanggal 20 Februari 2014 pukul 09.19). Namun pada kenyataannya dalam pelaksanaan kegiatan menghabiskan dana sebesar Rp 2,516,067,653 (sumber: hasil surveyor SEMIPRO 2013). Dalam hal publikasi dapat diperkirakan menelan biaya sebesar Rp 134.950.000 (untuk media cetak, elektronik, dan online. Jumlah tersebut belum termasuk publikasi pada media tercetak yang dimiliki Humas dan media luar ruang yaitu publikasi pada beberapa kabupaten/kota tetangga, antara lain: Kota/Kab. Pasuruan, Kota/Kab. Malang,

Kab. Probolinggo, Kab. Situbondo, Kab. Bondowoso, Kab. Banyuwangi, Kab. Jember, Kab. Lumajang, dan Kota Batu). (Sumber: Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Koordinator Publikasi dan Dokumentasi SEMIPRO 2012 yang dikeluarkan oleh bagian Humas dan Protokol). Dengan demikian program SEMIPRO yang dilaksanakan memerlukan biaya sekitar 2,6 hingga 2,7 Milyar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Probolinggo.

## 2. Sinergitas *Stakeholders* dalam Program Seminggu di Kota Probolinggo (SEMIPRO)

Program yang dilaksanakan setiap satu tahun sekali ini dalam pelaksanaannya harusnya melibatkan *stakeholders* yaitu pemerintah, masyarakat, dan swasta. Hal ini sesuai dengan Sedarmayanti (2009) yang menyebutkan bahwasannya unsur-unsur dalam pemerintahan (*governance stakeholders*) dapat dibagi menjadi tiga yaitu negara, swasta, dan masyarakat. Ketiga *stakeholders* tersebut harusnya bersinergi. Sinergi dalam suatu program sangatlah penting untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005) sinergi berarti kegiatan atau operasi gabungan. Sedangkan Covey (1993), mengartikan sinergi sebagai kombinasi atau paduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar. Kesimpulannya sinergi merupakan suatu operasi gabungan (yang berupa tindakan) untuk dapat menghasilkan output yang lebih besar dan baik. Dengan demikian pada program SEMIPRO ini yang dimaksud dengan sinergi adalah terjalinnya operasi gabungan antar *stakeholders* untuk menghasilkan suatu kegiatan yang berjalan sukses. Sinergi yang terjalin antar aktor yang terlibat

dalam program pengembangan pariwisata ini melalui dua cara yaitu komunikasi dan koordinasi.

a. Komunikasi

Cara untuk membangun sinergitas *stakeholders* salah satunya yaitu melalui komunikasi. Menurut Sofyandi dan Garniwa (2007), pengertian komunikasi dapat dibedakan atas dua bagian, yaitu: 1. Pengertian komunikasi yang berorientasi pada sumber menyatakan bahwa, komunikasi adalah kegiatan dengan mana seseorang (sumber) secara sungguh-sungguh memindahkan stimuli guna mendapatkan tanggapan. 2. Pengertian komunikasi yang berorientasi pada penerima memandang bahwa, komunikasi sebagai semua kegiatan di mana seseorang (penerima) menanggapi stimulus atau rangsangan. Definisi komunikasi yang dikemukakan Sofyandi dan Garniwa (2007) bahwasannya komunikasi merupakan kegiatan pemindahan stimuli dari sumber kepada penerima guna mendapatkan rangsangan dari penerima sehingga akan terjadi pertukaran informasi antara sumber dengan penerima. Myers & Myers (dalam Hasan 2005:18), “Komunikasi sebagai titik pusat kekuatan menyatukan sehingga terjadi koordinasi antara orang-orang dan karenanya mereka akan bergerak pada suatu tindakan yang terorganisir”. Komunikasi yang terjadi memiliki fungsi sebagaimana Hasan (2005:22) mengemukakan,

“Komunikasi memiliki peran dominan dalam kehidupan manusia, sehingga fungsi komunikasi adalah: mencapai pengertian satu sama lain, membina kepercayaan, mengkoordinir tindakan, merencanakan strategi, melakukan pembagian pekerjaan, melakukan aktivitas kelompok dan berbagi rasa”.

Komunikasi memiliki peran dominan dalam kehidupan manusia sehingga memiliki beberapa fungsi dalam rangka memenuhi tujuan peran tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya komunikasi merupakan kegiatan penyampaian pesan kepada penerima, yang mana penerima akan memberikan timbal balik kepada sumber sehingga terjadinya pertukaran informasi antar keduanya. Sinergi yang terjalin dalam program ini salah satunya dilihat dari sisi komunikasi yang pada intinya terjadinya hubungan timbal balik atau pertukaran informasi antara pemerintah, masyarakat, dan swasta. Dengan adanya komunikasi antar *stakeholders* maka akan terjalin interaksi sehingga bisa saling bertukar informasi begitu juga dalam program SEMIPRO.

Komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk menyampaikan ide dan gagasan tentang program ini sehingga masyarakat tahu akan maksud dari pemerintah yaitu salah satunya melalui sosialisasi sebagaimana dikatakan oleh BA selaku Kabid Informasi dari DISKOMINFO bahwa, “Pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik dalam maupun luar Probolinggo melalui berbagai media seperti spanduk, banner, radio, koran lokal dan regional, website pemerintah daerah” (wawancara pada tanggal 21 Februari 2014 pukul 10.48 WIB). Namun ternyata sosialisasi yang dilakukan di Probolinggo kurang giat dan begitu efektif sebagaimana yang diungkapkan oleh BP selaku salah satu senimana Kota Probolinggo bahwasannya, “Dalam SEMIPRO ini sosialisasi kepada masyarakat kurang, memang sudah banyak spanduk terpasang tetapi untuk sosialisasi langsung kepada masyarakat belum ada” (wawancara pada tanggal 15 Februari pukul 12.30 WIB). Hasil wawancara

dari BP menyiratkan bahwasannya sosialisasi yang dilakukan kurang tepat sasaran karena sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat secara langsung nampaknya belum dilakukan oleh pemerintah. Hal yang sama juga diungkapkan oleh BA selaku Kabid Informasi dari DISKOMINFO yaitu,

“Sosialisasi SEMIPRO memang terkadang terlambat biasanya baru tiga atau dua bulan sebelumnya. Misalnya saja pada SEMIPRO 2013 sosialisasi baru dilakukan sekitar pada bulan Maret dan SEMIPRO dilakukan pada bulan akhir Juni sampai awal Juli (selama satu minggu)” (wawancara pada tanggal 21 Februari 2014 pukul 10.48 WIB).

Bentuk komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah melalui sosialisasi ke beberapa media baik cetak dan elektronik dilakukan oleh pihak yang berwenang yaitu DISKOMINFO dan jajarannya. Namun sayangnya sosialisasi yang dilakukan terlambat dari jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu juga kurang tepat cara yang dilakukan dan tidak disesuaikan dengan kondisi masyarakatnya sendiri. Komunikasi lain yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat dan swasta sebagaimana yang diungkapkan dari hasil wawancara beberapa informan, antara lain: BD selaku Kabid Dalit dari BAPPEDA, “Cara mengkomunikasikan kepada masyarakat tidaklah sulit karena orang Probolinggo sendiri dan mereka memang terbiasa aktif” (wawancara pada tanggal 15 Februari pukul 09.55 WIB). BEH selaku Kasi Pemberdayaan Budaya dari DISPOBPAR cara komunikasi dengan komunitas, “Mereka diundang untuk membahas mengenai keterlibatan mereka dalam acara SEMIPRO” (wawancara pada tanggal 20 Februari 2014 pukul 11.00 WIB). Selain itu juga BI selaku Kasi Pengembangan Pariwisata dari DISPOBPAR untuk komunitas dalam bidang pariwisata mengungkapkan bahwasannya, “Para komunitas itu masing-masing

didatangi oleh kita. Aktor lain (swasta) diundang dan dikumpulkan melalui rapat dan sebagai pembicara yaitu Bapak Walikota sendiri” (wawancara pada tanggal 20 Februari 2014 pukul 13.00 WIB). BI sebagai Kasi Pengembangan Pariwisata DISPOBPAR mengatakan bahwasannya, “Hal yang serupa juga diungkapkan oleh BA selaku Kabid Informasi dari DISKOMINFO yakni, “DISKOMINFO yang mengundang rapat dan menyebarkan angket saat rapat. Pembicaraanya berasal dari bapak wali” (wawancara pada tanggal 26 Februari 2014 pukul 15.19). Peran DISKOMINFO dalam mengundang pihak swasta baru dimulai pada tahun 2013 dan sebelumnya diundang oleh HUMAS dan PROTOKOL, sebagaimana hal tersebut diungkapkan oleh BA selaku Kabid Informasi dari DISKOMINFO, “DISKOMINFO ikutserta misalnya publikasi dan mengundang pihak swasta baru dimulai tahun 2013 karena kantor ini baru terbentuk pada Januari 2013” (wawancara pada tanggal 26 Februari pukul 15.19 WIB). Pemekaran dinas ini dilakukan tahun 2013 pada bulan Januari yang sebelumnya bergabung dengan HUMAS dan PROTOKOL.

Dalam pengundangan rapat aktor swasta terdapat beberapa langkah yang dilalui sebagaimana yang dijelaskan oleh BA selaku Kabid Informasi dari DISKOMINFO yaitu, “Semula diadakan identifikasi swasta oleh pemerintah. Setelah itu akan diketahui siapa saja yang akan diundang dalam rapat koordinasi dengan swasta. Dalam rapat itu masing-masing perwakilan swasta akan diberikan angket yang berisi mengenai kontribusi apa yang bisa diberikan pada SEMIPRO” (wawancara pada tanggal 26 Februari 2014 pukul 15.19 WIB). Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwasannya keterlibatan swasta dalam program ini



FORMULIR PARTISIPASI

A. IDENTITAS :

1. NAMA PERUSAHAAN .....
2. ALAMAT .....
3. NO. TELF PERUSAHAAN .....
4. CONTACT PERSON .....

B. PARTISIPASI SERTA :

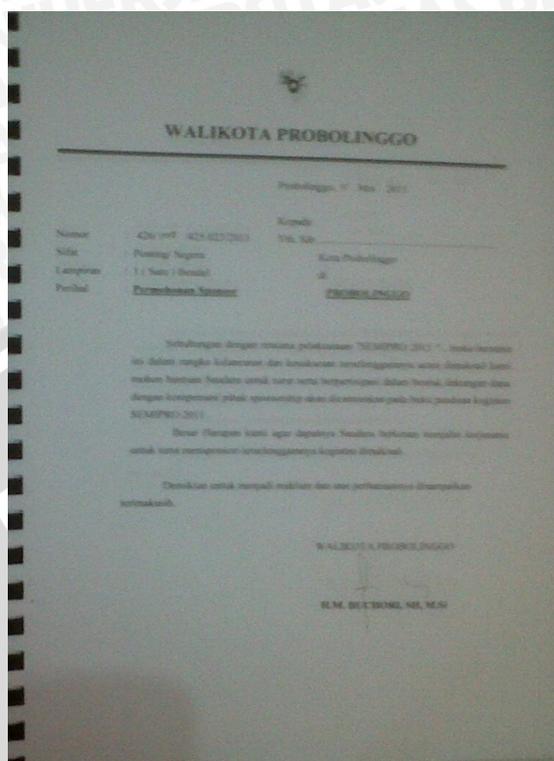
1. HIBURAN .....
2. MUSIK .....
3. PRODUK .....
4. HADIAH .....
5. LAIN - LAIN .....

..... JUNI 2013

KEPALA .....

Gambar 4.8: Formulir Partisipasi  
Sumber: DISKOMINFO

Kedua gambar diatas tersebut menunjukkan bentuk komunikasi yang dilakukan kepada swasta dalam hal permohonan partisipasinya dalam kegiatan program SEMIPRO. Melalui undangan permohonan tersebut pemerintah mengundang swasta untuk terlibat sebagai *sponsorship* untuk program SEMIPRO. Dukungan *sponsorship* yang tercantum dalam gambar tersebut mengenai dukungan dalam bentuk banner, umbul-umbul, spanduk, dan baliho. Himbauan yang dilakukan pemerintah ini dibenarkan oleh beberapa informan dari swasta yaitu BAM dari Bank BNI yang mengungkapkan, “Pemerintah menghimbau kepada kami untuk memasang umbul-umbul dalam rangka memeriahkan program ini” (wawancara pada tanggal 24 Februari 2014 pukul 10.40 WIB).



Gambar 4.9: Permohonan Sponsor

Sumber: Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Koordinator Publikasi dan Dokumentasi SEMIPRO 2011

Permohonan bentuk dukungan *sponsorship* lainnya, pemerintah juga memberikan pemberitahuan mengenai dukungan dana khususnya untuk SEMIPRO 2011 seperti pada gambar 4.9. Permohonan dukungan dana yang dilakukan oleh pemerintah ini dalam rangka kelancaran dan kesuksesan SEMIPRO. Kompensasi yang diberikan oleh pemerintah kepada pihak *sponsorship* yaitu pihak tersebut akan dicantumkan pada buku panduan kegiatan SEMIPRO 2011. Selain itu juga pemerintah memberitahukan kepada swasta khususnya hotel, restoran, *department store/hypermarket/toserba* untuk ikutserta dalam memeriahkan program ini dengan memberikan *Promo Sale (Discount)* selama pelaksanaan kegiatan program ini yaitu selama seminggu, seperti pada gambar berikut ini:



pelaksanaan program. Keikutsertaan swasta sebagai penyedia peralatan dan perlengkapan, tetapi itupun tidak semua swasta terlibat dalam kegiatan besar pemerintah daerah Kota Probolinggo, sebagaimana yang diungkapkan oleh BA sebagai Kabid Informasi dari DISKOMINFO bahwasannya, “Kalau peran swasta itu ada. Namun hanya sebatas bantu buat sumbangan ke kegiatan bukan untuk sumbangan uang, misalnya saja dalam sosialisasi berupa spanduk dari PT. HM Sampoerna, PT. TELKOM, dan PT. KTI” (wawancara pada tanggal 12 Februari 2014 pukul 13.00 WIB). Hal tersebut juga diperkuat dari hasil wawancara BK selaku Sekretaris DISPOBPAP juga mengungkapkan mengenai keterlibatan swasta untuk peralatan dan perlengkapan bahwasannya:

“Beberapa pihak sponsor menyumbang SEMIPRO, seperti Sampoerna menyumbang *sound system* dan *lighting* untuk di Aloon-Aloon selama kegiatan berlangsung. Sedangkan untuk panggunnya disumbang dari pihak KTI. Hotel Bromo View menyumbang acara *Stand Up Comedy* dan perlombaan futsal wanita” (wawancara pada tanggal 20 Februari 2014 pukul 09.19 WIB).

Keterlibatan swasta dalam program ini yaitu dalam dukungan peralatan, perlengkapan dan juga beberapa dukungan dana. Keikutsertaan swasta yang ada di Kota Probolinggo pada SEMIPRO misalnya saja untuk 2013 berjumlah 30 baik dari industri, perhotelan, restoran, dan perbankan (sumber data dari DISKOMINFO). Jumlah yang terlibat dalam program ini tidak sebanding dengan jumlah keseluruhan swasta yang ada di Kota Probolinggo masih terdapat beberapa swasta yang mengaku tidak mengikuti SEMIPRO sebagaimana dijelaskan oleh beberapa informan yang dapat diwawancarai sebagai berikut:

BAM dari wakil perbankan BNI mengatakan bahwasannya,

“Dalam program SEMIPRO ini kita lebih banyak tidak ikut karena merasa tidak ada ruang jika mengikuti SEMIPRO ini. Dan dalam sistem kami *input* dan *output* harus berbanding terbalik yang mana *output* harus lebih besar. Namun untuk partisipasi kami tetap ikut yaitu dalam bentuk pemasangan umbul-umbul di kantor kami yang mana hal itu telah mendapat pemberitahuan dari pemkot” (wawancara pada tanggal 24 Februari 2014 pukul 10.40 WIB).

BAN dari perwakilan Bank BRI mengatakan bahwasannya, “BRI hingga saat ini tidak pernah mengikuti atau berpartisipasi dalam SEMIPRO karena tidak diundang oleh pemerintah. Dan merasa dalam SEMIPRO tidak ada pasar bagi perusahaan kami” (wawancara pada tanggal 24 Februari 2014 pukul 08.30 WIB).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh beberapa industri pada hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 24 sampai dengan 27 Februari 2014 pukul 09.00 WIB yang pada intinya mengatakan hal yang sama yaitu, “Kami tidak pernah diundang dalam SEMIPRO. Dan kami kurang tertarik juga untuk berkontribusi di dalamnya”. Sedangkan BP selaku salah satu seniman Kota Probolinggo menyatakan bahwasannya, “Masyarakat porsinya memang belum banyak tetapi sudah dianggap baik. Aktor masyarakat dalam keterlibatannya belum maksimal karena masih sebatas pengisi acara kegiatan saja yang sudah ditetapkan oleh pemerintah” (wawancara pada tanggal 15 Februari 2014 pukul 12.30 WIB). Hal yang sama juga diungkapkan dari hasil wawancara dengan BK sebagai Sekretaris dari DISPOBPAR Kota Probolinggo menyatakan bahwasannya, “SEMIPRO yang berperan penuh dari SKPD. Peran masyarakat belum maksimal dan tidak begitu kental. Masyarakat sebagai pelaksana kegiatan saja” (wawancara pada tanggal 20 Februari 2014 pukul 09.19). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasannya

tidak terjadinya komunikasi yang bersifat timbal balik dalam program ini karena pemerintah memiliki peran dominan sehingga segala sesuatunya diatur sendiri. Mereka hanya sebatas pelaksana kegiatan yang telah disiapkan sebelumnya oleh pemerintah, sehingga ide dan kreatifitas masyarakat kurang dapat diangkat ke khalayak umum khususnya pada program ini. Pada beberapa program memang pemerintah mengikutsertakan masyarakat contohnya seperti pada kegiatan jaring pendapat masyarakat mengenai pembangunan atau permasalahan suatu wilayah, kegiatan-kegiatan yang berbau budaya seperti kuliner Pendalungan, Arab, dan Cina.

Tidak terjalinnya komunikasi antara masyarakat dan swasta berbanding terbalik dengan kondisi yang mana pemerintah mendatangkan daerah lain untuk ikutserta dalam program ini misalnya saja dalam kegiatan pawai budaya. Datangnya tamu daerah lain menggambarkan bahwasannya terjadinya komunikasi yang baik dan timbal balik antara pemerintah kota Probolinggo dengan daerah lain, hal itu dapat dibuktikan dengan datangnya mereka ke Probolinggo. Hal penolakan datangnya daerah lain diungkapkan oleh BK selaku Sekretaris DISPOBPAR yaitu,

“Pemerintah mengundang daerah lain tetapi kenapa masyarakat tidak diberdayakan? Masyarakat hanya sebagai penonton saja misalnya dalam acara pawai budaya. Kota Probolinggo memiliki 29 kelurahan dan ratusan lembaga pendidikan baik tingkat dasar, menengah, dan atas. Jika itu diberdayakan untuk menampilkan ke-Probolinggoan akan menjadi kekuatan raksasa” (wawancara pada tanggal 20 Februari 2014 pukul 09.19 WIB).

Dengan datangnya tamu dari daerah lain bisa diamini ketika masyarakat dalam daerah sendiri cukup banyak untuk dilibatkan. Datangnya tamu undangan

tersebut, maka pemerintah harus mengeluarkan uang lebih dari APBD dalam rangka membiayai tamu tersebut, hal itu diperkuat dengan ungkapan dari BK selaku Sekretaris DISPOBPAR yaitu,

“SEMIPRO dibiayai oleh APBD Kota Probolinggo. Anggaran daerah ini seharusnya digunakan untuk warga kota ini juga. Namun kenapa pemerintah mengundang daerah lain lalu mereka dibaya menggunakan dengan APBD kita. Hal itu sangat terbalik. Sampai kapan SEMIRPO bisa bertahan jika seperti itu terus terjadi? Atau sampai ambruknya APBD?” (wawancara pada tanggal 20 Februari 2014 pukul 09.19 WIB).

Hasil wawancara dari tersebut dapat dipahami yang ini didasarkan atas kekhawatiran atas penggunaan APBD yang kurang tepat sasaran. APBD yang digunakan untuk membiayai daerah lain akan mampu menyerap pengeluaran yang lebih kecuali memang pengeluaran itu untuk melakukan pembiayaan kepada warganya sendiri. Jika hal itu terus terjadi maka nantinya APBD Kota Probolinggo akan *jebol* dan sama saja pemerintah terkesan lebih memberikan kesempatan kepada daerah lain sebagaimana diungkapkan oleh beberapa pelaku seni Kota Probolinggo bahwasannya, “Buat apa terlalu banyak mengundang daerah lain, daerah sendiri saja belum dimanfaatkan” (wawancara pada tanggal 22 Februari 2014 pukul 09.00 WIB). Namun nada penerimaan tentang diundangnya tamu daerah lain datang dari BEH selaku Kasi Pemberdayaan Budaya dari DISPOBPAR mengungkapkan bahwasannya, “Datangnya tamu daerah lain maka akan terjadi pertukaran budaya antar daerah dan masyarakat kita menjadi mengerti budaya-budaya daerah lain” (wawancara pada tanggal 20 Februari 2014 pukul 11.00 WIB). Atas nama pertukaran budaya daerah memang harus dilakukan namun seyogyanya bisa untuk program yang lain. Hal ini dikarenakan esensi dasar program SEMIPRO itu sendiri yaitu,

“Sejarah *even* SEMIPRO diawali dari sebuah ide dan gagasan untuk menciptakan daya tarik Kota Probolinggo lebih berkualitas. Dengan mengidentifikasi berbagai potensi daerah, mulai dikumandangkan perlu adanya sebuah *even* khusus yang mampu membentuk ciri khas Kota Probolinggo. Maka dibentuklah sebuah *even* SEMIPRO”. (<http://dispobpar.probolinggokota.go.id> diakses pada tanggal 21 Februari 2014).

Esensi dasar dari program SEMIPRO untuk menciptakan daya tarik Kota Probolinggo dengan budaya dan potensi daerah yang dimiliki lebih berkualitas. Sedangkan dengan menghadirkan daerah lain yang membawa kesenian yang dimiliki artinya sama saja dengan memperkenalkan budaya daerah lain. Keterlibatan *stakeholders* dalam daerah dulu yang seharusnya dimaksimalkan kemudian baru melangkah untuk mengundang daerah lain. Dengan demikian hal tersebut keluar dari esensi dasar munculnya program SEMIPRO ini.

#### b. Koordinasi

Membangun sinergitas selain melalui cara komunikasi juga dapat melalui koordinasi. Menurut Pearce dan Robinson (dalam silalahi 2011:217), “koordinasi adalah integrasi dari kegiatan-kegiatan individual dan unit-unit ke dalam satu usaha bersama yaitu bekerja kearah tujuan bersama”. Dengan demikian dalam penelitian ini yang dimaksud dengan koordinasi merupakan suatu integrasi kegiatan-kegiatan yang terjadi antar *satkeholders* ke dalam satu usaha bersama ke arah tujuan bersama. Tripathi dan Reddy dalam Moekijat (1994:39) menyebutkan bahwa ada 9 (sembilan) syarat untuk mewujudkan koordinasi yang efektif, yaitu

1) Hubungan langsung

Bahwa koordinasi dapat lebih mudah dicapai melalui hubungan pribadi langsung.

2) Kesempatan awal

Koordinasi dapat dicapai lebih mudah dalam tingkat-tingkat awal perencanaan dan pembuatan kebijaksanaan.

3) Kontinuitas

Koordinasi merupakan suatu proses yang kontinu dan harus berlangsung pada semua waktu mulai dari tahap perencanaan.

4) Dinamisme

Koordinasi harus secara terus-menerus diubah mengingat perubahan lingkungan baik intern maupun ekstern.

5) Tujuan yang jelas

Tujuan yang jelas itu penting untuk memperoleh koordinasi yang efektif.

6) Organisasi yang sederhana

Struktur organisasi yang sederhana memudahkan koordinasi yang efektif.

7) Perumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas

Wewenang yang jelas tidak hanya mengurangi pertentangan di antara pegawai-pegawai yang berlainan, tetapi juga membantu mereka dalam pekerjaan dengan kesatuan tujuan.

8) Komunikasi yang efektif

Komunikasi yang efektif merupakan salah satu persyaratan untuk koordinasi yang baik.

9) Kepemimpinan supervisi yang efektif

Kepemimpinan yang efektif menjamin koordinasi kegiatan orang-orang, baik pada tingkat perencanaan maupun pada tingkat pelaksanaan.

Koordinasi dapat tercipta jika terdapat jalinan komunikasi yang baik antar *stakeholders* yang terlibat, sebagaimana yang diungkapkan oleh Myers & Myers (dalam Hasan 2005:18) yang menyatakan bahwasannya dalam komunikasi dibutuhkan koordinasi, begitu juga dalam program ini. Koordinasi yang terjadi dalam program ini dari masing-masing *stakeholders* yaitu melalui cara sebagaimana yang dijelaskan oleh BEH selaku Kasi Pemberdayaan Budaya dari DISPOBPAR Kota Probolinggo, “Mereka setelah diundang akan dikumpulkan untuk membahas mengenai keterlibatan mereka dalam SEMIPRO tersebut” (wawancara pada tanggal 20 Februari 2014 pukul 11.00 WIB). Pengumpulan yang dilakukan oleh pemerintah kepada komunitas-komunitas ini untuk lebih memantapkan program agar berjalan sukses. Sedangkan BD selaku Kabid Dalit BAPPEDA yang mengungkapkan bahwasannya, “DISKOMINFO yang mengorganisir dan mengkoordinir swasta” (wawancara pada tanggal 15 Februari 2014 pukul 09.55 WIB). Hal yang serupa diungkapkan oleh BI selaku Kasi Pengembangan Pariwisata dari DISPOBPAR, “Keterlibatan swasta untuk ikut berpartisipasi dalam acara SEMIPRO dikumpulkan oleh DISKOMINFO” (wawancara pada tanggal 11 Februari 08.36 WIB). Dari hasil data di lapangan melalui hasil wawancara kepada beberapa informan bahwasannya tidak terjalannya koordinasi dalam program ini. Hal tersebut dapat dilihat dari yang dilakukan pemerintah yaitu hanya melakukan integrasi bantuan atau kontribusi

dari masing-masing *stakeholders*. Dengan demikian pemerintah hanya melakukan integrasi dalam hal ini maksudnya pengumpulan bantuan tidak integrasi kegiatan dari masing-masing *stakeholders* tersebut.

### C. Pembahasan Data Fokus Penelitian

1. Gambaran Program Seminggu di Kota Probolinggo (SEMIPRO)
  - a. Kegiatan-kegiatan dalam Program Seminggu di Kota Probolinggo (SEMIPRO)

Seminggu di Kota Probolinggo atau yang dikenal oleh khalayak umum sebagai SEMIPRO merupakan suatu usaha pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Probolinggo yang awalnya dimulai pada tahun 2009 yaitu pada masa H.M. Buchori, hingga tahun 2013 program ini telah dilaksanakan sebanyak lima kali. SEMIPRO merupakan suatu program baru namun juga pengganti dari program sebelumnya yaitu KOBUDA (Kontes Busana Daun) yang mana program itu telah menuai banyak kritik dari berbagai pihak sehingga pemerintah menggantinya dengan program SEMIPRO yang membawa misi sama dengan KOBUDA namun tampilannya lebih variatif. Cara baru yang dilakukan oleh pemerintah daerah ini dapat dikatakan sebagai suatu inovasi, yang mana hal itu senada dengan Rogers (2003:12) yang menjelaskan bahwa, “inovasi adalah sebuah ide, praktek, atau objek yang dianggap baru oleh individu (satu unit) tertentu dan diadopsi oleh yang lainnya”. Yogi (dalam Noor (2013:87)) mengungkapkan bahwasannya, inovasi tidak akan lepas dari beberapa hal salah satunya yaitu: dapat sebuah cara baru, “Inovasi dapat berupa sebuah cara baru

bagi individu atau sekelompok orang untuk memenuhi kebutuhan atau menjawab masalah tertentu. Cara baru ini merupakan pengganti cara lama yang sebelumnya berlaku”. Dengan demikian inovasi merupakan suatu ide atau cara baru yang digunakan untuk menjawab permasalahan tertentu dan cara baru tersebut bisa juga merupakan cara lama namun dikemas dengan sesuatu yang baru. Hal ini sesuai dengan salah satu program pemerintah daerah Probolinggo. Program ini merupakan solusi atas masalah yang dihadapi khususnya dalam bidang pariwisata. Wisata-wisata yang ada di Kota Probolinggo untuk wisata alam kurang mendukung untuk dikembangkan, sedangkan untuk menambah lokasi wisata wisata hal tersebut kemungkinannya kecil karena lokasi kota ini yang tidak terlalu luas namun disisi lain daerah ini memiliki budaya yang khas dan menarik.

Kekayaan budaya dan kreatifitas yang dimiliki diperkenalkan kepada khalayak umum oleh Kota Probolinggo melalui suatu program rutin dilaksanakan tiap tahunnya yang biasa dikenal dengan Seminggu di Kota Probolinggo (SEMIPRO). Munculnya program SEMIPRO sebagai suatu program inovasi telah melalui proses inovasi sebagaimana hal tersebut dalam Noor (2013:13) yang menyatakan bahwasannya proses inovasi merupakan suatu siklus yang terdiri dari empat komponen yaitu *idea generations*, *idea selection*, *idea implementation*, *idea diffusion*. Dinamakannya SEMIPRO ini pemerintah telah melakukan beberapa survey dan menelaah program-program inovasi daerah lain. Setelah disetujuinya program ini barulah kemudian diimplementasikan pada tahun 2009. SEMIPRO ini merupakan program inovasi dari pemerintah yang lebih tepatnya berbentuk adoptif yaitu yang dikemukakan oleh Thomas R. Hutaeruk (2010),

“Inovasi yang bersumber pada program yang sebelumnya telah ada, dan dinilai cukup berhasil oleh pemerintah daerah. Untuk selanjutnya ditiru seutuhnya atau diambil sebagian dari program tersebut dengan nama program yang sama atau nama baru. Yang membedakan hanya sumber dan alokasi pembiayaan, serta penanggung jawab kegiatan”.

SEMIPRO muncul dari adanya kritik atas program sebelumnya yaitu KOBUDA yang dicetuskan tahun 2008. Dengan demikian pemerintah merencanakan program baru yang hampir sama dengan program lama. Kemunculan program baru ini didalamnya masih terkandung unsur program lama. Sedangkan untuk penanggung jawab dan alokasi pembiayaan sama dengan program yang lama yaitu tanggung jawab dari pemerintah khususnya dalam hal ini Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya, dan Pariwisata (DISPOBPAR) Kota Probolinggo. Namun dalam pelaksanaannya melibatkan semua SKPD yang ada dalam jajaran pemerintah daerah Kota Probolinggo. Perpaduan beberapa komponen dalam inovasi sebagaimana yang diungkapkan oleh Theodore Leviit (2002) dalam Noor (2013) bahwasannya dalam inovasi terdapat perpaduan dari lima komponen, antara lain:

- a. *Strategy and Customers*: pemerintah daerah harus tahu kapan, dimana dan bagaimana inovasi itu dilakukan. Jika dilihat dalam pelaksanaan SEMIPRO bahwasannya pemerintah mengembangkan kepariwisataan melalui program ini agar warganya tidak lagi meluangkan waktu untuk menikmati hiburan di luar kota. Oleh karena itu pemerintah mengetahui momentum yang tepat dalam pelaksanaan program ini yaitu saat liburan sekolah agar warganya tidak menghabiskan waktunya di luar Probolinggo. Tempat pelaksanaan pun tersebar dalam beberapa lokasi Kota Probolinggo

dan pemerintah menyiapkan kegiatan-kegiatan yang menarik untuk dinikmati sehingga warganya tertarik untuk datang ke lokasi-lokasi yang sudah ditentukan.

- b. *Measures and Performances* yaitu harus diketahui bagaimana mengukur keberhasilan inovasi yang dilakukan. Jika dikaitkan dengan program ini maka SEMIPRO diharapkan Kota Probolinggo tidak lagi hanya sebagai daerah transit dan banyak wisatawan yang datang untuk berkunjung ke daerah ini, peningkatan pada PAD dan kesejahteraan masyarakatnya yang mana hal tersebut sesuai dengan misi dari dilaksanakannya program ini. Namun pada kenyataannya tidak ada ukuran yang digunakan oleh pemerintah untuk mengukur keberhasilan inovasi ini. Dari segi PAD pun program ini tidak memberikan kontribusi pada keuangan daerahnya.
- c. *Process and Infrastructure*, apakah inovasi yang dilakukan bersifat sementara atau menjadi bagian yang tak terpisahkan dari organisasi. SEMIPRO dilakukan mulai tahun 2009 dan pemerintah daerah memutuskan bahwasannya program ini merupakan program rutinitas tahunan Kota Probolinggo hingga tahun 2013. Keberlangsungan SEMIPRO tergantung pada pejabat yang memimpin saat itu karena program ini tidak masuk dalam peraturan daerah yang diharuskan untuk melaksanakannya tiap tahun. Dengan demikian tidak dapat dikatakan bahwasannya program ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari organisasi.

- d. *People*, bagaimana budaya organisasi yang ada di dalam memahami inovasi tersebut. Budaya organisasi dalam pemerintah kota Probolinggo belum paham akan inovasi. Pemahaman inovasi masih sebatas pada pucuk pimpinan sehingga etos kerja masing-masing anggota organisasi masih jauh untuk menuju kategori tindakan inovatif dan cenderung bermalasan.
- e. *Technology*, bagaimana pemanfaatan alat dalam berinovasi. Alat dalam artian ini yaitu teknologi yang dimanfaatkan dalam berinovasi. SEMIPRO ini merupakan inovasi di bidang pariwisata pada kenyataan di lapangan tidak memanfaatkan teknologi dalam pelaksanaan program.

Program pengembangan pariwisata yang diluncurkan ini tidak memenuhi beberapa komponen dalam inovasi. Selain itu juga program ini tidak memenuhi beberapa dimensi kemampuan inovasi yaitu unsur manajemen gagasan kreativitas dan manajemen teknologi sebagaimana yang dijelaskan oleh Asropi (2008). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasannya SEMIPRO yang merupakan program yang dilakukan biasanya saat liburan sekolah ini tidak bisa digolongkan dalam suatu program inovasi meskipun secara pengertian memenuhi salah satu unsur inovasi yaitu merupakan pengganti cara lama yang sebelumnya telah berlaku (Yogi dalam Noor (2013:87)). Program SEMIPRO menggantikan KOBUDA namun dalam kenyataannya unsur-unsur KOBUDA semakin dihilangkan. Diakui bahwasannya KOBUDA ini dulunya menuai banyak kritikan tetapi jika diperbaiki maka semakin lebih baik. Jadi dapat dipahami bahwasannya

SEMIPRO yang dianggap sebagai inovasi tidak memenuhi atribut dalam inovasi khususnya bagian kesesuaian sebagaimana dalam Abdullah (2012).

Setiap tahunnya program ini mengusung tema yang berbeda-beda dan lokasi SEMIPRO berbeda-beda tiap tahunnya tergantung dari kegiatan itu sendiri. SEMIPRO memiliki visi, misi tujuan dan sasaran yang hampir tiap tahun ada. Keempat hal tersebut merupakan harapan-harapan yang digantungkan kepada program ini. Pada intinya program ini membawa harapan pemerintah yaitu untuk memperkenalkan kota Probolinggo yang memiliki pesona budaya dan beberapa khas menarik lainnya. Dikarenakan kota ini terkadang hanya sebagai transit perjalanan bagi mereka yang misalnya hendak ke Gunung Bromo, Jember, dan Bali. Dengan diselenggarakannya program ini maka mereka akan tertahan sebentar untuk melihat program ini melalui beberapa kegiatan yang disuguhkan.

Jumlah kegiatan yang mengisi SEMIPRO pun beragam tiap tahunnya yaitu pada tahun 2009 setidaknya terdiri dari 30 macam kegiatan, pada tahun 2010 sekitar 35 kegiatan, pada tahun 2011 terdiri dari 84 kegiatan, tahun 2012 terdapat 75 kegiatan, dan untuk tahun 2013 sekitar 50 kegiatan. Program yang dilaksanakan oleh pemerintah ini cenderung mengalami peningkatan jumlah kegiatan yang disajikan kepada masyarakat luas, sedangkan untuk tahun 2013 terdapat penurunan jumlah kegiatan. Berbagai kegiatan yang disajikan diantaranya olahraga, kesenian, kuliner, kontes/festival/lomba, pameran, pawai, KANCABA, dan lain-lain.

Namanya saja Seminggu di Kota Probolinggo sehingga seminggu penuh terdapat beberapa kemeriahan di beberapa lokasi SEMIPRO yang telah

ditentukan. Jumlah kegiatan yang besar dan lokasi pelaksanaan di beberapa titik cukup dikhawatirkan untuk beberapa tahun ke depan. Hal ini dikarenakan jumlah kegiatan yang semakin banyak maka akan semakin banyak pula uang yang harus dikeluarkan. Dengan demikian pemerintah lebih memaparkan beberapa kegiatan dan merencanakan kegiatan yang sesuai dengan esensi dasar dari SEMIPRO sehingga kegiatan yang disajikan lebih menekankan pada budaya lokal dan ikon kota Probolinggo. Terdapat 50 kegiatan dalam satu minggu, itu artinya dalam satu hari terdapat enam kegiatan mulai pagi pukul 08.00 pagi sampai malam. Terasa sia-sia jika pemerintah menghadirkan kegiatan di pagi hari karena masyarakat pun memiliki kesibukan di pagi hari. Sehingga kegiatan yang ditampilkan di pagi hari akan sepi penonton. Hal ini didapatkan ketika melakukan pengamatan pada beberapa kegiatan SEMIPRO. Lokasi yang terlalu banyak dalam pelaksanaan SEMIPRO ini harusnya dikaji ulang oleh pemerintah. Banyaknya titik-titik lokasi pelaksanaan SEMIPRO semakin membuat bingung masyarakat dan terkadang lokasi yang dipilih oleh pemerintah jauh dari jangkauan angkutan umum sehingga bagi mereka yang tidak memiliki kendaraan tidak bisa datang untuk melihat. Dengan demikian titik lokasi yang dipilih selain jumlahnya sedikit juga yang mudah dijangkau oleh angkutan umum.

b. Aktor yang Terlibat dalam Program Seminggu di Kota Probolinggo (SEMIPRO)

Dalam tata pemerintahan atau yang biasa disebut dengan *governance* diharuskan adanya interaksi antar *stakeholders* yaitu pemerintah, masyarakat, dan swasta. Hal ini berarti dalam mengelola pemerintahan daerahnya, pemerintah

bukanlah aktor tunggal untuk mengatur segalanya. Pemerintah haruslah berbagi kekuasaan dengan *stakeholders* lainnya yang mana hal tersebut sesuai dengan karakteristik dari otonomi daerah yang diungkapkan oleh Priyatmoko dalam Mongid (2000:15). Tidak hanya dalam *governance* dan otonomi daerah tetapi juga terdapat dalam inovasi yang menyebutkan bahwasannya perlu untuk melibatkan banyak aktor. Ikutsertanya aktor lain artinya memberikan kesempatan kepada mereka dalam jalannya pemerintahan begitu juga harusnya dalam program SEMIPRO dengan asumsi bahwasannya pemerintah memiliki keterbatasan baik untuk dana ataupun *skill* dalam mengelola program yang didalamnya terdapat berbagai kegiatan. Namun pada kenyataannya dalam program SEMIPRO ini pemerintah tidak mengikutsertakan *stakeholders* lainnya.

Pemerintah kota Probolinggo bertindak dominan dalam mengatur dan mengelola program ini, hal itu dapat dilihat dari SK Kepanitiaan program SEMIPRO yang mana masih didominasi oleh pemerintah yaitu melalui SKPD-SKPD yang ada. Dalam kepanitaan melibatkan semua SKPD di lingkungan pemkot Probolinggo yang berjumlah 44 tersebut. Keseimbangan ketiga aktor dalam program SEMIPRO ini belum begitu nampak. Namun disisi lain pemerintah pada beberapa kegiatan mendatangkan tamu dari daerah lain untuk ikutserta memeriahkan program ini. Hal ini sebenarnya amat disayangkan ketika pemerintah harus menggunakan sumberdaya dari daerah lainnya bukannya dari dalam daerahnya. Dengan alasan apapun itu seharusnya masyarakat bukanlah aktor pendamping dan objek dari program. Dari tahun ke tahun pelaksanaan program SEMIPRO, masyarakat Kota Probolinggo kurang nampak

keterlibatannya dan harus kalah bersaing dengan masyarakat luar dan pendatang baik itu dari para PKL, UKM, bahkan para pengisi kegiatan. Kota Probolinggo memiliki paguyuban Kang dan Yuk Kota Probolinggo, Putri Lingkungan dan Duta lainnya, namun mereka tidak diperankan dalam program ini. Disamping itu juga pemerintah kurang melibatkan lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Kota Probolinggo untuk ikutserta memeriahkan program ini. Sumber-sumber yang dimiliki pemerintah sebenarnya banyak namun sepertinya pemerintah lebih senang menggunakan bintang tamu dari luar kota. Jika pemerintah menggunakan masyarakat lokalnya, para siswa-siswi, dan duta-duta yang dimiliki, betapa besarnya kemeriahan program ini dan menjadi kekuatan raksasa bagi pemerintah. Selain kurang terlibatnya masyarakat, pemerintah juga kurang melibatkan swasta dalam pelaksanaan program ini. Keikutsertaan swasta dalam program ini seharusnya merupakan tambahan kekuatan pemerintah untuk mensukseskan program ini. Namun kenyataan dalam pelaksanaan program masih banyak swasta yang belum nampak keterlibatannya. Tidak ikutnya masyarakat dan swasta untuk terlibat dalam program ini artinya pemerintah tidak memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada mereka. Hal ini menggambarkan pemerintah kota Probolinggo birokrasi yang birokratis dan cenderung tertutup.

c. Sumber Pembiayaan dalam Program Seminggu di Kota Probolinggo  
(SEMIPRO)

Otonomi daerah diterapkan membawa konsekuensi bagi daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan pada aspirasi-aspirasi masyarakatnya untuk kesejahteraan masyarakatnya juga. Urusan-urusan

pemerintahan menjadi hak sepenuhnya bagi daerah kecuali beberapa urusan yang masih menjadi kewenangan pusat, antara lain: bidang politik, pertahanan dan keamanan (hankam), peradilan, moneter, keuangan, dan agama. Terdapat tiga asas dalam pelaksanaan otonomi daerah, yaitu desentralisasi, dekosentrasi, dan tugas pembantuan. Asas-asas tersebut yang mendasari dilakukannya penyerahan urusan di daerah. Daerah otonom dalam melaksanakan kewenangannya memerlukan pembiayaan yang mana hal tersebut bersumber dari uang rakyat. Dana-dana yang berasal dari rakyat tersebut terhimpun dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Nasional/Daerah (APBN/D). Kota Probolinggo merupakan salah satu daerah otonom di Jawa Timur. Gelar yang disandang tersebut membawa konsekuensi bagi daerah ini untuk mandiri dalam mengurus rumah tangganya termasuk dalam pelaksanaan program-program yang telah direncanakan. Pembiayaan yang dilakukan untuk program-program yang dimiliki pemerintah kota Probolinggo khususnya dalam hal ini program Seminggu di Kota Probolinggo (SEMIPRO) berasal dari dana rakyat (APBD). APBD Kota Probolinggo berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan pendapatan lain-lain yang sah meliputi hibah, dana bagi hasil pajak dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, dan bantuan keuangan dari provinsi atau daerah lainnya.

Program SEMIPRO yang menjadi andalan dan merupakan program unggulan pemerintah kota Probolinggo ini dibiayai oleh APBD. Hasil wawancara tidak dapat memberikan dan menunjukkan data besarnya uang yang dikeluarkan oleh daerah untuk membiayai program ini dengan alasan merupakan data yang

bersifat rahasia. Kemeriahan dalam program SEMIPRO saat dilakukan observasi cukup menggambarkan bahwasannya biaya yang dikururkan dalam jumlah yang tidak sedikit. Dari data dokumentasi yang dimiliki oleh peneliti saat menjadi surveyor SEMIPRO 2013 menunjukkan bahwasannya biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 2.516.067.653,00. Sedangkan untuk biaya publikasi SEMIPRO 2013 peneliti juga tidak mendapatkan data dalam bentuk wawancara atau laporan-laporan terkait, namun peneliti mendapatkan data untuk SEMIPRO 2012. Berdasarkan Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Koordinator Publikasi dan Dokumentasi SEMIPRO 2012 uang yang keluar untuk membiayainya yaitu berkisar Rp 134.950.000. Dana itu disebutkan dalam laporan digunakan untuk media cetak, elektronik dan online. (Jumlah uang itu belum termasuk publikasi pada media tercetak yang dimiliki Humas dan Protokol dan media luar ruang yaitu publikasi pada beberapa kabupaten/kota tetangga Probolinggo meliputi Kota/Kab.Pasuruan, Kota/Kab.Malang, Kab.Probolinggo, Kab.Situbondo, Kab.Bondowoso, Kab.Banyuwangi, Kab.Jember, Kab.Lumajang, Kota Batu dan Kota Malang). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasannya jumlah dana yang digunakan untuk membiayai SEMIPRO sebesar Rp 2,6 hingga 2,7 Milyar dari APBD Kota Probolinggo. Dana yang terbilang cukup besar untuk membiayai satu program saja. Hal ini bertolak belakang jika melihat keuangan daerah yang selalu mengalami defisit, namun pemerintah menghamburkan uang dengan asumsi dari pemerintah untuk meningkatkan PAD dan mensejahterakan rakyat. Kenyataan di lapangan dengan asumsi pemerintah ini sangat bertentangan yang mana program ini hanya menghabiskan uang rakyat bukannya memberikan

kesejahteraan rakyat. Jadi seyogyanya antara input dan output tersebut ada keseimbangan, bukannya mengarahkan pemerintah sebagai organisasi nirlaba namun sangat disayangkan ketika pemerintah dengan mudahnya mengeluarkan dana rakyat sebesar tersebut tanpa mengetahui timbalbalik yang diterimanya. Hal itu dapat dilihat dari tidak adanya evaluasi yang dilakukan oleh pemkot untuk dirinya sendiri. Pemerintah terlalu sibuk untuk mengevaluasi rakyatnya sehingga lupa untuk mengevaluasi dirinya sendiri khususnya saja dalam penggunaan dana untuk program SEMIPRO. Selain itu juga sikap pemerintah yang mengundang daerah lain untuk ikutserta memeriahkan SEMIPRO. Kedatangan mereka ke Probolinggo cukup jelas membutuhkan biaya yang cukup banyak yang hal itu jelas dibiayai oleh pemerintah Kota Probolinggo sehingga semakin menambah beban keuangan yang harus dikururkan.

Berdasarkan hasil analisis bahwasannya pemerintah kota Probolinggo tidak memenuhi beberapa unsur dalam *good governance*. Hal itu dapat dilihat dari sikap ketidaktransparan yang ditunjukkan oleh beberapa informan penelitian yang merupakan perwakilan beberapa PNS di kota ini yang tidak mau untuk memberitahukan jumlah dana yang dikeluarkan. Padahal dana yang digunakan ini dananya rakyat yang harusnya ada akses kepada rakyat untuk mengetahui jumlahnya. Pemerintah juga bertindak tidak efisien dan efektif dalam menggunakan sumber daya yang dimiliki, hal tersebut dapat dilihat dalam pembiayaan untuk program SEMIPRO yang di dalamnya terdapat beberapa kegiatan. Kegiatan yang disajikan ini kurang efektif jika dilaksanakan pada pagi hari, sepertinya pemerintah kurang paham waktu-waktu tertentu yang tepat untuk

melaksanakan kegiatan-kegiatan itu. Pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang harusnya dilakukan dan diberitahukan kepada masyarakat, namun pada kenyataannya hal itu tidak terjadi. Dalam suatu tata pemerintahan dikatakan baik jika memenuhi sembilan syarat sebagaimana yang diungkapkan oleh UNDP dalam LAN. Disamping tidak memenuhi unsur tata pemerintahan yang baik, pemerintah kota ini juga tidak dapat mencapai tujuan dari program ini sebagaimana yang telah ditetapkan. Kesejahteraan rakyat yang menjadi visi kota Probolinggo tahun 2014 tidak dapat tercapai. Peningkatan PAD yang diharapkan oleh pemerintah seperti tidak dapat terwujud, yang terjadi kenyataannya pemerintah menghamburkan uang sebanyak itu. Padahal APBD digunakan untuk membiayai program-program yang ujung-ujungnya untuk kesejahteraan rakyat, namun nyatanya pemerintah salah sasaran. Pembiayaan ini digunakan sebatas membiayai urusan-urusan pemerintah seperti SEMIPRO ini karena program ini dijadikan pemerintah sebagai salah satu program pengembangan pariwisata, yang mana kepariwisataan ini menjadi urusan kewenangan daerah otonom Probolinggo.

## 2. Sinergitas *Stakeholders* dalam Program Seminggu di Kota Probolinggo (SEMIPRO)

Program SEMIPRO yang ditujukan untuk mengembangkan pariwisata dan kesejahteraan masyarakat ini harusnya melibatkan unsur-unsur tata pemerintahan yang baik. Selain itu juga harusnya ada sinergi diantara *stakeholders* tersebut. Sinergi yang terjadi dalam suatu program menjadi bagian terpenting untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan hasil yang lebih

besar. Sinergi dalam pelaksanaan suatu program merupakan bagian terpenting untuk mensukseskan program itu.

a. Komunikasi

Adanya kesinergian dalam program SEMIPRO yang dapat dilihat melalui dua cara yaitu komunikasi dan kordinasi. Dalam rangka menghasilkan hubungan yang sinergi maka harus menciptakan komunikasi dan koordinasi yang baik, karena pada dasarnya sinergitas akan terjadi apabila terjadi koordinasi dan komunikasi yang baik antara keduanya. Komunikasi tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya koordinasi seperti yang dinyatakan oleh Myers & Myers dalam komunikasi dibutuhkan koordinasi (dalam Hasan 2005:18). Oleh karena itu dalam pelaksanaan suatu program agar berjalan sukses diperlukannya komunikasi dan koordinasi. Komunikasi merupakan cara yang digunakan sumber untuk menyampaikan informasi dan kemudian si penerima pesan memberikan rangangan atas informasi yang disampaikan. Munculnya rangangan ini artinya adanya timbal balik dari si penerima sehingga terjadilah pertukaran informasi. Informasi, ide, dan gagasan bahwasannya akan ada SEMIPRO disampaikan pemerintah kepada *stakeholders* lainnya. Penyampaian yang dilakukan ini melalui undangan rapat dan kemudian dikumpulkan dalam suatu acara rapat. Dari undangan tersebut mereka yang datang melaksanakan perintah-perintah yang telah disampaikan tanpa adanya timbal balik atas informasi dan perintah yang diberikan. Tidak ada timbal balik dan pertukaran informasi antara pemerintah, masyarakat, dan swasta dikarenakan pemerintah masih mendominasi pelaksanaan program SEMIPRO sehingga komunikasi menjadi satu arah (*one-way*). Kurang

terjalannya komunikasi antara pemerintah dengan *stakeholders* maka fungsi komunikasi pun tidak tercapai sebagaimana yang telah disebutkan oleh Hasan (2005:22) yang meliputi: mencapai pengertian satu sama lain, membina kepercayaan, mengkoordinir tindakan, merencanakan strategi, melakukan pembagian pekerjaan, melakukan aktivitas kelompok, dan berbagi rasa. Selain itu juga tidak dapat mencapai sinergitas yang terjadi antar *stakeholders* tersebut.

Dalam sinergitas harus dibangun dan diciptakan melalui komunikasi yang efektif. Namun hasil observasi dan hasil wawancara di lapangan menunjukkan bahwasannya komunikasi yang terjalin dalam program SEMIPRO tidak efektif karena tidak ada timbal balik dari penerima, tidak adanya dialog atau diskusi yang terjadi sehingga tidak memunculkan pertukaran informasi. Komunikasi yang dilakukan pemerintah yang lain yaitu melalui sosialisasi. Bentuk komunikasi yang dilakukan pemerintah ini pada SEMIPRO 2013 mengalami keterlambatan karena baru dilakukan pada bulan Maret atau April. Padahal program ini akan dilaksanakan pada bulan Juni. Mepetnya waktu sosialisai dengan pelaksanaan akan mempengaruhi pada pelaksanaan program itu sendiri. Dengan demikian menggambarkan bahwasannya komunikasi yang terjalin pun kurang begitu efektif dan interaktif sehingga masih bersifat satu arah. *Feedback* dalam komunikasi pada program SEMIPRO tidak terlihat dan didominasi oleh pemerintah kota Probolinggo. Inefektif komunikasi yang terjadi akan mempengaruhi koordinasi dalam sebuah program yang juga berakibat mempengaruhi sinergitas yang terjadi.

## b. Koordinasi

Sinergitas yang dibangun selain komunikasi juga perlu adanya koordinasi. Koordinasi merupakan suatu integrasi kegiatan-kegiatan yang terjadi antar *satkeholders* ke dalam satu usaha bersama ke arah tujuan bersama. Dalam SEMIPRO koordinasi diperlukan antar *stakeholders* untuk mencapai tujuan dari program ini. Tripathi dan Reddy dalam Moekijat (1994:39) menyebutkan bahwa ada 9 (sembilan) syarat untuk mewujudkan koordinasi yang efektif, yaitu

### 1) Hubungan langsung

Bahwa koordinasi dapat lebih mudah dicapai melalui hubungan pribadi langsung. Dalam program ini tidak terlihat adanya hubungan langsung antara pemerintah dengan masyarakat dan swasta. Pemerintah bertindak dominan sehingga kesempatan untuk adanya hubungan langsung dengan masyarakat dan swasta ini kurang.

### 2) Kesempatan awal

Koordinasi dapat dicapai lebih mudah dalam tingkat-tingkat awal perencanaan dan pembuatan kebijaksanaan. Koordinasi yang terjalin dalam hal perencanaan program hanya pada lingkup pemerintah saja. Masyarakat dan swasta tidak diajak untuk *rembug* rencana program SEMIPRO. Hal ini dapat dilihat dalam kepanitiaan SEMIPRO yang melibatkan semua jajaran pemerintahannya sehingga koordinasi yang ada pun hanya dalam lingkup SKPD terkait. Tersedianya ruang untuk masyarakat dan swasta masih sangat kecil bisa ditembus.

### 3) Kontinuitas

Koordinasi merupakan suatu proses yang kontinu dan harus berlangsung pada semua waktu mulai dari tahap perencanaan. Keberlanjutan yang terjadi tidak nampak karena pemerintah berperan seorang diri sehingga tidak memungkinkan akan muncul suatu kontinuitas. Meskipun ada keterlibatan masyarakat dan swasta hanya sebatas lingkup pelaksanaan saja.

### 4) Dinamisme

Koordinasi harus secara terus-menerus diubah mengingat perubahan lingkungan baik intern maupun ekstern.

### 5) Tujuan yang jelas

Tujuan yang jelas itu penting untuk memperoleh koordinasi yang efektif. SEMIPRO memiliki tujuan yang jelas yang tertuang dalam visi dan misinya. Melalui kegiatan yang disajikan dalam program ini dengan menggali dan memberdayakan potensi seni dan pariwisatanya merupakan cara untuk menjadikan Probolinggo sebagai daerah tujuan wisata di Jawa Timur merupakan salah satu tujuannya. Selain berdayanya pariwisata, pemerintah berharap nantinya berujung pada pemberdayaan masyarakatnya.

### 6) Organisasi yang sederhana

Struktur organisasi yang sederhana memudahkan koordinasi yang efektif. Struktur organisasi kepanitaan dalam program SEMIPRO ini sederhana dan tidak terlalu hierarki atau tidak terlalu berjenjang.

7) Perumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas

Wewenang yang jelas tidak hanya mengurangi pertentangan di antara pegawai-pegawai yang berlainan, tetapi juga membantu mereka dalam pekerjaan dengan kesatuan tujuan. Pembagian wewenang dan tanggung jawab dalam kepanitaan program SEMIPRO ini begitu jelas. Masing-masing SKPD telah dibagi tugasnya masing-masing. Pembagian ini berjalan mudah karena anggota kepanitaan sebagian besar dari SKPD yang ada di Kota Probolinggo.

8) Komunikasi yang efektif

Komunikasi yang efektif merupakan salah satu persyaratan untuk koordinasi yang baik. Namun kenyataannya dalam program SEMIPRO tidak terjadi komunikasi yang efektif antar *stakeholders*. Komunikasi yang terjadi masih bersifat satu arah (*one-way*) dan didominasi oleh pemerintah kota Probolinggo.

9) Kepemimpinan supervisi yang efektif

Kepemimpinan yang efektif menjamin koordinasi kegiatan orang-orang, baik pada tingkat perencanaan maupun pada tingkat pelaksanaan. Dalam program ini yang menjadi penanggung jawab yaitu pejabat terpilih. Kepemimpinan yang terjadi dalam program SEMIPRO dirasa kurang begitu efektif. Hal itu dapat dilihat dari perencanaan program yang lambat dan mepet dengan waktu pelaksanaannya.

Syarat-syarat yang dikemukakan diatas merupakan syarat untuk menuju koordinasi yang efektif. Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam program SEMIPRO itu tidak muncul koordinasi yang efektif. Sembilan

syarat yang telah disebutkan diatas tidak terpenuhi dalam program ini. Koordinasi dapat tercapai jika adanya jalinan komunikasi antarpemangku kepentingan. Setelah adanya komunikasi maka aktor-aktor tersebut akan bergerak sesuai dengan tugasnya masing-masing. Dalam pergerakan mereka seharusnya ada koordinasi agar dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Adanya koordinasi yang efektif salah satunya harus memenuhi syarat yaitu adanya komunikasi yang efektif sebagaimana dijelaskan dalam Tripathi dan Reddy dalam Moekijat (1994:39). Komunikasi yang kurang efektif seperti ini akan mempengaruhi koordinasi dalam program ini. Dengan demikian dua unsur tersebut merupakan bagian yang penting dalam kehidupan manusia dan menjadi penting pula dalam menciptakan pola hubungan yang sinergi.

Koordinasi yang ada dalam program ini hanya sebatas pengumpulan (*collecting*) bantuan kontribusi dari masyarakat dan swasta. Koordinasi kegiatan yang selayaknya harus ada tetapi tidak terjadi. Bahkan untuk pengumpulan kontribusi ini saja ada permasalahan yaitu pengumpulan yang melalui beberapa pihak sehingga tidak bersifat satu pintu dan tidak tercatat dengan baik oleh pihak yang berwenang. Sedangkan yang menerima bantuan tidak melapor kepada dinas terkait yaitu DISKOMINFO sehingga kurang dapat diketahui siapa-siapa yang kontribusi baik dalam jumlah besar atau kecil yang ikut membantu mensukseskan program SEMIPRO. Permasalahan lainnya dapat dilihat seperti dalam perencanaan program yang mana program tersebut baru dirapatkan sekitar bulan Maret atau April (untuk SEMIPRO 2013) dan akan dilaksanakan pada bulan Juni sehingga akhirnya yang kelabakan pihak publikasi dan promosi. Dalam

mempublikasikan suatu program agar berjalan sukses setidaknya paling maksimal dilaksanakan lima atau enam bulan sebelumnya. Terlambatnya publikasi akan mempengaruhi jumlah pengunjung dan menggambarkan koordinasi internal yang kurang maksimal. Selain itu juga dalam koordinasi eksternal yaitu dalam pengkoordiniran swasta masih terkesan *amburadul*.

Kurang adanya koordinasi yang efektif dalam program SEMIPRO karena komunikasi yang berjalan pun tidak efektif sehingga akan mempengaruhi sinergitas antar *stakeholders* dalam program SEMIPRO. Kurang terjalinnya sinergi antara dua aktor dalam program ini tersebut kurang dirasa oleh masyarakat sendiri karena masyarakat terlalu terlena dengan sikap pemerintah yang selalu memanjakan mereka atau masyarakat memang bersikap acuh tak acuh terhadap pemerintah. Program ini memang bisa berjalan lancar dan dirasa sukses oleh beberapa kalangan karena pemerintah menyokong kekuatan secara maksimal dalam program ini. Hal itu dapat dilihat dari keterlibatan SKPD pemerintah dalam membantu mensukseskan jalannya program ini dan pembiayaan yang hampir sepenuhnya dikeluarkan melalui APBD. Dengan demikian hal tersebut menggambarkan bahwasannya koordinasi dan komunikasi dengan aktor lain kurang begitu terjalin secara maksimal sehingga jalinan sinergi pun kurang begitu kokoh dalam *stakeholders* tersebut. Permasalahan koordinasi dalam pelaksanaan program inovatif Pemkot Probolinggo nampaknya tidak hanya pada program SEMIPRO tetapi juga pada program inovatif di bidang lingkungan hidup yaitu GP Darling sebagaimana hal itu dipaparkan oleh penelitian terdahulu.

Ketidaksinergisan yang terjadi antar *stakeholders* tersebut dalam program SEMIPRO ditengarai terdapat beberapa hal yang menyebabkan terjadi, antara lain: pemerintah kurang berkomunikasi secara interaktif kepada dua aktor tersebut dan masih bersifat satu arah. Pemerintah masih merasa mampu membiayai program itu dengan kekuatannya sendiri; pemerintah kurang memberikan kesempatan kepada para pemangku kepentingan lainnya. Hal tersebut dapat dilihat bahwa pemerintah masih mendominasi kepemimpinan dalam program ini. Setidaknya pemerintah memberikan kesempatan kepada beberapa masyarakat dan swasta untuk ikutserta dalam kepemimpinan besar. Namun pemerintah masih *enggan* untuk memberikan kesempatan kepemimpinan kepada aktor lain. Kepanitaan untuk SEMIPRO ini seyogyanya diberikan kepada yang lebih berpengalaman yaitu seperti *event organizer* atau yang biasa dikenal dengan EO karena para birokrat dimungkinkan kurang memiliki pengalaman yang cukup untuk mengelola seperti itu. Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Aries dari DISKOMINFO mengatakan, “Pemerintah biarlah sebagai inisiator kemudian lempar saja ke EO. Biarlah pihak EO yang mencari sponsor. Sudah ada wacana dari beberapa birokrat untuk ke arah sana tapi nggak tahu lagi ya” (wawancara pada tanggal 15 Februari 2014 pukul 12.30 WIB). Pemberian kesempatan kepada khususnya *EO* untuk mengurus hal ini dikarenakan mereka lebih berpengalaman dalam hal mengelola suatu kegiatan; pemerintah harusnya juga merencanakan program tersebut agar menarik untuk berbagai kalangan sehingga mereka mau untuk ikut berkontribusi dikarenakan masih beberapa swasta yang dirasa masih enggan untuk bersinergi dengan pemerintah.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

SEMIPRO yang merupakan singkatan dari program Seminggu di Kota Probolinggo yaitu suatu program tahunan yang dilaksanakan biasanya pada liburan sekolah yaitu pada bulan Juni atau Juli. Program pengembangan pariwisata ini dimunculkan oleh pemerintah kota Probolinggo mulai tahun 2009 hingga tahun 2013 SEMIPRO dilaksanakan sebanyak lima kali. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwasannya:

1. Program SEMIPRO merupakan program pemerintah di bidang pariwisata baru untuk lebih meningkatkan kualitas pariwisata yang dimiliki. Program ini dilaksanakan selama satu minggu.
  - a. Program ini telah diklaim oleh pemerintah kota Probolinggo sebagai salah satu program inovasi, namun jika mengacu pada beberapa hal mengenai inovasi yaitu komponen-komponen dalam inovasi sebagaimana yang diungkapkan oleh Theodore Leviit (2002), dimensi kemampuan inovasi yang diungkapkan oleh Asropi (2008), dan atribut inovasi oleh Abdullah (2012) menyebutkan bahwasannya SEMIPRO bukan merupakan program inovasi. Meskipun berdasarkan sejarah munculnya SEMIPRO memenuhi definisi dari inovasi sebagaimana yang diungkapkan oleh Yogi (2007) yaitu yang salah satunya merupakan cara baru sebagai pengganti cara lama yang sebelumnya berlaku.

- b. *Stakeholder* yang dominan dalam program SEMIPRO adalah pemerintah. Hal ini bisa dilihat dari proses perencanaan hingga pelaksanaannya didominasi oleh pemerintah kota Probolinggo. Sedangkan *stakeholders* lainnya yaitu masyarakat dan swasta diposisikan sebagai pendukung kegiatan.
  - c. Pembiayaan yang digunakan dalam program Seminggu di Kota Probolinggo ini sebagian besar berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Probolinggo dan beberapa sumbangan dari swasta namun sayangnya masih dalam jumlah yang sedikit. Sedangkan dalam pelaksanaannya tidak terdapat transparansi dan akuntabilitas keuangan sehingga program ini tidak memenuhi karakteristik suatu tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagaimana yang diungkapkan oleh UNDP dalam Widodo (2001).
2. Tidak adanya sinergitas antar pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam program Seminggu di Kota Probolinggo dapat dilihat dari dua hal yaitu:
    - a. Komunikasi yang terjadi bersifat satu arah sehingga tidak terjadi pertukaran informasi antar *stakeholders*.
    - b. Dalam program SEMIPRO tidak nampak koordinasi melainkan hanya sebatas mengumpulkan bantuan dari *stakeholders* lainnya.
  3. Sinergi pada sebuah program dalam *governance* tidak akan terpenuhi jika:
    1. Terdapat aktor yang dominan.
    2. Komunikasi yang searah.
    3. Tidak adanya koordinasi.

## B. Saran

1. Pelaksanaan SEMIPRO dilaksanakan selama satu minggu penuh dan merupakan salah satu alternatif hiburan bagi masyarakat.
  - a. Pemerintah harusnya melakukan evaluasi pelaksanaan SEMIPRO yang berpengaruh pada peningkatan PAD, tidak hanya melakukan evaluasi dampak dari SEMIPRO kepada masyarakatnya. Selain itu juga pemerintah memanfaatkan alat teknologi dalam program ini yaitu misalnya melalui penggunaan layar lebar di pusat kota yang memperlihatkan kegiatan-kegiatan di beberapa lokasi pelaksanaan SEMIPRO.
  - b. Pemerintah kota Probolinggo harusnya tidak mendominasi peran mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Terdapat banyak sumber daya yang dapat dimanfaatkan dan menjadi kekuatan raksasa dalam mensukseskan program ini yaitu misalnya anak-anak sekolah mulai dari SD hingga SMA, paguyuban Kang dan Yuk Kota Probolinggo, Putri Lingkungan, dan lain-lain. Seyogyanya pemerintah berperan saat perencanaan namun ketika pelaksanaan SEMIPRO serahkanlah kepada masyarakat dan swasta atau menggunakan *event organizer* yang memiliki pengalaman dan ketrampilan untuk mengorganisir suatu kegiatan.
  - c. Pemerintah kota Probolinggo seharusnya mengurangi porsi pengeluaran untuk SEMIPRO dan lebih memperbanyak *sponsorship*. Selain itu juga dilakukannya transparansi dan akuntabilitas dana yang digunakan dalam pembiayaan SEMIPRO kepada masyarakat misalnya melalui media massa milik kota atau diumumkan saat pembukaan atau penutupan SEMIPRO.

2. Terjalinya sinergi dapat terwujud apabila ada dua unsur yaitu komunikasi dan koordinasi. Dengan demikian pemerintah harusnya menjalin komunikasi yang baik sehingga adanya pertukaran informasi dengan masyarakat dan swasta. Koordinasi yang terjalin yaitu pengintegrasian kegiatan dari masing-masing *stakeholders*. Komunikasi dan koordinasi dapat terjalin jika pemerintah tidak lagi mendominasi program SEMIPRO, harusnya pemerintah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada masyarakat dan swasta.



## Daftar Pustaka

- Asropi. 2008. Budaya Inovasi Dan Reformasi Birokrasi. *Jurnal Ilmu Administrasi*, V(3): 246 255.
- Abdullah, Muh. Tang. 2012. Inovasi Pemerintahan Daerah (Studi Inovasi Penyelenggaraan Urusan Pendidikan Di Kabupaten Gowa). PROPOSAL DISERTASI. Malang: FIA UB yang diakses pada tanggal 2 Desember 2013 dari <http://repository.unhas.ac.id/handle/1234567895878>.
- Basuki, Ananto dan Shofwan. 2006. *Penguatan Pemerintah Desa Berbasis Good Governance*. Malang: SPOD.
2012. Display Ekonomi Pendapatan Domestik Regional Bruto Daerah (PDRB) Kota Probolinggo (Harga Konstant) diakses pada tanggal 20 Februari 2014 melalui <http://regionalinvestment.bkpm.go.id/>
- Handayani, Soewarno. 1985. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Cetakan Keenam. Jakarta: PT Gunung Agung.
- Heribertus, B Sutopo. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS
- Hasan, Erliana. 2005. *Komunikasi Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.
- Hutauruk, Thomas R. 2010. Tinjauan Daya Inovasi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Desentralisasi di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur. *Borneo Administrator*, 6(3): 2161 2174.
- Ibrahim, Mohammad Jimmi. 1991. *Prospek Otonomi Daerah*. Semarang : Dahara Prize.
- Indradi, Samsiar Samsudin. 2008. *Administrasi Pemerintahan Lokal*. Malang: Argitek YPN.
- Innovation Government Award*. diakses pada tanggal 3 Maret 2014 dari <http://igi.fisipol.ugm.ac.id/>
- James L.Farr, Michael A. West. 1990. *Innovation And Creativity At Work Psychological and Organizational Strategies*. Chichester, England; New York: Wiley.
- Kasim, Azhar. 1993. Perkembangan Ilmu Administrasi Publik, *Manajemen Pembangunan*, I (3).
- Keban, Yeremias T. 2000. *Good Governance dan Capacity Building sebagai Indikator Utama dan Fokus Penilaian Kinerja Pemerintahan*, diakses pada tanggal 10 Desember 2013 dari [http://www.bappenas.go.id/files/681352298505yeremias\\_20091015151431\\_2389\\_0.pdf](http://www.bappenas.go.id/files/681352298505yeremias_20091015151431_2389_0.pdf)

\_\_\_\_\_. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori Dan Isu*. Yogyakarta: Gaya Media.

Keputusan Walikota Probolinggo No. : 188.45/113/KEP/425.012/2011 tentang Panitia Penyelenggara Seminggu di Kota Probolinggo (SEMIPRO) Tahun 2011

Krina, Loina L. 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Jakarta: Bappenas.

Kurniawan, Teguh. 2007. Pergeseran Paradigma Administrasi Publik: Dari Perilaku Model Klasik dan NPM ke *Good Governance*. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 7: 52-70.

Laporan Akhir (Dampak SEMIPRO Ditinjau dari Aspek Ekonomi, Sosial Budaya dan Pengembangan Kepariwisata di Kota Probolinggo (2010))

Laporan Akhir (Kajian Evaluasi Seminggu di Kota Probolinggo (SEMIPRO) tahun 2011)

Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Koordinator Publikasi dan Dokumentasi SEMIPRO 2012

Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Koordinator Publikasi dan Dokumentasi SEMIPRO 2011

Laporan Akhir Pendampingan Capaian Tujuan Pembangunan Millenium (Evaluasi Pelaksanaan Program MDG's Kota Probolinggo tahun 2012)

Lubis, Subaktian. tt. Sinergi Pengelolaan Sumber Kekayaan Alam Di Laut Yang Diharapkan diakses tanggal 11 Juni 2014 dari <http://www.mgi.esdm.go.id/content/sinergi-pengelolaan-sumber-kekayaan-alam-di-laut-yang-diharapkan>

Karnaval Budaya Nusantara SEMIPRO 2013

H. M. Buchori, SH, M.Si.: *Selalu Komunikasi dengan Rakyat*, diakses pada tanggal 7 Desember 2013 dari <http://www.apeksi.or.id>

Mathew, M. B dan M. Huberman. 1992. *Analisa Data Kualitatif, trans.* Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI press.

Mongid, Abdul, dkk. 2000. *Jawa Timur Menuju Daerah Otonom*. Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Perbanas Surabaya.

Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Moekijat. 1994. *Koordinasi (Suatu Tinjauan Teoritis)*. Bandung : Mandar Maju

Mulgan, G. & Albury, D. 2003. *Innovation in the Public Sector*. Working paper version 1.9, October, Strategy Unit UK Kabinet Office.

Nazir, Muhammad. 1998. *Metode Penelitian*, Jakarta : Galia Indonesia.

Najiyati, Sri dan S.R. Topo Susilo. 2011. Sinergitas Instansi Pemerintah Dalam Pembangunan Kota Terpadu Mandiri (*The Synergy of Government Institutions in The Transmigration Urban Development*). Jurnal Ketransmigrasian, 28 (2): 113 124 diakses pada tanggal 17 Maret 2014 dari [http://puslitbangtrans.depnakertrans.go.id/pdf/SINERGITAS\\_INSTANSI\\_PEMERINTAH\\_DALAM\\_PEMBANGUNAN\\_KOTA\\_TERPADU\\_MANDIRI.pdf](http://puslitbangtrans.depnakertrans.go.id/pdf/SINERGITAS_INSTANSI_PEMERINTAH_DALAM_PEMBANGUNAN_KOTA_TERPADU_MANDIRI.pdf)

Noer, Hamka Hendra. tt. Pergulatan Wacana Administrasi Negara diakses pada 2 Maret 201 melalui <http://www.stiami.ac.id/jurnal/download/26/pergulatan-wacana-administrasi-negara>

Noor, Irwan. 2013. *Desain Inovasi Pemerintahan Daerah*. Malang: UB Press

Pasolong. Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Prasetyo, Bambang dan Lina M.Jannah. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Peraturan Bersama Menteri Negara Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 03 dan No. 36 Tahun 2012 Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah.

Peraturan Pemerintah Kota Probolinggo tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah diakses 2 Maret 2014 melalui <http://jdih.jatimprov.go.id/>

Peta Kota Probolinggo diakses pada tanggal 2 Maret 2014 melalui <http://probolinggokota.go.id/>

Profil Kota Probolinggo 2013 diakses pada tanggal 17 Maret 2014 melalui <http://probolinggokota.go.id/>

Rogers, E.M. 2003. *Diffusion of Innovations 5th edition*. Free Press: New York.

Rosalina, Rina. 2011. Inovasi Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Lingkungan Hidup (Studi Tentang Program Inovatif Pada Badan Lingkungan Hidup di Kota Probolinggo). Skripsi. Universitas Brawijaya

RPJMD Kota Probolinggo 2010-2014 diakses pada tanggal 26 Juni 2013 melalui <http://bappeda.probolinggokota.go.id/>

Sedarmayanti. 2003. *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dalam Otonomi Daerah Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan*. Bandung: Bandar Maju.

———. 2004. *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik): Bagian Kedua*. Bandung: Mandar Maju.

———. 2009. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan*. Bandung: Refika Aditama.

Sekilas SEMIPRO, diakses pada tanggal 22 September 2013 dari <http://dispobpar-kotaprobolinggo.com>.

Silalahi, Ulbert. 2011. *Asas-asas Manajemen*. Bandung: Refika Aditama

Sinergi diakses pada tanggal 11 Juni 2014 dari <http://kbbi.web.id/sinergi>

Sofyandi, Herman dan Iwa Garniwa. 2007. *Perilaku Organisasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Subana dan Sudrajat. 2005. *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Pustaka Setia.

Sumarto, Hetifah Sj. 2003. *Inovasi, Partispasi dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Suprayogi, Yogi Sugandi. 2011. *Administrasi Publik; Konsep dan Perkembangan Ilmu di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Suwarno, Yogi. 2008. Inovasi di Sektor Publik diakses pada tanggal 30 November 2013 dari <http://zerosugar.files.wordpress.com/2011/03/inovasi-sektor-publik.pdf>.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Watson, Douglas J. 1997. *Innovative Government: Creative Approach to Local Problems*. London: Greenword Publishing Group.

**Surat Keterangan Riset dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
(BAPPEDA) Kota Probolinggo**



**PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
Jalan Soekarno Hatta No. 52 & (0335) 427232, 430293; Fax (0335), 427232  
Web Site : <http://www.probolinggo.go.id>  
Email : [bappeda@probolinggo.go.id](mailto:bappeda@probolinggo.go.id)  
**PROBOLINGGO 67211**

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 072/Spk/425.700/2014

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Ir. IMANTO,MM  
Jabatan : Kepala BAPPEDA Kota Probolinggo  
Alamat Kantor : Jl Soekarno Hatta No 52 Kota Probolinggo

Dengan ini menyatakan bahwa Sdr Triana Rahmawati Nim; 105030100111027 dari Universitas Brawijaya Malang telah selesai melaksanakan penelitian selama 1 ( satu ) bulan mulai dari tanggal 10 Pebruari s/d 10 Maret 2014 di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Probolinggo.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA BAPPEDA KOTA PROBOLINGGO

**Ir. IMANTO, MM**  
Ketua Muda  
NIP. 19591231198903 1 066



**Surat Keterangan Riset dari Dinas Komunikasi dan Informatika  
(DISKOMINFO) Kota Probolinggo**



**PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan Dr. Moch. Saleh No. 05 Telp./Fax. (0335) 422135  
PROBOLINGGO 67211

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 072/173/425.113/2014

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **REY SUWIGTYO, S.Sos. M.Si**  
NIP : 19670711 198809 1 001  
Pangkat/Golongan : Pembina Tk.I/IV-b  
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Dengan ini menerangkan bahawa mahasiswa yang beridentitas:

Nama : **TRIANA RAHMAWATI**  
NIM : 105030100111027  
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik  
Fakultas : Ilmu Administrasi  
Universitas : Universitas Brawijaya Malang

Bahwa yang bersangkutan sudah melaksanakan penelitian di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo sebagaimana Jadwal yang sudah ditentukan oleh pihak Universitas Brawijaya Malang.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Probolinggo, 16 April 2014

**KEPALA DINAS  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KOTA PROBOLINGGO**



**REY SUWIGTYO, S.Sos. M.Si**  
Pembina Tk.I  
NIP.19670711 198809 1 001



## Surat Keterangan Riset dari Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya, dan Pariwisata (DISPOBPAR) Kota Probolinggo



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO  
**DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, BUDAYA DAN PARIWISATA**  
Jl. Soekarno-Hatta No. 273 – Telp. (0335) 426653  
PROBOLINGGO 67211

### SURAT KETERANGAN

Nomor : 070 / 602 / 425.112 / 2014

Yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : Drs. Paeni, MH
2. Jabatan : Kepala Dinas Pemuda Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kota Probolinggo
3. Pangkat : Pembina Tk I
4. NIP : 19620714 198903 1 009

Dengan ini menerangkan bahwa :

1. Nama : Triana Rahmawati
2. NIM : 105030100111027
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
5. Fakultas : Ilmu Administrasi
6. Alamat : Jl. Simo Katrungan Kidul IV / 21 Surabaya

Bahwa yang bersangkutan sudah melaksanakan Penelitian di Dinas Pemuda Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kota Probolinggo sebagaimana jadwal yang sudah ditentukan oleh pihak Universitas Brawijaya Malang.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS PEMUDA  
OLAHRAGA BUDAYA DAN PARIWISATA  
KOTA PROBOLINGGO



Kegiatan-Kegiatan Seminggu di Kota Probolinggo (SEMIPRO) mulai

Tahun 2009-2013

No.	Nama Kegiatan	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Grand Opening	1. Tarian Selamat Datang 2. KOSELA 3. KOBUDA	1. Tari Ngremo 2. Tari Kiprah Lengger 3. Tari Glipang	Grand Final Kang Yuk	1. Tarian Selamat Datang 2. Lagu Perjuangan 3. Tarian Probolinggo	1. Lagu Sekar Bayuangga 2. Lagu Gunung Bromo 3. Tari Amolong
2	Pagelaran Budaya	1. Tari Lengger 2. Karya tari 3. Ludruk Tradisional dan Remaja	1. Ludruk Remaja 2. Budaya-Budaya Daerah	1. Ludruk Remaja 2. Ludruk Tradisional 3. Pentas Tradisional Lengger 4. Wayang Kulit Ki Sapto Carito (Taman Siswa)	1. Pagelaran Ludruk	1. Pagelaran Ludruk
3	Seni/Pertunjukan	1. Etnis Budaya Tionghoa (Cina) 2. Etnis Budaya Arab 3. Kreasi Baru	1. Gebyar Musik keroncong 2. Reog 3. Musik Tradisional Tionghoa 4. Defile Korps Musik	1. Peragaan Busana 2. Pemutaran Film Dokumenter 3. Musik Tradisional Orkes Gambus 4. Pentas band	1. Etnis Pendalungan 2. Pentas Musik Tradisional 3. Kesenian Etnis Arab 4. Kesenian Etnis Tionghoa	1. Kesenian Etnis Pendalungan 2. Kesenian Etnis Arab 3. Kesenian Etnis Tionghoa 4. Pentas Musik Band Pelajar

<p>Lomba/ Kontes/ Festival</p>	<p>1. Lomba Foto KOBUDA 2. Kerapan Kambing</p>	<p>5. Musik Dug-Dug 6. Barongsai 7. Musik Tradisional Etnis Arab 8. Tari Klasik 9. Musik Ronjengan 10. Band 11. Penayangan Film/Dokumenter 1. Kontes Ternak Sapi 2. Lomba Foto Hewan</p>	<p>5. Parade Kirab Drumband 6. Pembukaan FKPU dan Penampilan dari Gresik, Tuban, Pamekasan dan Bangkalan 7. Campursari dan Kerocong FKPU 8. Kesenian Etnis Tionghoa 9. Musik Islami 10. Tari Modern dan Tradisional 11. Orkes Melayu Dangdut 1. Kontes Mobil VW 2. Probolinggo Sail</p>	<p>5. Pentas Musik Band 6. Pentas Musik Campursari dan Keroncong 7. Pentas Orkes Melayu 8. Gelar Musik Jalanan 9. Penyajian Tari dengan judul "Ning Kota Probolinggo" 10. Pentas Seni Musik 11. Jazz dan Stand Up Comedy 12. New Yuangga Band dan Bayuangga Batik Carnival 1. Lomba Unjuk gelar Drumband 2. Festival Jaran Bodhag</p>	<p>5. Pentas Musik Campursari dan Keroncong Ludruk Remaja 6. Wayang Kulit 7. Pentas Orkes Melayu 8. Hiburan Kirun 9. Jazz dan Stand Up Comedy 1. Jaran Bodhag 2. Kerapan Kambing</p>
------------------------------------	--	--	---	---	--



3. Lari 10 KM	3. Lomba Foto Pawai Budaya	3. Pameran dan Lomba Bonsai	3. Kerapan Kambing	3. Kerapan Sapi Merah
4. Festival Teater Modern	4. Festival Teater Anak Modern	4. Festival Teater Remaja	4. Kerapan Sapi Merah	4. Kerapan Sapi Brujul
5. Site Plan	5. Festival Band	5. Kerapan Sapi Merah	5. Kerapan Sapi Brujul	5. Festival Teater Modern
6. Lomba Foto Pembangunan	6. Probolinggo Fishing Invitation	6. Kreatifitas Anak TK	6. Festival Teater Modern	6. Lomba Memancing di Laut
7. Desain dan Hasil Pembangunan	7. Festival Media Pertunjukan Rakyat	7. Lomba Memancing	7. Lomba Mancing di Laut	7. Lomba Memancing di Tambak
8. Desain Sistem IT	8. Lomba Melukis dan Mewarnai	8. Lomba Canoe	8. Kontes Tanaman Bonsai	8. Kontes Tanaman Bonsai
9. Pembuatan Situs/Web Site		9. Lomba Buruk Berkicau	9. Lomba Burung Berkicau	9. Lomba Burung Berkicau
10. Pembuatan Laporan Audio Visual		10. Lomba Jalan Cepat	10. Lomba Lukis/Mural	10. Lomba Futsal Wanita
11. Karya Ilmiah Remaja		11. Festival Jaran Bodhag	11. Dance Competition	11. JUARA (RANGKING 1)
12. Lomba Burung Berkicau		12. Festival Kesenian Pesisir Utara	12. Lomba Mewarnai TK	12. Lomba Mewarnai TK se-Kota
13. Lomba Lukis		13. Festival Olahan Pangan Mangrove	13. Festival Mematik	
14. Lomba Mancing		14. Lomba Mancing di Laut	14. Festival Rujak Uleg	

Pameran

15. Kontes Hewan Ternak Sapi

1. Art, Culture & Modern Technology Exhibition

1. Pameran Produk KIM & IT

15. Festival FKPU dan Penampilan dari Sumenep, Surabaya, Lamongan, Sidoarjo, dan Sampang

16. Kerapan Kambing

17. Lomba Unjuk Gelar Drumband

18. Kerapan Sapi Brujul

19. Lomba Sepeda

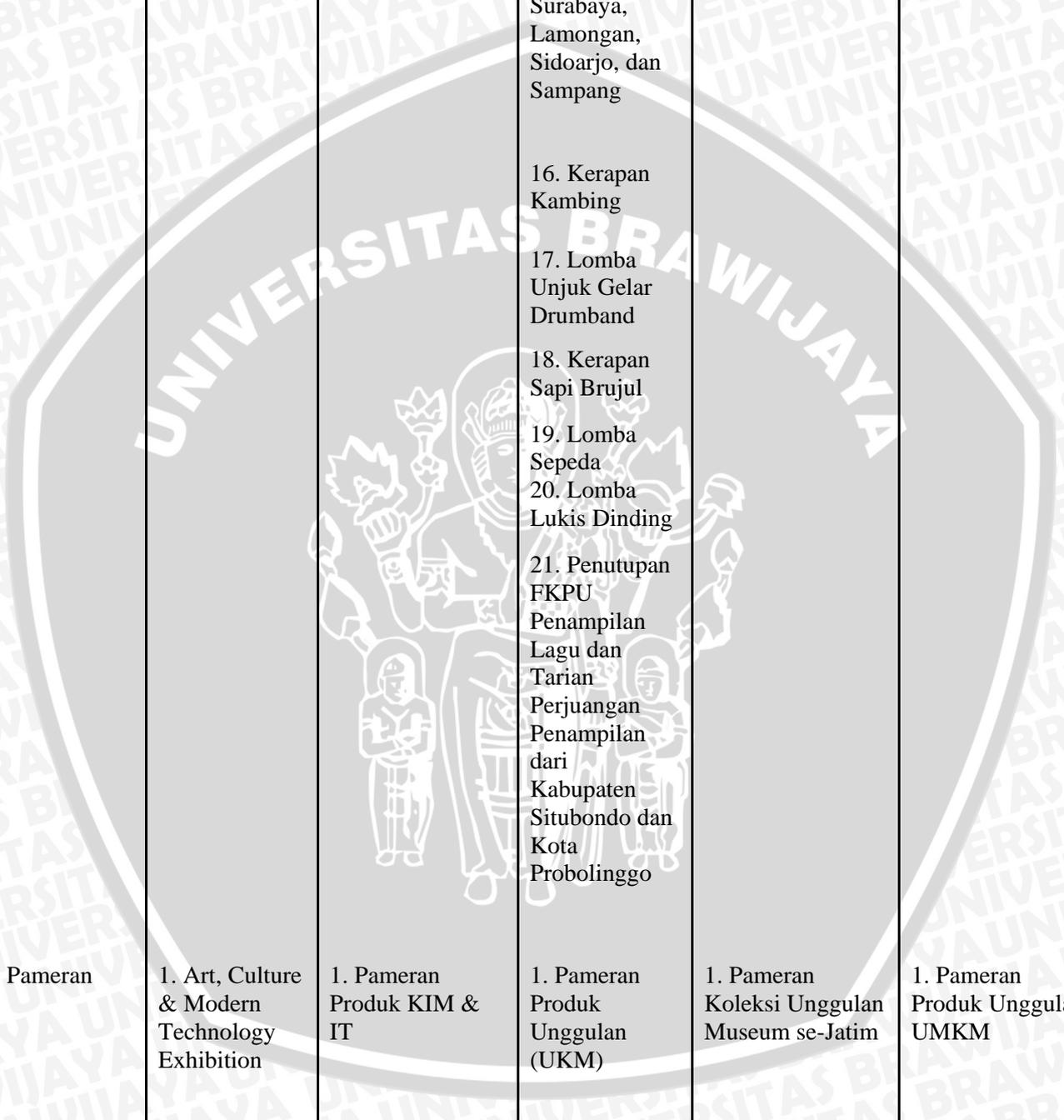
20. Lomba Lukis Dinding

21. Penutupan FKPU Penampilan Lagu dan Tarian Perjuangan Penampilan dari Kabupaten Situbondo dan Kota Probolinggo

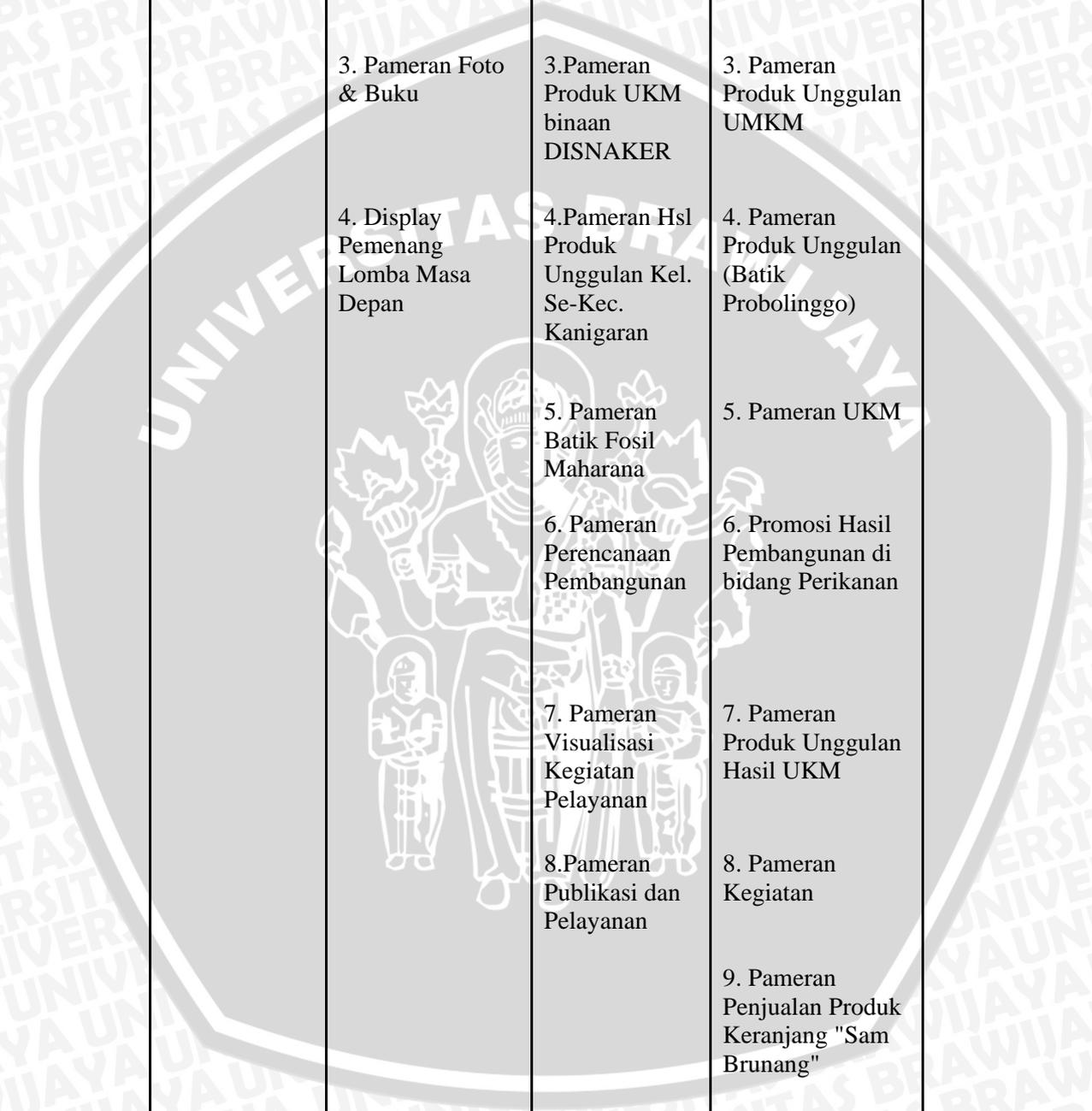
1. Pameran Produk Unggulan (UKM)

1. Pameran Koleksi Unggulan Museum se-Jatim

1. Pameran Produk Unggulan UMKM



<p>Seminar</p>	<p>2. Pameran UKM (Usaha Kecil dan Menengah)</p> <p>Perencanaan Pembangunan Partisipatif</p>	<p>2. Pameran UKM</p> <p>3. Pameran Foto &amp; Buku</p> <p>4. Display Pemenang Lomba Masa Depan</p>	<p>2. Pameran Foto tempo dulu &amp; Bursa Buku Murah</p> <p>3. Pameran Produk UKM binaan DISNAKER</p> <p>4. Pameran Hsl Produk Unggulan Kel. Se-Kec. Kanigaran</p> <p>5. Pameran Batik Fosil Maharana</p> <p>6. Pameran Perencanaan Pembangunan</p> <p>7. Pameran Visualisasi Kegiatan Pelayanan</p> <p>8. Pameran Publikasi dan Pelayanan</p> <p>Seminar Pengembangan Ekonomi</p>	<p>2. Pameran Buku</p> <p>3. Pameran Produk Unggulan UMKM</p> <p>4. Pameran Produk Unggulan (Batik Probolinggo)</p> <p>5. Pameran UKM</p> <p>6. Promosi Hasil Pembangunan di bidang Perikanan</p> <p>7. Pameran Produk Unggulan Hasil UKM</p> <p>8. Pameran Kegiatan</p> <p>9. Pameran Penjualan Produk Keranjang "Sam Brunang"</p> <p>Seminar (Gelar Potensi Daerah)</p>	<p>2. Promosi Hasil Pembangunan di bidang Perikanan</p>
----------------	--	---	--	---	---



7

Kuliner

1. Kuliner Tionghoa

2. Kuliner Etnis Cina

1. Kuliner Tempoe Doloe

2. Kuliner Pentalungan

3. Kuliner Masakan Jawa

4. Kuliner Penjualan Masakan

5. Soto Kraksaan dan Es doger

6. Kuliner Arab

7. Etnis Tionghoa

1. Kuliner Etnis Arab

2. Kuliner Etnis Tionghoa

3. Makanan dan Minuman Masakan Jawa

4. Soto Kecapan dan Wedang Jeruk

5. Gelar Kuliner oleh Keluarga Anak Jalanan dan PMKS yang mempunyai usaha

6. Kuliner Etnis Pentalungan

1. Kuliner Etnis Arab

2. Kuliner Etnis Pentalungan

3. Kuliner Etnis Tionghoa

8

Olahraga

1. Sepeda Gunung

2. Jalan Santai

3. Gerak Jalan KANCABA

1. Kejuaraan Bola Basket

2. Kejuaraan Pencak silat

3. Fun Climbing

4. Kejuaraan Bola Voli antar Kelurahan

1. Turnamen Catur Terbuka Nasional

2. Kejuaraan Bola Voli Antar Kelurahan

3. Triathlon (Renang, Balap, dan Lari)

4. Lomba Lari 10 K

1. KEJURDA Drumband 2013 TK/SD/SMP/SMA

2. Kejuaraan Bola Voli Antar Kelurahan

3. Festival Seni Pencak se-Kota

4. Gerak Jalan PERWOSI CUP

Pawai

Pawai Budaya

Pawai Budaya

Pawai Budaya

Pawai Budaya

5. Triathlon  
(Renang,  
Balap Sepeda,  
dan Lari)

5. Lomba Renang  
Bebas 50 m

5. SEMIPRO CUP  
Tahun 2012  
(Pertandingan  
Tenis Lapangan se  
Jawa Timur)

6. Final Sepak  
Bola Antar  
Kelurahan

6. Kejuaraan  
Tinju Walikota  
Cup I

6. Lomba Lari 10  
K Pelajar

7. Kejuaraan  
Bulu Tangkis

7. *Futsal  
Competition*

7. Gelar Tinju  
Profesional  
Walikota Cup I

8. Lomba  
Balap Sepeda

8. *3 on 3 Basket  
Ball*

8. FUN BIKE

9. Lomba Lari  
10 K

9. Lomba Jalan  
Cepat Estafet 4 x  
100 m

9. GOLF

10. Kirab  
Drumband

10. Kirab  
Drumband

11. *Fun Bike*

12. Kejuaraan  
Balap Sepeda se-  
kota Probolinggo

13. Kejuaraan  
Tenis Lapangan  
se-Jatim

14. Lomba  
Sepeda *Freestyle*

Pawai Busana  
Batik

<p>Lain-Lain</p>	<p>1. Expo Flora dan Fauna</p>	<p>1. Pekan Pendidikan dan Budaya Probolinggo</p> <p>2. Touring Komunitas Sepeda Lama</p>	<p>1. KOSELA</p> <p>2. JASMAS (Jarang Aspirasi Masyarakat) pada lima kelurahan yaitu Kelurahan Sumber Taman, Kelurahan Jebeng Lor, Kelurahan Tisnonegaran, Kelurahan Mangunharjo, Kelurahan Triwung Lor</p>	<p>1. Pelayanan Ijin pada Badan Pelayanan Perijinan dan Produk UKM</p> <p>2. Penjualan Komoditi Produk Unggulan Masyarakat Kec. Wonoasih</p>	<p>1. Pasar Malam</p> <p>2. Pameran Wirausaha Baru</p>
	<p>3. Expo Flora dan Fauna</p>	<p>3. Expo Flora dan Fauna</p>	<p>3. Sembako Gratis</p> <p>4. Sembako untuk GAKIN</p> <p>5. Sembako untuk anak Yatim Piatu dan Dhuafa</p> <p>6. Pijat Tuna Netra</p>	<p>3. Tanaman Hias</p> <p>4. Display Informasi dan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil</p> <p>5. Pemeriksaan Gula Darah dan Konsultasi Kecantikan</p> <p>6. P3EL</p>	<p>3. JOB MARKET</p> <p>4. Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil</p> <p>5. Bakti Sosial (Pembagian Sembako)</p> <p>6. Khotmil Qur'an Kubro 1000 santri</p>

11	Closing	Panggung Peserta Kirab	1. Lagu Perjuangan. 2. Tarian probolinggo	7. Bagi-bagi Kaos Sablon Apel  8. Senam ASMA Lansia  9. Lansia Idol  10. Jalan Sehat 11.Khotmil Qur'an Seribu Santri TPQ Bil Jamaah 12. Diskusi Budaya Pesisir FKPU	7. Pemberian Sembako Gratis kepada Anak Yatim dan Kaum Dhuafa  8. Khotmil Qur'an dan Doa bersama  9. Pasar Malam  10. KANCABA 11. Sunatan Massal 12. Komunitas Jeep 4x4 13. Bursa Kerja/Probolinggo Market Fair	7. Lomba Olahan Pangan Lokal Hasil Pekarangan  8. Pemberian Makanan Gizi Anak dan Gizi Ibu Hamil  9. Pelayanan Kesehatan Masyarakat  10. Sunatan Massal 11. Operasi Katarak
<b>Jumlah Kegiatan</b>		<b>30 Kegiatan</b>	<b>35 Kegiatan</b>	<b>84 Kegiatan</b>	<b>75 Kegiatan</b>	<b>53 Kegiatan</b>